

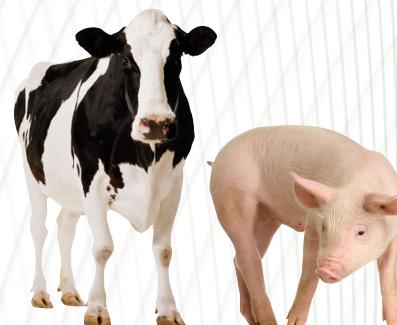


Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA

REALITA DI LUAR KANDANG

Dinamika Perkembangan Peternakan

Peternakan sebagai usaha ekonomi telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Pelaku industri peternakan berskala besar dan pelaku usaha peternakan berskala kecil bahu membahu membantu pemerintah menyediakan kebutuhan bahan pangan asal ternak. Namun demikian, masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi pemangku kepentingan di bidang peternakan dalam mengembangkan komoditas ini di negara kepulauan yang besar dengan ragam budaya, alam, dan latar belakang pendidikannya. Pemikiran yang tertuang dalam buku ini hanya sekelumit opini dari berbagai aspek pembangunan peternakan yang mudah-mudahan bermanfaat.



ISBN 978-979-15376-6-7



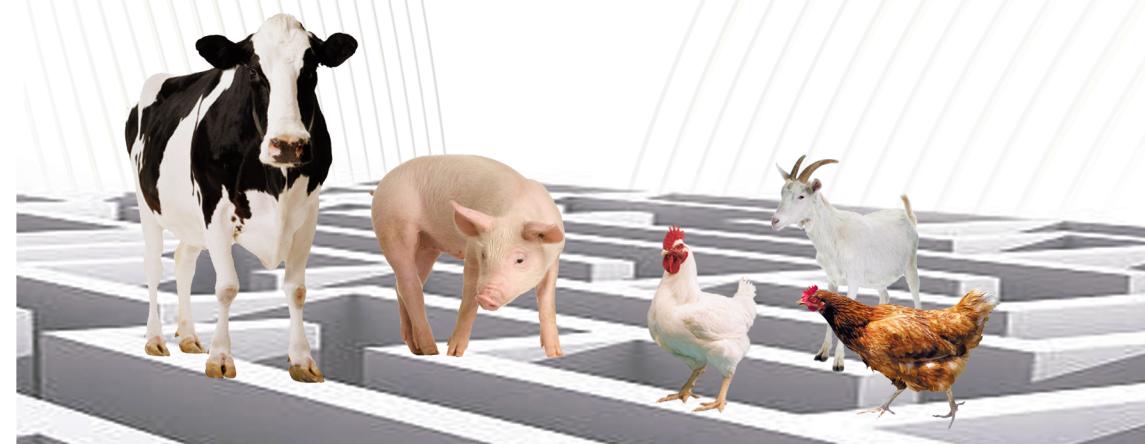
9 789791 537667

Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA

REALITA DI LUAR KANDANG

REALITA DI LUAR KANDANG

Dinamika Perkembangan Peternakan



PT Permata Wacana Lestari
2013

Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA

REALITA DI LUAR KANDANG

**PT. Permata Wacana Lestari
(Penerbit Majalah TROBOS)**

Jakarta 2013

PERHATIAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarakan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

REALITA DI LUAR KANDANG

xi, 182 hlm. 21 cm

ISBN 978-979-15376-6-7

Oleh:

Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA

Desain Sampul dan Lay-out:
M. Sewoko

Foto-foto:
Dok. TROBOS

Diterbitkan Oleh:
PT. Permata Wacana Lestari (PWL)
(Penerbit Majalah TROBOS)
Jakarta – Indonesia

Cetakan Pertama, November 2013

Hak Cipta dilindungi Undang–Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Copyright@2013 PWL

Prakata

Pada tanggal 31 Desember 2002, lokakarya tentang perlunya menyusun RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan diselenggarakan di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yang didiskusikan dalam lokakarya tersebut adalah aspek peternakan saja dan saya bertindak sebagai salah satu moderator. Di situ hadir para pimpinan Fakultas Peternakan, pimpinan asosiasi atau himpunan di bidang peternakan, dan salah satunya Pak Wahyudi Mohtar (almarhum) yang adalah Pendiri/Pemimpin Umum Majalah Agribisnis Peternakan dan Perikanan TROBOS. Di situ saya berkenalan dengan beliau dan beberapa bulan kemudian ketemu lagi di forum lain, sampai akhirnya sering ketemu dan menjadi akrab. Beliau sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2006 dan RUU yang dibahas tersebut juga sudah disahkan menjadi Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 12 Mei 2009.

Pada suatu hari di awal tahun 2003, atas anjuran Pak Aprillani Purwanto (Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia periode 2002-2006), saya minta ijin pak Wahyudi untuk bisa menulis opini di Majalah TROBOS. Secara terpisah, Pak Purwanto juga mengontak dan mendorong Pak Wahyudi untuk bisa memuat tulisan saya. Akhirnya tulisan saya berjudul "Sarjana Peternakan di era PT-BHMN" dapat diterbitkan di rubrik Opini. Ini merupakan tulisan opini pertama saya di majalah tersebut.

Di lain waktu, saya minta ijin lagi ke Pak Wahyudi untuk bisa menulis opini lainnya. Pak Wahyudi tidak hanya mengijinkan tetapi justru meminta saya menulis opini setiap bulan. Saya juga diminta Pak Wahyudi duduk

sebagai salah satu anggota Dewan Redaksi. Ini membuat saya memiliki pergaulan luas di komunitas peternakan. Dengan pergaulan yang luas itu, saya tahu banyak informasi tentang berbagai masalah di bidang peternakan.

Saya menulis apa saja terkait isu dunia peternakan yang berkembang di Indonesia di tengah kesibukan saya sebagai dosen Fakultas Peternakan IPB. Saya menggali banyak informasi tentang berbagai hal di bidang peternakan dan hasilnya saya tulis dan dimuat di majalah TROBOS, baik berupa opini maupun artikel deskriptif.

Kumpulan tulisan itu yang didokumentasikan dalam buku ini dan saya beri judul "Realita di Luar Kandang". Itu merupakan cerminan pemikiran saya terhadap berbagai isu dan dinamika peternakan yang tidak terkait dengan masalah teknis beternak di kandang. Isinya bermacam-macam dan bernuansa suatu gagasan, atau kadang-kadang usulan solusi terhadap permasalahan, atau apresiasi terhadap suatu keberhasilan, atau ajakan berkolaborasi dalam upaya menyelesaikan suatu persoalan, dan lain lain.

Terkait berbagai pemikiran yang saya tumpahkan di majalah TROBOS, saya merasa sangat beruntung dapat bersama-sama duduk dalam Dewan Redaksi Majalah TROBOS (Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Sc, Ir. H. Don P. Utojo, MBA, dan Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec.) yang saat ini dipimpin Pak Rahadi Sutoyo (jurnalis senior) karena saya belajar tentang banyak hal yang terjadi di luar kandang dari pemikiran beliau-beliau tersebut. Saya juga sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yusman Tamara yang memberi banyak pelajaran dan pemahaman tentang industri dan bisnis perunggasan di Indonesia. Buat Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si – sahabat saya yang mantan mahasiswa saya, yang selalu memberi amunisi "agak lain" di dalam banyak pemikiran saya, saya sangat apresiasi sekali.

Akhirnya, atas bantuan sahabat baik saya, Bu Fitri selaku Pimpinan Umum, drh. Iswandari Setyawan, yang pernah duduk sebagai Pimpinan Harian majalah TROBOS, Pak Purnomo selaku Pimpinan Perusahaan, buku berisi kumpulan tulisan saya tersebut dapat diterbitkan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih tak terhingga kepada Adriana S.Pt. (juga mantan mahasiswa saya di Fapet IPB) yang mengedit ulang semua tulisan dan menyusunnya menjadi buku seperti ini. Juga kepada Pak Woko yang mendesain tampilan buku beserta sampulnya, saya apresiasi atas ketekunan

dan totalitasnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Wahyudi Mohtar (almarhum) yang membuat buku ini ada. Terakhir, tapi bukan paling akhir, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Bapak Anton Supit (Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia, GAPPI) atas perhatian, dukungan penuh, dan kemudahan yang diberikan kepada saya sampai akhirnya buku ini dapat diterbitkan.

Demikian, semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca khususnya generasi muda yang peduli terhadap pengembangan peternakan di Indonesia.

Muladno

Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	ix
A. Peternakan Indonesia Ke Depan	
1. <i>Three in one</i> dalam pembangunan peternakan	2
2. Visi Indonesia 2030, Peternakan?	8
3. Peternakan dan MDGs	10
4. Mencerdaskan Bangsa <i>Urgent!</i>	13
B. Menuju Kemandirian Pangan (Swasembada Protein Hewani)	
1. Populasi Ternak Berencana	18
2. Revitalisasi Menuju Kemandirian Pangan	20
3. Ekspor Ternak Pemicu Pembangunan Peternakan!	23
4. Suaka Politik 42 Warga Papua dan Peternakan	26
5. Awas Daging dari India	28
6. MBM <i>Just Do It!</i>	31
7. PSD versus PKD	33
8. Berdaulat Pangan = Kemandirian Benih/Bibit	35
9. Swasembada Daging Jangan Dibuat Main-Main	38
10. Catatan Untuk Mencapai Swasembada Daging	41
11. Sensus dan Implikasinya	43
12. Membangun Kerjasama Bisnis Persapian Indonesia-Australia	45
C. Optimisme dan Kontra Produktif dalam Memajukan Peternakan	
1. Tsunami dan Pilkada	52
2. RPPK, Masihkah Peternakan Terpinggirkan?	54
3. Potensi Domba/Kambing Yang Terlupakan!	56
4. Ekspor Sapi Bali ke Malaysia	59
5. Glonggongan dan Tiren Menuntut Perhatian	61
6. BBM dan HDI, Hati-hati CLQ & PMK	63
7. Problem Peternakan Bukan Sekedar AI	65
8. Cukup flu burung saja	68

D. Profesionalitas Sumberdaya Manusia dalam Peternakan

1. Sarjana Peternakan di Era PT-BHMN	74
2. Kurikulum Versi 1994: Penghasil S.Pt Seperempat Matang	77
3. Membangun <i>Animalculture</i>	79
4. Penyuluhan No, VCD Yes!	82
5. Suatu Kebutuhan Bernama Profesionalisme	84
6. Refleksi Simposium Vienna 2009	87
7. Membangun Militansi Ilmuwan Peternakan Indonesia	89

E. Revitalisasi Peran Kelembagaan

1. Peternakan Perlu Koalisi	94
2. Dibalik Rumor Suksesi Dirjen	96
3. Dirjen Baru Dengan Segudang "PR"	99
4. Organisasi Peternak Kuat, Semua Kuat	101
5. Perlukah Dibentuk Departemen Peternakan?	104
6. Dualisme Birokrasi Peternakan	106
7. Reorganisasi Birokrasi Peternakan	109
8. Iptekda LIPI	111
9. Menunggu Gebrakan Tim Baru Dirjen Peternakan	113
10. Ditjennak, ISPI, FPPTPI: Berpikir Positif Bertindak Kreatif	115
11. Jelang Kongres IX ISPI	117
12. "Ngalor-ngidul" Statistik Peternakan	119

F. Perunggasan di Indonesia

1. Mempersoalkan Peternakan Rakyat di Perunggasan	124
2. Dana Kompensasi Subsidi BBM dan Peternakan	127
3. HUT ke-61 RI & PMBC	129
4. Menata Bisnis Perunggasan Akibat Flu Burung	132
5. Selamat Tinggal Pola "Primitif"	134
6. ABG Harus Solid	137
7. Faktor SDM Menentukan!	140
8. Harus Tahu Dulu Strukturnya!	142
9. Menyikapi Perda DKI No. 4/2007	145
10. Hasil Catatan Dialog Publik	148
11. Himpuli dan Flu Burung	150

12. Skenario Kompensasi Yang Produktif	153
13. Kendalikan Perijinan Perusahaan Peternakan	156
14. Integrasi Usaha Perunggasan	159
 G. Apresiasi Peternakan	
1. Karya Sang <i>Pioneer</i>	164
2. Vaksin AI Rekombinan	166
3. Satwa Nugraha dan Politik Peternakan	168
4. Nobel Perdamaian 2006 & Peternakan	170
5. Babi dan Rekayasa Genetik	172
6. Refleksi di Edisi Seratus	175
7. Selamat Jalan Pak Yud	177
 Biodata	181

A

Peternakan Indonesia ke Depan



1. *Three in one* dalam Pembangunan Peternakan

Pola pembangunan peternakan di Indonesia tampaknya masih perlu diperbaiki secara terus menerus. Indikator yang dapat ditampilkan adalah populasi ternak yang relatif konstan; rata-rata konsumsi daging, susu dan telur sebagai pangan sumber protein oleh masyarakat Indonesia masih rendah; taraf hidup atau kesejahteraan peternak juga belum banyak mengalami peningkatan. Ironisnya jumlah tenaga kerja di bidang peternakan meningkat. Setiap tahun sejumlah sarjana peternakan dan dokter hewan dilahirkan dari puluhan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak mungkin menyalahkan hanya pihak tertentu saja melihat kondisi seperti itu. Birokrat sebagai regulator merasa telah berbuat banyak untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Perguruan Tinggi telah merasa pula menghasilkan sumberdaya manusia di sektor peternakan yang siap berkreasi dalam pembangunan peternakan. Pebisnis juga merasa memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui berbagai upaya. Jadi, fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan peternakan dalam segala aspeknya masih dilakukan secara parsial dan tidak menggunakan suatu pendekatan yang holistic-komprehensif.

Padahal, sebenarnya ada potensi kuat yang telah tersedia di Indonesia. Sumberdaya manusia yang tangguh, sumberdaya alam yang subur, ternak yang berkinerja unggul serta berbagai fasilitas pendukung peternakan untuk dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, keberadaan sektor peternakan saat ini hanya berperan pada wilayah produksi saja. Jika saja pergeseran orientasi pembangunan sektor peternakan diarahkan pada posisi yang lebih strategis, dengan sendirinya sektor ini akan menjadi perhatian semua pihak. Oleh karena itu, dalam pembangunan peternakan di Indonesia ke depan, perlu dibangun satu kesamaan visi sehingga dapat mengoptimalkan segala potensi yang ada di Indonesia secara menyeluruh dan saling bersinergi.

Isu strategis dan politis yang menarik untuk diangkat ke permukaan adalah bahwa "pangan asal ternak merupakan sumber protein pencerdas





bangsa yang membawa Indonesia menjadi negara maju". Kebiasaan masyarakat Indonesia yang lebih suka pangan karbohidrat daripada pangan protein perlu dibalik. Walaupun harga pangan protein memang relatif lebih mahal, tetapi kesadaran untuk mengkonsumsi pangan protein setiap hari perlu dibangun di segala lapisan masyarakat. Hal ini penting dilakukan apabila ingin membangun bangsa yang berisi masyarakat cerdas.

Isu penting lainnya yang tidak kalah strategis adalah bahwa sektor peternakan merupakan sumber lapangan pekerjaan di daerah pedesaan di seluruh Indonesia. Ternak adalah salah satu komoditas pertanian yang dapat dikelola di seluruh pelosok tanah air. Tergantung pada jenis ternaknya, hampir semua daerah dapat digunakan sebagai lahan pengembangan ternak dan produk produknya. Pengadaannya juga tidak memerlukan modal tinggi serta tidak membutuhkan keterampilan tinggi. Hal ini tentunya cocok dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan.

Karena komoditas ternak bersifat ekonomis, sektor peternakan juga dapat berfungsi sebagai sokoguru ekonomi rakyat. Ini merupakan aspek strategis ketiga dalam pembangunan peternakan di Indonesia. Jelas bahwa tiga nilai strategis peternakan tersebut merupakan landasan kokoh suatu



negara yang mayoritas warganya termasuk golongan menengah ke bawah.

Untuk mengimplementasikan ketiga nilai strategis tersebut sebagai pendorong utamanya, reorientasi pembangunan sektor peternakan perlu digalakkan sedini mungkin. Dengan demikian, dalam pemberianan sektor peternakan ke depan, sektor ini tidak lagi dilihat secara parsial melainkan didekati secara holistik yang mencakup segala hal mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, pemasaran, dan diversifikasi produknya. Dengan kata lain sektor peternakan mencakup semua hal mulai dari “**kandang sampai ke meja**”.

Dalam rangka reorientasi pembangunan sektor peternakan, langkah awal yang diperlukan adalah bagaimana membenahi konsepsi pembangunan sektor peternakan itu sendiri. Selama ini, *stigma* pembangunan sektor peternakan diarahkan hanya pada wilayah produksi saja. Ini dijadikan pusat perhatian dalam pembangunan sektor peternakan sedangkan peran sektor peternakan sebagai pangan sumber protein bagi pencerdasan bangsa, sumber pendapatan bagi masyarakat kecil, dan sokoguru ekonomi di republik ini terkesan kurang digelorakan. Padahal ketiga peran yang saling terkait satu sama lain ini yang seyogyanya menjadi fokus penting untuk menjadi perhatian bersama bagi para *stakeholder* peternakan di Indonesia khususnya penyelenggara republik ini. Jadi konsepsi sektor peternakan ke depan adalah bagaimana memperkuat landasan pembangunan peternakan melalui peran dan citra strategisnya sebagai pangan sumber protein bagi pencerdasan bangsa, sumber pendapatan bagi masyarakat kecil, dan sokoguru ekonomi rakyat (*three in one*).

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa peran sektor peternakan sebagai pangan sumber protein bagi pencerdasan bangsa dapat dilihat dari salah satu kasus yaitu malnutrisi energi-protein yang marak terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. Kasus ini—dari berbagai riset yang telah dilakukan—mempengaruhi sepertiga dari semua anak yang ada. Kejadian paling banyak telah dialami oleh ibu-ibu yang melahirkan dan menyusui. Para ahli berpendapat bahwa ketersediaan protein, kalori, dan mikronutrien seperti vitamin A, iodine, dan zat besi dalam jumlah



cukup dan seimbang dalam tubuh manusia memainkan peranan penting dalam pengembangan fisik dan mental. Lebih jauh diutarakan bahwa ketersediaan nutrisi yang cukup dan seimbang dapat membantu tubuh menjadi sehat dan penuh vitalitas.

Untuk memenuhi ketersediaan protein, kalori, dan mikronutrien untuk mencegah malnutrisi, posisi produk peternakan mempunyai peran yang sangat penting. Produk peternakan merupakan sumber penting dalam bentuk zat besi, zinc, vitamin B12, dan retinol yang terabsorbsi. Daging dan susu merupakan sumber pangan yang kaya akan kandungan thiamin, kalsium, vitamin B6, ribo flavin, vitamin A, dan mineral lain yang banyak dibutuhkan dalam jumlah banyak selama periode pertumbuhan manusia.

Sebenarnya kombinasi banyak nutrien yang berasal dari tanaman pangan juga mampu menyediakan asam amino untuk kebutuhan nutrisi. Namun demikian, hal itu tidak akan mudah dipenuhi masyarakat pedesaan yang relatif miskin. Sebaliknya dengan mengkonsumsi daging dan susu, walaupun dalam jumlah kecil, akan dapat memenuhi protein dan mikronutrien yang diperlukan bagi pertumbuhan anak. Dengan demikian, jika bangsa ini memperhatikan penyelamatan generasi penerus dari hantu malnutrisi, maka mendorong sektor peternakan merupakan suatu keharusan.

Sektor peternakan sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Pertama, ternak sebagai sumber penting untuk mendapatkan uang tunai. Kedua, ternak merupakan salah satu aset yang tersedia bagi masyarakat kecil khususnya perempuan di pedesaan. Ketiga, kotoran dan tenaga kerja ternak sangat penting bagi kesuburan tanah dan intensifikasi sistem pertanian berkelanjutan pada banyak wilayah yang terus berkembang dan padat penduduk. Keempat, ternak memberi peluang bagi masyarakat kecil untuk mengeksplorasi sumberdaya alam umum dengan memanfaatkan lahan penggembalaan terbuka. Kelima, produk peternakan memungkinkan petani-peternak memperoleh pendapatan lain setiap saat selain hasil pertanian utamanya. Keenam, ternak kadang-kadang merupakan satu-satunya



sumber pendapatan bagi petani miskin.

Adapun sektor peternakan sebagai sokoguru ekonomi bangsa dapat dicermati dengan peran peternakan yang dapat menggerakkan ekonomi di perdesaan melalui peternakan. Tidak dapat dipungkiri mayoritas penduduk Indonesia berada di desa. Artinya, untuk menyelamatkan Indonesia dari berbagai krisis dan meningkatkan taraf ekonomi, pembangunan harus diorientasikan dari, ke, dan untuk desa. Salah satu bukti empiris menunjukkan bahwa petani-peternak kecil yang berada di pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan sendiri (hak milik) memperoleh pendapatan utamanya bagi kebutuhan keluarga berasal dari ternak. Tidak hanya di Indonesia, di negara berkembang lainnya seperti Pakistan, fenomena yang sama dimana 25 % pendapatan petani-peternak miskin berasal dari ternak. Adapun 20 % orang kaya menerima pendapatannya dari sektor peternakan sebanyak 9 %.



Pada umumnya masyarakat kecil mempunyai sedikit kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya karena akses yang minim untuk mendapatkan tanah dan modal. Produksi ternak yang dipelihara di halaman belakang rumah memungkinkan masyarakat semacam itu mendapatkan penghasilan dari ternak yang diberi rumput lapangan dan dari penggembalaan umum dan limbah rumah tangga. Ternak juga menawarkan satu dari sedikit pasar yang sedang berkembang cepat dimana masyarakat kecil dapat bergabung walaupun mereka kekurangan/tidak memiliki



tanah, modal, dan pelatihan pemasaran yang cukup.

Adanya pola yang menunjukkan bahwa masyarakat kecil memperoleh pendapatan tinggi dari sektor peternakan menimbulkan suatu peluang bahwa pembangunan sektor peternakan sangat baik bila ditujukan ke masyarakat kecil. Dalam konteks ini, ada dua alasan utama. Pertama, masyarakat kecil dapat lebih mudah meningkatkan pendapatannya jika mereka mempunyai pijakan utama dalam sektor yang potensial ini. Kedua, intensifikasi yang sangat cepat pada produksi ternak muncul pada saat masyarakat kecil sedang membutuhkan uang untuk pengolahan tanahnya.

Secara umum, upaya untuk pencapaian *three in one* dalam pembangunan peternakan ke depan harus di dukung dengan mempertahankan kondisi sosial budaya masyarakat kita dan melakukan peran-peran politik peternakan. Untuk kondisi sosial budaya di daerah perkotaan, kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan asal ternak perlu ditumbuh-kembangkan seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Semen-tara di pedesaan, ternak telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan petani. Ternak unggas dan ruminansia khususnya ternak kecil (domba/kambing) dijumpai hampir di setiap desa. Ternak dipelihara petani sebagai usaha sampingan di luar usaha tani. Ternak juga berfungsi untuk memanfaatkan sisa hasil pertanian atau tanaman di atas tanah yang tidak diolah.

Untuk lebih mengefektifkan upaya menuju paradigma baru pembangunan peternakan berbasiskan *three in one* sebagaimana dijelaskan di atas, keterlibatan insan peternakan dalam kancah politik merupakan langkah strategis untuk menggelorakan makna dan pentingnya sektor peternakan sebagai landasan untuk memajukan bangsa Indonesia di masa depan. Ini dapat dilakukan melalui upaya untuk mensosialisasikan keunggulan dan peran penting sektor peternakan pada lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengusaha, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Agustus 2004



2. Visi Indonesia 2030, Peternakan?

Beberapa bulan lalu, Chairul Tanjung sebagai ketua Yayasan Indonesia Forum (YIF) mencanangkan visi Indonesia 2030 yang intinya menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari lima negara maju dengan pendapatan per kapita sekitar \$US 18.000,-. "Mimpi kali nih yee?" kata beberapa orang (tentunya yang kontra) terhadap visi tersebut. Ada juga sebagian lagi yang bilang bahwa itu hanya lamunan tak masuk akal. Yang jelas pro-kontra dalam menyikapi pernyataan YIF tersebut cukup ramai. Namun, ketua YIF menjawab enteng saja dalam suatu acara di Hotel Grand Hyatt Jakarta. "*Emang ini mimpi. Apakah tidak boleh orang bermimpi? Kalau the dream comes true, ya itu bagus. Kalau nggak terealisir, ya apa salahnya. Mimpi kok diributkan.*"

Dalam mimpi itu, YIF memproyeksikan sampai tahun 2015 Indonesia masih masuk dalam kelompok negara berpenghasilan menengah ke bawah, kemudian antara tahun 2015 sampai tahun 2023 masuk kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas, setelah tahun 2023 dan seterusnya masuk kelompok lima negara berpenghasilan tinggi, dengan urutan (1) China, (2) Amerika Serikat, (3) Uni Eropa, (4) India, dan (5) Indonesia, masing-masing dengan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 28,2; 26,1; 20,7; 17,0; dan 5,1 (dalam triliun US\$). Menurut YIF, itu dapat dicapai apabila pada periode 2006-2030 pertumbuhan riil mencapai rata-rata 8,5% per tahun, dengan inflasi rata-rata 3% per tahun, dan pertumbuhan jumlah penduduk rata-rata 1,12% per tahun.

Untuk mencapai itu, produktivitas di semua sektor harus naik. Sektor jasa diharapkan menjadi kontributor terbesar (47 %) untuk menjadikan Indonesia masuk kategori negara maju di tahun 2030 nanti, diikuti sektor industri (45,7 %), kemudian sektor pertanian (7,2 %). Untuk komoditas peternakan, ini merupakan tugas para pelaku usaha atau pebisnis berskala besar, menengah, maupun kecil yang tentunya harus dipermudah oleh pemerintah yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam menciptakan suasana kondusif bagi para pebisnis.

Dalam bisnis apa saja, ada tiga kelompok penerima pendapatan dari usahanya, yaitu pemilik (*owner*), motor perusahaan (*profesional*), dan



pekerja (*worker*). Karena salah satu indikator dalam penentuan kelompok negara maju tersebut adalah pendapatan per kapita, maka pendapatan ketiga kelompok itu harus meningkat dan jumlah orang per kelompok juga harus bertambah. Itu terjadi apabila efisiensi dan produktivitas usaha peternakan juga dapat meningkat. Selain itu, jumlah *owner* perusahaan besar dan skala perusahaannya harus pula meningkat. Artinya, yang kecil harus menjadi besar, yang besar harus menjadi raksasa. Dengan demikian, jumlah profesional dan jumlah pekerja di banyak perusahaan juga meningkat.

Saat ini, sebenarnya berapa pendapatan per kapita dari setiap kelompok penerima pendapatan tersebut? Ini perlu diketahui untuk membuat *baseline* dalam upaya membuat proyeksi di sektor peternakan dalam berkontribusi bagi pencapaian tujuan YIF untuk menjadikan Indonesia masuk dalam *the big five in the world* dalam visi Indonesia 2030 tersebut. Dari data *baseline* itu, nantinya kerja keras seperti apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha/pebisnis dan oleh pemerintah.

Kita tidak perlu bertanya bisa atau tidak mencapai mimpi itu, tetapi paling tidak kita memiliki tujuan yang jelas. Ada acuan yang disajikan secara



kuantitatif. Semua ada dasarnya. Soal berhasil atau tidaknya mencapai visi 2030 di sektor peternakan, ya tinggal tergantung manusianya saja.... mau bekerja keras atau hanya mau bersikap pesimis saja. Apapun hasilnya, mestinya kita semua harus bekerja keras dan pantang mengeluh.

Memang banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan komoditas ternak yang terdiri atas ayam, sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, dan lain-lainnya. Impor bahan baku pakan ternak nonruminansia (terutama ayam) masih tinggi, impor bakalan sapi potong dan dagingnya juga masih tinggi, jeroan saja juga diimpor, demikian juga susu yang masih tinggi tingkat impornya. Belum lagi kemampuan sumberdaya manusianya yang mayoritas berpendidikan dan berpendapatan rendah. Itu semua harus diubah menjadi hal yang sebaliknya dalam waktu 23 tahun, bila dimulai dari tahun 2007.

Semoga Direktur Jenderal Peternakan yang baru (pengganti Ir. Mathur Ryadi, MA yang baru saja dilantik menjadi staf ahli Menteri Pertanian RI bidang pemberdayaan masyarakat) dapat menjadi motivator hebat bagi para pelaku bisnis di sektor peternakan sehingga dalam 23 tahun ke depan nanti industri peternakan dapat berkembang pesat, seiring dengan kemajuan yang diharapkan di sektor industri lainnya dan di sektor jasa sebagaimana diproyeksikan YIF dalam visi Indonesia 2030!

Oktober 2007

3. Peternakan dan MDGs

Pada Sidang Umum PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) tahun 2000, 190 negara termasuk Indonesia menyepakati pencanangan *Millenium Development Goals* (MDGs). Di dalam MDGs, ada 8 tujuan yang ingin dicapai pada 2015 yaitu (1) pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; (2) mewujudkan pendidikan dasar secara universal; (3) mendorong kesetaraan jender; (4) mengurangi tingkat kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lain; (7) menjamin



kelestarian lingkungan; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Wajar apabila urusan kemiskinan dan kelaparan ditempatkan di nomor satu karena kemiskinan dan kelaparan harus menjadi musuh bersama komponen bangsa yang ingin maju. Bukan berarti bahwa kita semua harus memusuhi orang miskin tetapi kita harus berupaya keras agar tidak ada orang miskin dan tidak ada orang kelaparan. Jika tidak ada orang miskin, tidak perlu ada lagi tujuan butir (2), (4), dan (5). Faktanya di Indonesia jumlah orang miskin mencapai 11 persen dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 24,2 juta manusia. Masih banyak pula ditemukan orang kelaparan atau orang bergizi buruk di negara agraris yang subur ini.

Di masa transisi menuju demokrasi, memang tidak mudah bagi bangsa Indonesia menuntaskan masalah kemiskinan dan kelaparan tersebut. Apalagi ada beberapa kategori orang miskin di Indonesia ini. Kategori *pertama* (yang paling menyedihkan) adalah orang miskin mentalnya atau orang bermental miskin. Walaupun secara lahiriah kaya, punya banyak uang, punya banyak rumah dengan segala kemewahan isinya, orang



bermental miskin cenderung terus meminta atau bahkan memeras sana sini untuk menambah kekayaannya. Orang bermental miskin yang berprofesi sebagai pejabat publik dapat dipastikan menjadi koruptor. Berperan apapun di dalam masyarakat, orang di kelompok ini akan menjadi perrongrong kemajuan bangsa karena orang ini haus kekayaan dan akan cenderung memperkaya dirinya sendiri secara tidak profesional.

Kategori *kedua* adalah orang yang senang miskin karena kemalasannya. Secara lahiriah orang ini memang miskin, tidak punya rumah sendiri atau harta berharga, tidak ada perencanaan dalam menjalani kehidupan, dan semuanya digantungkan pada keadaan orang lain dan bukan pada dirinya sendiri. Aktivitas yang digemarinya hanya berperan menjadi orang miskin melalui cara malas seperti minta belas kasihan atau menipu sana sini untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin besar. Orang miskin kelompok ini tidak bisa diajak maju karena memang tidak ada motivasi untuk maju.

Kategori *ketiga* (bukan yang terakhir) adalah orang miskin yang ingin mengubah nasibnya menjadi tidak miskin lagi. Secara lahiriah memang miskin dan tidak memiliki barang atau fasilitas yang dibanggakan. Yang dimilikinya adalah tekad kuat mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, yaitu tekad untuk memberantas kemiskinan yang disandangnya hingga saat ini!

Jadi, pada dasarnya, yang memiliki tugas besar dalam menyukseskan butir satu MDGs di atas adalah orang miskin kategori ketiga ini, bukan yang lain. Pemerintah bertugas memberi fasilitas agar tekad kuat si miskin tadi dapat terwujud melalui berbagai cara seperti pendidikan ketrampilan atau pelatihan. Lembaga swasta bertugas bekerjasama dengan si miskin bermental maju ini dalam menjalankan bisnisnya secara profesional untuk menghasilkan keuntungan. Jika pemerintah maupun lembaga swasta ingin membantu, semua harus dilakukan dalam konteks mendidik menuju kemandirian.

Untuk mewujudkan tekad kuat si miskin memberantas kemiskinannya sendiri, peternakan merupakan salah satu usaha potensial yang dapat



digunakan untuk mencapai tujuan itu. Selama ini pemerintah juga telah mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk pengadaan ternak bagi masyarakat miskin. Selain untuk (1) memberikan peluang pekerjaan di pedesaan; (2) menyediakan pupuk organik bagi kesuburan tanah pertanian; (3) mengurangi laju urbanisasi; dan (4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengadaan ternak juga dimaksudkan untuk (5) berswasembada produk peternakan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan protein hewani asal ternak. Yang perlu ditekankan dan dipastikan adalah dana pengadaan ternak tersebut harus benar-benar sampai pada orang miskin kategori ketiga, bukan kategori kedua apalagi kategori pertama.

Pemikiran boleh saja ada di Sidang Umum PBB dan menghasilkan kesepakatan berupa MDGs, tetapi pelaksana sejati pemikiran tersebut (khususnya butir satu) adalah para orang miskin yang bertekad kuat memberantas kemiskinan pada dirinya.

November 2007

4. Mencerdaskan Bangsa ... Urgent!!

Ada kejadian tak biasa pada awal 2008. Serombongan pedagang tempe melakukan unjuk rasa di depan istana negara. Makanan bergizi nan murah meriah dan disukai banyak kalangan ini dipermasalahkan di seantero nusantara. Ini akibat harga kedelai (bahan baku utama tempe) naik hampir dua kali lipat. Pedagang tempe tersebut minta agar pemerintah berbuat sesuatu agar harga kedelai dapat diturunkan. Apabila tidak turun, mereka terancam gulung tikar. Kalau ketersediaan tempe saja sudah terancam keberlanjutannya, artinya bangsa ini sudah memasuki tahap rawan pangan.

Perasaan was-was juga dirasakan komunitas peternakan khususnya yang bergerak dalam usaha peternakan ayam pedaging. Dengan melonjaknya harga kedelai, sudah dipastikan harga bungkil kedelai sebagai salah satu komponen pakan juga naik. Akibatnya harga pakan akan naik lagi, padahal antara bulan Juli sampai Desember 2007 saja, pakan





mengalami kenaikan harga delapan kali lipat menjadi sekitar Rp. 4000,- per kg (Trobos edisi Januari 2008). Cepat atau lambat harga ayam dan daging ayam juga akan naik. Kondisi semacam ini jelas sangat tidak menguntungkan produsen ayam maupun konsumen daging ayam.

Di sisi lain, posisi dan prestasi bangsa Indonesia di percaturan internasional semakin tenggelam. Indonesia hanya menempati urutan ke empat (di bawah Vietnam) dalam pesta olah raga se-Asia Tenggara (SEA GAMES XXIV) di Thailand, Desember 2007 lalu. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) juga mengalami penurunan dari urutan ke 71 tahun 1975 menjadi urutan ke 107 tahun 2005. Banyak aktivitas lainnya di level internasional, namun prestasi Indonesia makin terpuruk dibandingkan prestasi pada dua-tiga puluh tahun lalu. Beberapa data penting tersebut mencerminkan kondisi bangsa Indonesia yang semakin menyedihkan sebagai akibat dari rendahnya kualitas sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu 35% tidak tamat SD, 34% tamat SD, dan 13% tamat SMP dari 220 juta penduduk Indonesia (Kompas 10 Desember 2007).

Ironisnya, 19 juta keluarga miskin di Indonesia membelanjakan Rp 23 triliun per tahun atau setara dengan Rp 100 ribu/bulan/keluarga untuk membeli rokok (Republika 19 Desember 2007). Padahal, siapapun tahu



dampak negatif rokok terhadap kesehatan manusia. Seandainya uang sebanyak itu dibelikan daging ayam yang dapat mencerdaskan manusia karena kandungan nutrisinya yang tinggi, maka konsumsi daging ayam akan menjadi sekitar 1,4 juta ton per tahun. Ini merupakan jumlah yang dapat meningkatkan peluang pengembangan peternakan ayam, memperluas kesempatan bekerja di bidang peternakan, dan yang terpenting akan meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat.

Melihat data di atas, pada dasarnya daya beli masyarakat miskin untuk membeli bahan pangan berprotein hewani memang ada dan cukup tinggi. Dengan kata lain, masih banyak masyarakat miskin yang kurang menyadari pentingnya pangan berprotein hewani bagi kesehatan dan kecerdasan anak. Jika bangsa Indonesia tak ingin semakin tenggelam, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap asupan pangan bergizi harus dilakukan secara terus menerus tanpa henti.

Hal tersebut jelas merupakan tugas pemerintah karena dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan “.....membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....”. Pemerintah harus serius dan memprioritaskan masalah kecerdasan bangsa ini dalam pembangunan manusia ke depan. Memang menjadikan manusia Indonesia berkualitas memerlukan waktu panjang. Walaupun upaya pencerdasan kehidupan bangsa Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi pihak swasta pasti akan melibatkan diri atau tentunya dapat dilibatkan. Apalagi kegiatan kampanye memerlukan dana besar sehingga sangat tidak mungkin dibebankan seluruhnya kepada negara mengingat adanya keterbatasan anggaran.

Sebenarnya keterlibatan pihak swasta dalam kampanye gizi sangat relevan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan asupan pangan berprotein hewani, konsumsi pangan tersebut juga akan meningkat sehingga secara langsung akan berdampak pada peningkatan populasi dan produksi ternak, yang akan menguntungkan perusahaan di bidang



peternakan. Dengan adanya "efek domino" yang saling menguntungkan ini, diharapkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945 dapat dilakukan melalui kampanye yang terprogram, terorganisir, dan berkelanjutan.

Februari 2008



B

Menuju Kemandirian Pangan (Swasembada Protein Hewani)



1. Populasi Ternak Berencana

Hingga saat ini, penyediaan daging (sapi potong) secara nasional masih belum dapat dipenuhi di dalam negeri. Ini terbukti dengan adanya impor sapi yang sudah menembus angka 400.000 ekor sapi per tahun. Belum lagi impor dagingnya. Oleh karena itu, komoditas ternak sapi potong yang secara umum dibudidayakan oleh peternak kecil (dengan skala kepemilikan 2-4 ekor/peternak) perlu ditangani secara serius. Dalam hal ini peran pemerintah harus dominan. Ini kalau kita mau menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui pemberdayaan potensi lahan maupun peternak sendiri.

Kesuksesan program “Keluarga Berencana (KB)” yang berhasil menekan angka kelahiran di Indonesia merupakan contoh menarik untuk dapat diaplikasikan dalam konteks ternak. Artinya, apabila program KB dirancang sedemikian rupa untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, kenapa kita tidak menerapkan program “Populasi Ternak (sapi) Berencana” yang dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah ternak sapi di Indonesia sehingga diperoleh angka populasi ideal yang mampu memenuhi kebutuhan daging dalam negeri? Tentunya program ini harus dirancang secara sistematis, terarah, dan terukur. Yang terpenting lagi, program ini harus tak berjangka waktu (berkelanjutan) serta bukan berorientasi pada proyek (apalagi dengan dana pinjaman luar negeri) tetapi murni pemberdayaan potensi dalam negeri.

Hal terpenting pada pelaksanaan program “Populasi Ternak Berencana” adalah komitmen total pemerintah dalam pengalokasian dana untuk itu. Dulu pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara setiap keluarga Indonesia maksimum beranak dua (laki-laki perempuan sama saja).

Untuk peningkatan populasi ternak, pemerintah juga harus menyediakan dana khusus dalam rangka memperoleh jumlah ternak sapi sebanyak-banyaknya (jantan atau betina sama saja). Pengalokasian dana harus pula diikuti dengan penerapan kebijakan yang berpihak pada kepentingan domestik. Sebagai contoh, investor yang mau menanamkan modal untuk



pembibitan sapi lokal diberi insentif atau dispensasi khusus dalam beberapa aktivitasnya. Peternak yang nyata secara konsisten melakukan perbibitan juga perlu dilindungi dari praktik-praktek dagang yang merugikan. Dan tentunya masih banyak hal lain yang perlu mendapat perhatian.

Dalam konteks pemberdayaan peternak, pendekatan kualitas dan profesionalisme harus lebih ditonjolkan daripada sekadar pendekatan pemerataan kesempatan berusaha. Khususnya dalam hal pembinaan, pemerintah juga harus selektif saat menentukan peternak yang dibina. Mungkin perlu dibuat kriteria tertentu sehingga tidak semua peternak (kecil) harus dibina. Sistem pembinaan pun harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan peternak dapat mandiri di suatu saat nanti (tidak selalu harus tergantung pada pemerintah).

Perlu diingatkan di sini, pemain utama dalam budidaya ternak sapi potong adalah kebanyakan peternak kecil yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Itulah target utama pemerintah dengan cara mendidik mereka menjadi pembibit ternak sapi yang profesional, membina mereka untuk memotivasi belajar menjadi pembibit ternak profesional, dan melindungi



mereka untuk menjamin kelangsungan usahanya. Itu semua perlu dilakukan secara terus menerus demi tercapainya populasi ternak sapi untuk penyediaan daging secara nasional. Jelas hal ini memerlukan kesabaran dan ketekunan, tetapi pasti akan ada hasilnya.

Pemerintahan baru Indonesia di bawah komando "SBY" seyogyanya tidak mengesampingkan masalah kronis tentang kurangnya penyediaan daging (sapi) nasional yang semakin hari semakin tinggi tingkat kekurangannya. Impor sapi sebanyak 400.000 ekor per tahun bukan angka kecil bagi Indonesia yang lahan dan alamnya sungguh subur bagi perkembangan sapi lokal. Sangat disayangkan apabila kita terus memberi lapangan pekerjaan kepada peternak luar negeri, sementara pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi.

Akhirnya, solusi terhadap kurangnya ketersediaan daging nasional terletak pada komitmen pemerintahan baru dan masyarakat peternakan. Program "Populasi Ternak Berencana" yang perlu disusun aksi nyatanya lebih merupakan *refreshing* pemikiran tentang perlunya dimulai program perbibitan yang bersifat membumi dengan ujung tombak peternak profesional di seluruh Indonesia khususnya di daerah-daerah kantung ternak sapi.

Desember 2004

2. Revitalisasi Menuju Kemandirian Pangan

Impor sapi hidup dan daging sapi dari Australia dengan jumlah total setara 800 ribu ekor per tahun memang tidak dapat dihindari untuk saat ini. Bila impor diberhentikan dan hanya mengandalkan sapi lokal saja, akibat fatalnya adalah habisnya populasi sapi di Indonesia. Dalam konteks ini, seorang teman dari Australia merasa bangga bahwa negaranya bisa membantu mengatasi masalah terkurarsnya sapi di Indonesia. Namun demikian, jika kita terus menggantungkan diri ke Australia atau negara lainnya, maka jangan menyesal apabila di kemudian hari nanti kita akan





dikendalikan negara lain untuk urusan pangan yang maha penting ini.

Dalam suatu pertemuan internasional yang diselenggarakan di Bangladesh pada awal bulan Februari 2006 ini, pakar dari India mengingatkan Indonesia dan Malaysia tentang penurunan jumlah populasi ternaknya (khususnya ruminansia). Populasi sapi Bali menurun di wilayah kantongnya seperti di Sulsel, NTB, dan Kalsel walaupun di pulau Bali, populasi sapi Bali masih lumayan stabil. *“Kalau urusan pangan, pemerintah India memiliki komitmen tinggi untuk dapat berswasembada. Tidak ternak saja tetapi komoditas bahan pangan lainnya juga. Pemerintah India telah dan terus mengalokasikan dana cukup besar untuk memotivasi rakyatnya agar mau dan terus bergerak di sektor penyedia pangan sumber protein ini”* jelasnya dengan penuh semangat. Dari data yang disajikan oleh pakar India tadi dalam pertemuan tersebut di atas, tampaknya itu bukan bualan belaka.

Pemerintah Indonesia harus menyadari pentingnya menyediakan komoditas ternak secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada negara lain. Sektor perbenihan dan perbibitan (khususnya pada ternak ruminansia) yang selama ini dikesampingkan mendapat prioritas tinggi dalam pengembangannya ke depan. Oleh karena itu diperlukan sistem perbibitan nasional (sisbitnas) ternak yang bersifat implementatif dan dapat dikerjakan oleh seluruh *stakeholder* sesuai kapasitasnya masing-masing. Bagaimana



sebenarnya wujud dan implementasi sisbitnas ternak nanti? Untuk saat ini belum ada gambaran yang jelas. Semua orang boleh mengekspresikan pendapat dan pandangannya soal ini.

Yang jelas, perlu ada prioritas. Di Indonesia, untuk komoditas ternak sapi pedaging, bangsa sapi Bali tentunya berada di urutan teratas. Ternak ini tidak termasuk spesies *Bos indicus* (bangsa sapi yang umum ditemukan di daerah tropis) atau *Bos taurus* (bangsa sapi di daerah *temperate*) tetapi spesies tersendiri yaitu *Bos javanicus* yang merupakan domestikasi dari banteng. Sifatnya unik dan unggul, juga menjadi ternak terfavorit bagi peternak kecil di berbagai wilayah di Indonesia. Domba garut mungkin prioritas untuk jenis ruminansia kecil. Untuk jenis ternak lainnya, penentuan prioritas bangsa ternak yang dikembangkan harus dilakukan dengan kriteria yang jelas, objektif, dan realistik.

Pemerintah juga harus menjadi fasilitator dan motivator yang baik untuk menggerakkan peran swasta dan masyarakat peternak dalam mengembangkan perbenihan dan perbibitan ternak di Indonesia. Ke depan dan dalam jangka panjang, peran swasta harus lebih diperbesar. Sebagai contoh, suatu saat nanti, Balai Inseminasi Buatan (BIB) mestinya bukan menjadi monopoli pemerintah lagi tetapi diharapkan dapat menjadi jenis usaha yang menguntungkan bagi para pebisnis. Ini hanya dapat terwujud apabila sektor perbenihan dan perbibitan ini telah berkembang dengan baik.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia peternak kecil dan kelembagaan di tingkat pedesaan yang ada harus juga menjadi prioritas. Kawasan ternak bibit dan pembibitnya yang menyatu dengan sosial budayanya perlu dikuatkan eksistensinya. Ini merupakan sumber ternak bibit yang sangat potensial. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dimiliki pemerintah harus mampu menghasilkan ternak bibit unggul yang menjadi acuan komunitas luas. Untuk mencapainya secara konsisten, reformasi UPT milik pemerintah di segala aspeknya melalui pendekatan profesionalisme mutlak dilakukan.

Jadi, revitalisasi peran masing-masing *stakeholder* di perbenihan dan



perbibitan melalui pendekatan profesionalisme yang bermuara ke produktivitas dan efisiensi mutlak dilakukan dalam rangka menghasilkan produk pangan asal ternak secara mandiri dan berkelanjutan. Sisbitnas lebih merupakan arah dan panduan bagi *stakeholder* untuk dapat mewujudkan kemandirian bangsa dalam penyediaan bahan pangan asal hewan melalui program perbenihan dan perbibitan secara terpadu dan terarah.

Maret 2006

3. Ekspor Ternak Pemicu Pembangunan Peternakan!

Mengingat minimnya pengaturan benih dan bibit ternak dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka di dalam RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan (RUU PKH) yang akan segera bergulir ke Pembahasan Antar Departemen (PAD), pengaturan benih, bibit, dan bakalan dituangkan dalam satu bagian yang terdiri atas tujuh pasal.

Menurut RUU tersebut, impor ternak dari luar negeri maupun ekspor ternak ke luar negeri diijinkan sepanjang telah memenuhi persyaratan. Import ternak dibolehkan, antara lain, apabila ada kekurangan ternak untuk kepentingan konsumsi masyarakat; tidak membahayakan manusia, ternak, dan lingkungan; serta dalam rangka meningkatkan mutu genetik dan produksi. Demikian juga sebaliknya. Ekspor ternak diijinkan apabila kebutuhan ternak di dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin.

Yang terjadi selama ini adalah **impor ternak diijinkan** karena memang kita kekurangan ternak dan **ekspor ternak dilarang** karena jumlah populasi rendah. Sampai kapan kondisi ini akan berakhir? Dapatkah situasi ini dibalik?, yaitu import ternak dilarang sedangkan ekspor ternak diijinkan.

Kalau peternakan di Indonesia ingin maju, upaya untuk menghentikan importasi ternak dan melakukan eksportasi ternak harus diwujudkan. Kita tidak perlu takut secara berlebihan bahwa plasma nutfah asli (misalnya



sapi Bali) akan terkuras. Negeri Belanda yang sapi FH (Friesian Holstein)nya dieksport hampir ke seluruh negara di dunia, populasi sapinya tidak terkuras. Malah ternaknya semakin baik mutu genetiknya dan usaha peternakannya juga semakin efisien. Benar adanya kata bijak bahwa semakin banyak kita memberi, semakin lebih banyak kita akan menerima. Dalam konteks ternak, semakin banyak ternak dieksport semakin banyak ternak dengan mutu genetik lebih baik akan terlahir.

Namun demikian, untuk dapat melakukan eksportasi ternak, sangat tidak mungkin dilakukan saat ini. Pasalnya, populasi ternak yang ada khususnya ternak ruminan masih jauh dari memadai untuk dieksport. Diperlukan perencanaan perbibitan yang sangat matang, implementasinya berjangka panjang dan berkelanjutan. Setidaknya program 20-25 tahun ke depan dengan dukungan penuh pemerintah dan partisipasi investor swasta mutlak diperlukan bila Indonesia ingin menjadi eksportir ternak. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan populasi ternak secara besar-besaran.



Bila populasi ternak telah melampaui jumlah yang dibutuhkan konsumen domestik, para pemulia (*animal breeder*) dijamin tahu bagaimana menentukan populasi ternak yang dapat dieksport dan yang harus tetap dipertahankan di Indonesia.

Dengan kata lain, kemampuan Indonesia menjadi eksportir ternak seyogyanya menjadi tujuan utama pembangunan peternakan secara nasional. Banyak pihak akan diuntungkan dengan terwujudnya Indonesia sebagai eksportir ternak, diantaranya adalah jumlah populasi ternak akan selalu tetap tinggi (bila jumlahnya rendah, tentu tidak dapat ekspor); pendapatan petani peternak akan meningkat karena harga jual di luar negeri tentunya lebih baik; peternak berusaha menghasilkan ternak bermutu genetik tinggi untuk memperoleh harga jual yang baik; semakin banyak tanah akan menjadi subur karena banyak feses (untuk pupuk) dihasilkan dari banyaknya populasi ternak; pemerintah memperoleh tambahan devisa dari ekspor; status Indonesia bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) memiliki makna ekonomis yang lebih signifikan.

Jadi, semangat untuk menjadi bangsa eksportir ternak perlu dipompa ke seluruh peternak di Indonesia. Secara konsisten pemerintah Indonesia juga harus secara terus menerus memfasilitasi, membina, dan menciptakan suasana kondusif dalam usaha pengembangan perbenihan dan perbibitan ternak. Walaupun ekspor mungkin baru dapat diimplementasikan 20-25 tahun yang akan datang, semangat tersebut harus dimiliki saat ini juga dalam rangka memotivasi peternak dalam berusaha di bidang peternakan. Kalau tujuan pembangunan peternakan hanya sekedar untuk mencapai "kecukupan" produk peternakan bagi kebutuhan masyarakat Indonesia, terasa kurang ada kerja keras yang dapat ditunjukkan oleh komunitas peternakan Indonesia.

Akankah seperempat abad lagi Indonesia benar-benar menjadi eksportir ternak? Semoga demikian.

April 2006



4. Suaka Politik 42 Warga Papua dan Peternakan

Pelecehan Australia terhadap kedaulatan Indonesia melalui pemberian visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua telah menimbulkan kemarahan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah saja yang marah, masyarakat melalui berbagai organisasi masa juga merasa tersinggung terhadap sikap politik negara Kanguru itu. Kalangan legislatif juga menunjukkan kejengkelannya. Kekecewaan pemerintahan SBY-JK ditunjukkan dengan pemanggilan duta besarnya dari Canberra.

Walaupun ada sebagian masyarakat menghendaki terjadinya pemutusan hubungan diplomatik antara Jakarta dan Canberra, banyak pertimbangan yang tampaknya harus diambil oleh pemerintah sehingga hubungan Jakarta-Canberra harus tetap dipertahankan. Tampaknya sudah tercipta "saling ketergantungan" antara Indonesia dan Australia. Memang di jaman global ini setiap negara tidak mungkin untuk tidak saling tergantung. Yang terpenting jangan sampai satu negara tergantung negara lain secara mutlak.

Mestinya untuk beberapa hal yang kita mampu, kemandirian bangsa Indonesia harus diwujudkan. Penyediaan komoditas ternak sapi dan dagingnya merupakan salah satu contoh ketergantungan Indonesia terhadap Australia. Mengapa kita harus bergantung kepada negara lain untuk urusan pangan yang teramat penting ini? Beberapa orang Australia sendiri menunjukkan sikap keheranannya terhadap Indonesia yang sumberdaya alamnya luar biasa besar tetapi tidak dapat mandiri dalam penyediaan bahan pangan sumber protein ini.

Di sektor peternakan, "kekisruhan politik" antar dua negara ini perlu dijadikan momentum untuk mulai berusaha keras melepas salah satu ketergantungan Indonesia terhadap Australia. Apalagi komoditas ini salah satu bahan pangan, yang merupakan komoditas vital bagi kelangsungan hidup manusia Indonesia! Memang tidak mudah untuk memulai mandiri. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Pemerintah harus serius mengupayakan terwujudnya kemandirian pangan sumber protein hewani ini, bila tetap berorientasi ingin mencerdaskan bangsanya secara berkelanjutan.



Kemandirian pangan tersebut bukan misi bagi satu periode pemerintahan saja (misalnya pemerintahan SBY-JK) melainkan misi yang tidak akan ada titik akhirnya sampai dunia ini kiamat! Artinya, siapapun yang berkuasa, mempertahankan kemandirian pangan bagi bangsa dan rakyat merupakan suatu yang mutlak.

Dua komponen penting yang secara mutlak harus disiapkan mulai dari sekarang adalah perbibitan dan kesehatan hewan. Kuantitas dan kualitas populasi ternak (untuk semua komoditas) harus ditingkatkan melalui sistem perbibitan nasional yang dapat diterapkan secara riil oleh siapapun yang bergerak di bidang ini. Prasyarat untuk keberhasilan sistem perbibitan di Indonesia sudah dimiliki, diantaranya Indonesia memiliki ternak sapi dan domba yang tingkat reproduksinya tinggi (sangat prolifik), demikian juga dengan unggas. Selain itu, memiliki keragaman alam yang tinggi untuk pilihan lokasi kehidupan ternak yang paling sesuai, memiliki belasan ribu pulau yang dapat digunakan sebagai lokasi untuk mengembangkan ternak, memiliki tanah subur bagi pertumbuhan tanaman pakan ternak, memiliki sumberdaya manusia dalam jumlah besar yang mampu berkiprah di sektor peternakan, dan lain lain. Terus, kurang apa lagi?!

Tingginya populasi ternak akan hancur bila tidak didukung pola pengendalian dan pencegahan penyakit yang baik melalui sistem kesehatan hewan nasional. Begitu luasnya wilayah dan banyaknya ragam hewan yang ditangani serta kaitannya dengan kesehatan masyarakat veteriner maupun lingkungannya, perlu dicari terobosan jitu sehingga kondisi peternakan ke depan akan selalu membaik dan terus membaik. Karena itu wacana Badan Otoritas Veteriner (BOV) belakangan ini, merupakan pemikiran yang realistik dan strategis dalam konteks penanganan penyakit hewan secara menyeluruh.

Yang lebih penting lagi, penerapan sistem perbibitan dan sistem kesehatan hewan nasional tidak akan efektif bila secara kelembagaan komoditas peternakan hanya dianggap bagian kecil dari pertanian dalam arti luas. Mungkinkah adanya Departemen Peternakan atau Kementerian Negara atau suatu Badan khusus yang diberi mandat mengembangkan



dan mewujudkan kemandirian penyediaan bahan pangan asal hewan mampu mengefektifkan implementasi kedua sistem nasional tersebut? Ini menjadi tantangan besar buat komunitas di bidang peternakan.

Mei 2006

5. Awas Daging dari India

INDIA tidak termasuk dalam daftar 57 negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menurut *Office International der Epizootics* (OIE) versi 20 Maret 2003. Artinya, hewan atau produknya yang berasal dari India berpeluang tinggi mengandung virus PMK yang biasanya menyerang sapi, domba, kambing dan babi. Penyakit yang cepat menular ini akan menyebar dengan sangat cepat melalui kontak langsung maupun tak langsung; dan penyakit ini menimbulkan kematian tinggi pada hewan muda walaupun tidak terlalu fatal bagi hewan dewasa. Yang jelas, pemberantasan virus PMK ini sulit, memakan waktu lama, dan memerlukan biaya besar. Peternakpun mengalami kerugian besar.

Indonesia pertama kali terserang virus PMK tahun 1887 yang bermula di daerah Kediri dan. sudah dinyatakan bebas PMK oleh OIE sejak sekitar tahun 1990. Jadi, ada rentang waktu sekitar 103 tahun untuk memusnahkan virus PMK dari bumi Indonesia. Suatu perjuangan panjang yang tentu saja sangat melelahkan.

* * *

Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia dan perubahan perilaku manusia di era global ini rupanya berdampak pula terhadap pola konsumsi masyarakat Indonesia khususnya di kota-kota besar. Kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani dan meningkatnya kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat perkotaan telah mendongkrak kebutuhan produk peternakan secara signifikan. Ini tercermin dari permintaan berbagai produk peternakan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Tidak seperti pada industri ternak unggas dan babi yang produknya telah dieksport ke luar





daging beku dari negara lain merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebijakan import yang dikeluarkan pemerintah tampaknya tidak dapat dihindari karena fakta di lapangan menunjukkan adanya kekurangan memenuhi kebutuhan konsumen. Ini berarti membuka peluang masuknya virus PMK ke Indonesia melalui sapi atau daging yang diimport dari negara lain. Tidak mengherankan apabila pemerintah perlu menetapkan negara negara yang boleh mengeksport ternaknya ke Indonesia; dan salah satunya adalah Australia yang memang termasuk negara bebas PMK.

Menengok sejarah pemberantasan PMK di Indonesia yang sangat melelahkan dan memakan waktu lama, Indonesia menerapkan kebijakan pengamanan maksimum bagi beredarnya ternak dan/atau produknya di Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan merasa perlu menginformasikan kebijakan ini ke masyarakat internasional melalui berbagai forum. Di dalam negeripun, pemerintah bersikap keras. Kambing yang dicurigai membawa penyakit menular dari negara lain terpaksa harus dibunuh walaupun pemiliknya pejabat tinggi negara. Ribuan ekor domba asal Australia yang akan disumbangkan ke Indonesia ditolak mentah-mentah karena domba tersebut membawa penyakit. Ketegasan yang dilakukan pemerintah semacam ini perlu dipertahankan dalam upaya mencegah masuknya penyakit menular yang akan merugikan semua pihak di Indonesia, termasuk PMK!.



Di banyak negara maju yang salah satu pilar perekonomiannya dari bidang peternakan, seperti : Australia, New Zealand, Amerika, Belanda, Inggris, dan lain sebagainya, juga menerapkan hal yang sama karena PMK dikenal sangat mudah menular dan termasuk zoonosis (penyakit pada hewan yang bisa menular ke manusia). Sebagai contoh, di New Zealand yang diketahui belum pernah terjangkit PMK. Hanya karena "isu" tentang adanya penyebaran PMK, kerugian yang dialami dari industri peternakan mencapai sekitar tujuh miliar dolar atau sekitar 10 % dari GDP nasionalnya. Oleh karena itu, pemerintah New Zealand melakukan segala upaya dengan biaya besar sekalipun untuk pencegahan PMK.

* * *

PMK sengaja dimunculkan kembali di tengah suasana kelelahan menangani flu burung. Virus penyebab *avian influenza* atau flu burung telah meluluhlantakkan industri peternakan unggas dan membangkrutkan usaha budidaya ternak unggas. Para praktisi berharap agar pengambil kebijakan bidang peternakan di Indonesia lebih cekatan lagi dalam menghadapi penyakit menular yang muncul secara tiba-tiba. Dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa makan daging ayam sudah aman, saat ini banyak pejabat yang harus berdemonstrasi makan daging ayam di berbagai kesempatan. Tak kurang Presiden RI juga ikut berkampanye untuk meyakinkan masyarakat. Ini semua dilakukan agar peternak unggas kembali bangkit dari keterpurukannya. Virus flu burung telah memberi pelajaran sangat berharga bagi bangsa Indonesia untuk tidak mengulangi lagi kejadian yang sangat menyedihkan dan memilukan peternak unggas.

Di tengah suasana rasa aman mengkonsumsi daging ayam, perlu diwaspadai adanya daging sapi murah yang konon beredar di pasaran dan ditengarai berasal dari India. Ada diantara masyarakat kita yang memanfaatkan harga daging murah tanpa peduli terhadap resiko yang akan ditimbulkan karena mengejar keuntungan finansial sesaat. Murahnya harga daging sapi akan menekan biaya produksi bagi penjual bakso sebagai salah satu makanan utama orang Indonesia. Murahnya harga daging sapi juga meningkatkan keuntungan bagi pemilik restoran yang menyajikan



produk peternakan tersebut. Namun demikian, virus PMK yang mudah menular melalui berbagai cara tersebut siap menambah daftar bencana nasional di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini. Hati-hati dengan produk peternakan yang berasal dari negara yang belum dinyatakan bebas PMK, termasuk INDIA!

Juni 2006

6. MBM Just Do It !

Ada apa dengan bangsa ini sebenarnya? Bencana alam atau bencana manusia datang silih berganti. Belum tuntas masalah semburan lumpur panas di Sidoarjo, masalah penanganan korban gempa di Jateng dan Yogyakarta, dan masalah serangkaian gerbang Kereta Api Gaya Baru keluar rel, muncul lagi kerusuhan di Atambua pascaeksekusi tiga terpidana mati peristiwa Poso. Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi di bidang peternakan. Kayaknya bangsa ini habis energinya hanya untuk menangani berbagai kejadian yang berulang-ulang dari itu ke itu lagi.

Berdasarkan dokumen resmi dari lembaga internasional, sudah sangat jelas bahwa masuknya MBM dari USA ke Indonesia akan mengancam peternakan di Indonesia karena USA belum memenuhi syarat *Negligible BSE Risk*. Jika dipaksakan masuk, peluang mewabahnya penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) di Indonesia sangat besar dan tentu saja akan merugikan peternak secara umum. Demi kepentingan jangka panjang, banyak pihak menentang rencana pemerintah yang mengijinkan impor MBM dari USA tersebut.

Selain itu, saat ini juga masih ada tarik ulur tentang revisi SK No. 745/1992. Ini terkait dengan tekanan banyak negara yang ingin memasukkan produk ternaknya ke Indonesia. Memang berdasarkan SK tersebut, hanya Australia dan New Zealand yang dapat mengeksport ternak dan produknya ke Indonesia karena dua negara tersebut bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sekaligus BSE. Dengan merevisi SK tersebut, ternak dan produknya



dari negara yang belum bebas PMK boleh masuk asalkan dari zona yang bebas PMK (*free zone*) sehingga ada sekitar 68 negara calon pengekspor ternak dan produknya ke Indonesia (baca TROBOS edisi September 2006 halaman 21). Dengan demikian, dominasi Australia dan New Zealand akan hilang, dan harga akan dapat lebih bersaing.

Walaupun jelas ada ancaman terjangkitnya PMK di Indonesia bila pendekatan *free zone* diterapkan, kelompok pro *free zone* berpendapat bahwa sepanjang ada pengawasan super ketat maka munculnya PMK dapat dicegah. Sebaliknya, anti *free zone* mewanti-wanti bahwa perlu waktu 100 tahun lebih untuk membebaskan PMK dari wilayah Indonesia dengan biaya sangat mahal.

Bagaimanapun serunya tarik ulur itu berlangsung dan kebijakan apapun yang akan ditetapkan nanti, yang jelas Indonesia tetap sebagai bangsa pengimpor. Terus sampai kapan kita selalu bersitegang antar sesama anak bangsa untuk memberi kenikmatan bangsa lain? Mengapa kita tidak berjibaku habis-habisan untuk memecahkan bagaimana agar bangsa Indonesia tidak perlu impor lagi? Atau membuat strategi bagaimana caranya bangsa kita ini gantian menjadi pengekspor sapi atau ternak lainnya. Kalau status bebas PMK atau bebas penyakit strategis lainnya yang dimiliki bangsa Indonesia ini hanya memberikan keuntungan negara lain, apa yang dapat kita banggakan dengan status bebas tersebut? Mengherankan! Sungguh mengherankan!

Mestinya status bebas PMK yang sulit kita peroleh itu menjadi motivator bagi kita untuk mengembangkan ternak sapi dan ruminansia lainnya secara besar-besaran, sampai populasinya berlebih sehingga bisa diekspor ke luar negeri. Kalau ayam ras bisa berkembang pesat sejak dirintis tahun 1970an, apa bedanya dengan ternak non-ayam? Mengapa Indonesia yang subur ini hanya mampu memelihara sapi 15 juta ekor saja?

Sebenarnya semuanya sudah jelas. Jumlah ternak sapi yang harus tersedia untuk memenuhi bangsa Indonesia sudah diketahui, kebutuhan daging per tahun juga ketahuan banyaknya. Bahwa investasi di area perbibitan sapi ini sangat ribet dan perlu waktu lama perputaran uangnya



adalah fakta yang justru perlu didiskusikan antara pemerintah dan investor. Menjadi tugas pemerintah untuk membuat suasana kondusif bagi investor agar bersedia menanamkan modal di wilayah perbibitan ini. Pemerintah sebagai regulator tidak perlu menjadi *actor* (pemain) atau melakukan usaha pembibitan dengan tujuan komersial. Karena data empiris menunjukkan bahwa jika pemerintah berbisnis, kinerjanya tidak efisien dan akibatnya selalu merugi. Pemerintah cukup memfasilitasi melalui penyediaan infrastruktur yang baik, menjamin keamanan bagi pengusaha dalam melaksanakan aktivitas *on-farmnya*, kemudahan akses permodalan, atau memberi peluang terbukanya pasar di dalam dan luar negeri.

Kalau semua pihak dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah berorientasi pada kepentingan nasional, rasanya kita akan dapat benar-benar swasembada. Ternak dengan segala karakternya tersedia di Indonesia dan mudah tumbuh baik di Indonesia. Lihat saja, sapi Bali tumbuh baik di daerah/wilayah yang kondisi lingkungannya buruk, sapi Simmental atau Limousine tumbuh baik di daerah daerah dataran tinggi, atau sapi PO yang tumbuh baik di dataran rendah, dan lain lain. Kita punya ternak, kita juga punya berbagai macam lahan.

Jadi, tunggu apa lagi? *Just do it!*, daripada sesama kita saling berjibaku yang hasilnya sudah jelas, yaitu kita tetap sebagai bangsa pengimpor!!!.

Oktober 2006

7. PSD Versus PKD

Kalau komoditas unggas masih dalam suasana hiruk pikuk terkait dengan pengendalian virus flu burung, maka komoditas ternak sapi tampaknya juga masih berjibaku dengan upaya memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Untuk itu, pernah suatu ketika, diluncurkan Program Swasembada Daging (PSD) yang harus tercapai pada tahun 2005. Karena beberapa alasan, kemudian diganti Program Kecukupan Daging



(PKD) yang ditargetkan tercapai pada tahun 2010. Apakah selanjutnya akan muncul lagi semisal Program Kelimpahan Daging untuk dicapai pada tahun 2015? Tidak tahu lah. Yang pasti sampai saat ini sekitar 400 ribu ekor sapi masih diimpor dari luar negeri setiap tahunnya khususnya dari Australia.

PKD dan PSD memiliki makna yang jauh berbeda. Dengan PKD, tidak adanya instansi Direktorat Jenderal Peternakan di pemerintah pusat atau tidak adanya instansi Dinas Peternakan di seluruh provinsi dan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah serius, karena program ini adalah program kecukupan daging. Maksudnya apabila terjadi kekurangan daging maka tinggal impor dari luar negeri. Asal memenuhi syarat kesehatan dan syarat teknis lainnya, urusan selesai. Jadi kenapa harus repot? Itu semua gampang dilakukan dan tidak perlu ada kerja keras. Asalkan peternak di Australia masih mau dan rajin beternak sapi, seberapapun banyaknya daging yang dibutuhkan pasti akan tercukupi.

Itu sangat berbeda dengan "swasembada" yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti "*usaha mencukupi kebutuhan sendiri*". Artinya, dengan PSD, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat harus berusaha keras agar tidak tergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan daging. Tentu saja program ini merupakan program jangka panjang yang harus dilakukan secara terus menerus dan dirancang secara sistematis. Agar program ini berkesinambungan tanpa terpengaruh oleh pergantian pemerintahan, adanya payung hukum yang setidaknya dalam bentuk Peraturan Pemerintah tampaknya perlu dipertimbangkan.

Kita semua benar-benar terlena tentang sapi potong ini. Empat puluh sampai tiga puluh tahun yang lalu, Indonesia masih dapat mengekspor sapi ke beberapa negara sedangkan persediaan sapi dan daging di dalam negeri masih mencukupi. Ketika populasi sapi masih berkecukupan pada waktu itu, upaya mengembangkan bibit sapi seringkali diwacanakan tetapi tidak diterapkan secara sungguh-sungguh. Akibatnya, rasio jumlah sapi dan jumlah penduduk yang membutuhkan konsumsi daging sapi menjadi tidak seimbang. Akhirnya, keran impor sapi hidup dibuka karena kebu-



tuhan daging memang semakin tinggi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Dimulai Sekarang Juga

Program swasembada harus segera dimulai! Memang terlambat tetapi itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Melalui program swasembada yang berjangka panjang, kita dapat merencanakan secara matang seluruh tahapan yang harus dilakukan; menyusun strategi tentang siapa melakukan apa secara profesional dan proporsional. Dalam konteks ini, pemerintah sebaiknya hanya berfungsi sebagai fasilitator dan regulator saja, adapun pelaksana adalah para praktisi peternakan. Pada saat ini, di level industri, salah satu perusahaan peternakan sapi bibit di Banten telah membuktikan bahwa usaha pembibitan sapi sangat menguntungkan (baca Trobos edisi Desember 2006) sedangkan di level peternak berskala kecil, kelompok peternak di salah satu kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan juga sukses melakukan pembibitan sapi Bali. Dengan pembinaan secara terus menerus, kelompok peternak tersebut mampu meningkatkan populasi ternak sapinya dan kualitas performanya. Di wilayah lain pun, usaha pembibitan sapi di level industri maupun di level peternak kecil pasti dapat dilakukan. Hanya tinggal komitmen masing-masing pihak untuk mewujudkan kemandirian (swasembada) dalam memenuhi kebutuhan daging sapi bagi bangsa Indonesia. *Good luck!*

Februari 2007

8. Berdaulat Pangan = Kemandirian Benih/bibit

Memang ironis!! Negara yang didengang-dengungkan *gemah rimah loh jinawi* ini ternyata gagal memiliki kedaulatan pangan. Hampir semua bahan pangan kebutuhan dasar manusia termasuk ternak dan produknya diimpor dari luar negeri. Jika bibit ayam pedaging atau petelur tidak diimpor, maka Indonesia akan kekurangan pasokan daging dan telur. Kalau





sapi bakalan yang menghasilkan daging tidak diimpor, maka sapi lokal kita akan terkuras habis. Sampai kapan?????

Melihat fenomena itu, tidak mengherankan apabila semangat yang ditunjukkan oleh para anggota Komisi IV DPR RI adalah menghentikan impor ternak apapun dan larangan impor tersebut harus ditulis secara jelas dalam pasal-pasal Rancangan Undang- Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Maksudnya agar Indonesia dapat benar-benar mandiri dalam penyediaan bahan pangan asal ternak sehingga berdampak positif pada tersedianya banyak peluang pekerjaan bagi petani peternak, peningkatan kesejahteraan petani peternak, dan optimalisasi kekayaan sumberdaya lokalnya. Namun demikian, untuk saat ini faktanya menunjukkan bahwa tidak mungkin menutup pintu impor bagi ternak ayam dan ternak sapi dari luar negeri. Akhirnya secara realistik Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU-PKH) tetap membolehkan impor ternak dengan berbagai persyaratan tertentu.

Sudah sejak lama para ahli pemuliaan dan genetika berkesimpulan perlunya secara serius membangun dan mengembangkan perbenihan dan



perbibitan ternak dalam rangka menjamin keberlanjutan usaha peternakan di Indonesia. Pemerintah juga telah menyadari hal itu dengan mendirikan beberapa Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) yang tersebar di beberapa propinsi. Namun hasilnya belum maksimal jika tidak mau dikatakan gagal. Pihak swasta juga tidak berani ambil resiko untuk menginvestasikan dananya dalam usaha perbenihan dan perbibitan. Karena urusan penyediaan benih dan bibit ternak tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah, sudah saatnya dicarikan terobosan yang cerdas dan tersistem sehingga dapat memotivasi investor untuk menanamkan modalnya di bidang yang sangat vital ini.

Misalnya, ayam lokal Indonesia yang selama ini hanya dibudidayakan sebagai ayam potong perlu dipikirkan lebih serius lagi dan lebih terencana untuk dijadikan sebagai sumber material genetik yang sangat potensial untuk pembentukan galur-galur baru ayam yang dibutuhkan masyarakat luas, seperti halnya ayam ras pedaging atau ayam petelur yang berkembang saat ini. Ayam lokal diseleksi untuk sifat-sifat unggulnya dan dikawin-silangkan dengan ayam lokal lainnya yang juga diseleksi untuk sifat-sifat unggulnya. Melalui perencanaan pemuliaan yang baik dan terukur, peningkatan mutu genetik dapat dipantau dan dievaluasi dari generasi ke generasi sampai akhirnya terbentuk galur unggul yang dikehendaki. Memang program pemuliaan memerlukan waktu lama dan biaya sangat besar. Itu untuk ternak ayam, untuk ternak berukuran lebih besar dengan interval generasi lebih lama (misalnya sapi), waktu dan dana yang dibutuhkan akan lebih besar lagi. Namun demikian, tekad ke arah pengembangan benih dan bibit di Indonesia secara mandiri harus ada jika memang bangsa Indonesia tidak ingin terjebak dalam ketergantungan bahan pangan asal hewan yang dibutuhkan oleh lebih dari 250 juta manusia pada beberapa tahun mendatang.

Terkait dengan hal itu, upaya pemerintah saat ini dengan mengalokasikan dana cukup besar untuk pengembangan usaha pembibitan sapi di masyarakat petani dengan melibatkan lulusan sarjana baru (sarjana peternakan maupun sarjana kedokteran hewan/dokter hewan) sebagai



pendamping perlu diapresiasi. Dalam jangka pendek, upaya tersebut harus dilakukan secara konsisten mengingat mulai langkanya bakalan sapi lokal (seperti sapi Bali, sapi Madura, sapi Peranakan Ongole) di berbagai wilayah di Indonesia.

Pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah nusantara rasanya merupakan tempat ideal untuk digunakan sebagai usaha pembibitan sapi. Seperti di pulau Bulan yang dikhkususkan untuk usaha pembibitan dan penggemukan ternak babi, mestinya kita dapat juga memanfaatkan satu atau lebih pulau kecil untuk usaha pembibitan ternak sapi.

Yang tak kalah penting adalah penyediaan tenaga pemulia (*breeder*) ternak yang tidak hanya paham menangani usaha pembibitan ternak dalam skala perusahaan besar tetapi juga paham dalam menangani usaha pembibitan ternak dalam skala kecil yang tersebar di banyak individu petani peternak. Semoga Indonesia benar-benar berdaulat dalam penyediaan bahan pangan!!!

Oktober 2008

9. Swasembada Daging Jangan Dibuat Main-Main

Pada 17 Agustus 2009 nanti, Indonesia sebagai bangsa merdeka dan berdaulat telah berusia 64 tahun. Berbagai prestasi diukir dan berbagai kemajuan diraih, walaupun masih ditemukan kekurangan dan ketimpangan di banyak aspek kehidupan. Salah satu aspek yang semakin memprihatinkan adalah kedaulatan pangan, khususnya pangan sumber protein hewani pencerdas bangsa.

Pelan tetapi pasti, keberadaan sapi lokal semakin berkurang dan tergantikan oleh sapi impor atau hasil silangannya. Di wilayah Jabodetabek, sapi yang dipotong didominasi sapi impor daripada sapi lokal. Artinya, ketergantungan bahan pangan ini semakin tinggi. Parahnya lagi, komitmen atau keseriusan pemerintah dalam berswasembada daging sangat diragukan oleh banyak pihak. Bagaimana bisa dikatakan serius apabila swasem-



bada daging dikatakan akan tercapai tahun 2005, kemudian mundur lagi tahun 2010, dan terakhir mundur lagi 2014. Statemen pemerintah seperti ini mencerminkan tidak adanya perencanaan yang matang dan visioner.

Jika pemerintah serius ingin mencapai swasembada daging, maka perencanaan jangka panjang melalui program pemberian dan pembibitan yang sistematis mutlak diperlukan. Pemerintah tidak perlu harus menjadi pemain (karena hampir dapat dipastikan rugi!) tetapi harus menjadi fasilitator yang adil. Pemain utamanya harus diserahkan kepada peternak, baik berskala kecil, menengah, maupun besar; tentunya dengan pendekatan dan fasilitas yang berbeda.

Lahirnya Undang-Undang No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU-PKH) tanggal 12 Mei 2009 lalu merupakan momentum sangat baik bagi *stakeholder* peternakan untuk mulai secara serius membangun peternakan berdayasaing melalui perencanaan yang komprehensif. UU tersebut telah secara jelas mengamanahkan pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan *animal culture* (lebih diarahkan ke peternak berskala kecil dengan sentuhan kearifan lokal) dan *animal industry* (lebih diarahkan ke peternak berskala besar) di Indonesia.

Mengacu pada UU-PKH tersebut, sedikitnya ada empat kebutuhan dasar yang harus segera disediakan pemerintah dalam mendukung swa-



sembada daging. *Pertama*, kawasan usaha peternakan, yang menjamin investor dapat dengan tenang berusaha di bidang peternakan dalam jangka waktu tertentu atau bahkan tak terhingga. Hingga saat ini masih banyak terdengar adanya kekhawatiran para pengusaha peternakan akibat belum adanya perlindungan hukum terhadap wilayah usaha peternakannya.

Kedua, keamanan usaha beternak yang juga menjamin perlindungan peternak terhadap gangguan kriminal. Dalam UU-PKH ini, sudah ada sanksi administratif dan sanksi pidana bagi siapapun yang berbuat kriminal di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Oleh karena itu, yang perlu segera disiapkan adalah para penegak hukumnya yang memahami seluk beluk peternakan. Para penegak hukum ini dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang sebagai penyidik atau dapat juga dari institusi kepolisian yang diberi pemahaman tentang peternakan dan kesehatan hewan. Seperti diketahui, tindak kriminal di bidang peternakan dan kesehatan hewan semakin banyak dilakukan akhir-akhir ini tetapi landasan hukum yang digunakan masih lemah.

Ketiga, khususnya bagi peternak berskala kecil adalah penguatan kelembagaan kelompok peternak. Mayoritas (lebih dari 95%) peternak sapi merupakan peternak berskala kecil dengan kepemilikan 2-3 ekor per peternak. Ini merupakan potensi besar bila digarap secara terarah dan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus untuk melahirkan lebih banyak peternak berkualitas, yang dilengkapi dengan kemampuan manajerial dan organisasi kelompok, serta kemampuan mengakses teknologi, modal, dan pasar. *Village Breeding Centre* (VBC) yang sudah diwacanakan tiga puluh tahun lalu perlu segera direvitalisasi menjadi media penguatan kelompok peternak agar menjadi lebih tangguh, efisien, dan produktif. VBC yang ada saat ini lebih merupakan kumpulan ternak sapi betina yang mampu bereproduksi dan dikelola kelompok peternak, serta tidak dilandasi program pemuliaan yang tepat dan terarah.

Terakhir, tapi bukan paling akhir, adalah optimalisasi sumberdaya pakan yang tersebar di lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan. UU-PKH juga menegaskan perlunya budidaya ternak secara terintegrasi dengan



komoditas lainnya. Sangat disayangkan bila akhir-akhir ini masih sering terdengar adanya limbah pertanian yang disia-siakan atau bahkan dijual ke manca negara, padahal limbah tersebut bisa dimanfaatkan secara efisien bagi ternak lokal kita.

Semoga dengan semangat proklamasi dan dilandasi UU-PKH yang inspiratif, akomodatif, dan futuristik tersebut, bangsa ini dapat berswasembada daging yang berarti juga berdaulat pangan.

Agustus 2009

10. Catatan untuk Mencapai Swasembada Daging

Salah satu program 100 hari pemerintah baru SBY-Boediono, khususnya di bidang pertanian, adalah swasembada daging. Banyak seminar dan diskusi diselenggarakan. Berbagai upaya juga dilakukan oleh pemerintah atau swasta dalam upaya mensukseskannya. Yang dimaksud dengan swasembada daging, menurut versi pemerintah, adalah kesanggupan bangsa Indonesia mencukupi 90 % kebutuhan nasional daging sapi dari produk lokal. Artinya dalam membuat perencanaan dan strategi pencapaian swasembada daging, angka itu yang diacu.

Kenapa 90 %? Mungkin itu adalah angka realistik saat ini dan didasarkan pada beberapa pertimbangan ekonomis dan politis. Jika angka itu dicapai, artinya ada pengurangan impor sebanyak 20 - 25 % sebagai akibat dari keberhasilan Indonesia menambah populasi ternaknya sebesar 20 - 25 %. Posisi sampai hari ini, sapi-sapi lokal Indonesia baru mampu memenuhi 65 - 70 % dari total kebutuhan daging sapi per tahunnya.

Beberapa kriteria keberhasilan swasembada daging sapi yang sebaiknya diperhatikan oleh pemerintah diantaranya adalah (a) harus berdampak langsung pada peningkatan pendapatan peternak berskala kecil khususnya yang berada di banyak wilayah pedesaan; (b) sapi yang dikembangkan diutamakan sapi lokal; dan (c) mampu menjadikan komoditas ternak sapi sebagai lokomotif pembangunan pertanian di Indonesia karena



swasembada daging sapi bukan program Departemen Pertanian RI tetapi program nasional.

Berdasarkan tiga hal tersebut di atas, sedikitnya ada empat fokus kegiatan besar yang harus dilakukan untuk menyokong upaya pencapaian swasembada daging sapi. *Pertama*, reformasi perbibitan secara mendasar. Bagaimana bisa berswasembada daging jika sumber ternaknya (yaitu ternak bibit) tidak tersedia secara berkelanjutan? Reformasi perbibitan mencakup (a) penataan dan penguatan unit pelaksana teknis perbibitan seperti BPTU (Balai Pembibitan Ternak Unggul), Balai (Besar) Inseminasi Buatan, Balai Embrio Transfer, serta UPT Perbibitan milik daerah. Perlu sinergitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga diperoleh efisiensi dan produktivitas tinggi dalam menghasilkan dan menyebarluaskan ternak bibit; (b) segera petakan potensi sapi lokal Indonesia, baik lokal asli maupun lokal hasil introduksi dari luar yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Sampai saat ini, belum ada data jumlah populasi sapi per bangsa/rumpun secara lengkap.

Kedua, karena ini merupakan program nasional, maka dalam implementasinya, upaya pencapaian swasembada daging sapi harus melibatkan instansi di luar Direktorat Jenderal Peternakan dan instansi di luar Departemen Pertanian. Perlu ada penguatan koordinasi antar lembaga. Keterlibatan banyak pihak lintas direktorat jenderal dan lintas departemen harus dimulai dari perencanaan program maupun perencanaan anggarannya sampai pemantauan keberhasilannya secara bertahap dan berkelanjutan. Perangkat hukum yang melandasi bentuk kerjasama antar instansi seperti itu sudah ada yaitu Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007. Oleh karena itu, PP ini perlu dibedah untuk dipahami bersama dan diterapkan secara konsisten dalam melaksanakan program nasional ini secara terpadu.

Ketiga, perlu kerjasama yang baik antar tiga pihak yaitu pemerintah, perbankan, dan pelaku bisnis peternakan sapi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan dan permodalan. Salah satunya adalah pemberian berbagai insentif bagi pelaku bisnis agar mau menginvestasikan uangnya ke usaha peternakan. KUPS (Kredit Usaha Perbibitan Sapi) merupakan



pola pemberian insentif berupa subsidi bunga dari pemerintah kepada investor perbibitan sapi yang meminjam modal untuk pengembangan usaha pembibitan ternak sapi. Skema ini, dalam prakteknya, masih mengalami banyak kendala. Oleh karena itu, perlu disiapkan berbagai terobosan sehingga subsidi yang disediakan pemerintah dapat dioptimalkan penggunaannya.

Terakhir, tetapi bukan paling akhir, adalah pengorganisasian peternak. Peran peternak harus diperkuat agar juga memiliki *bargaining power* dalam bisnis sapi. Dengan demikian, hasil kerja mereka sebagai peternak sapi dapat memberikan keuntungan yang lebih memadai. Penguanan organisasi peternak perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari level terbawah (kelompok ternak) sampai ke level nasional.

Empat fokus kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan populer dan memerlukan anggaran yang cukup besar. Pengadaan anggaran mestinya juga bukan bersifat proyek tetapi dialokasikan secara rutin. Tentu saja itu semua bukan merupakan pekerjaan selama 100 hari atau pekerjaan semasa pemerintahan SBY-Boediono sampai 2014 saja, tetapi pekerjaan yang tidak ada titik akhirnya. Semoga swasembada daging sapi dapat dicapai. Amin.

Desember 2009

11. Sensus dan Implikasinya

Selama ini, dalam banyak diskusi tentang persapihan di Indonesia, data populasi sapi selalu dimasalahkan. Pemerintah sering disalahkan tentang hal ini karena fenomena yang ada di lapangan tidak mencerminkan data populasi keluaran pemerintah yang pada tahun 2009 jumlah sapinya 12.6 juta. Penyusunan program swasembada daging sapi yang menggunakan data tersebut memproyeksikan bahwa populasi sapi di Indonesia pada tahun 2014 harus mencapai 15.5 juta ekor untuk dapat memenuhi 90% kebutuhan daging nasional.

Ternyata hasil sensus ternak sapi secara nasional yang dilakukan oleh



Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa populasi sapi lokal di Indonesia pada tahun 2012 ini sudah mencapai 15 juta ekor lebih. Artinya Indonesia sudah swasembada daging sapi pada tahun 2012 ini. Apa implikasi dari hasil sensus tersebut?

Pertama, kita memiliki dasar yang jelas (khususnya populasi sapi saat ini) sebagai informasi penting dalam merancang strategi pengembangan komoditas sapi potong di Indonesia. Pemerintah harus konsekuen dan konsisten bahwa impor sapi bakalan dan daging baku hanya diberikan ijinnya untuk memenuhi kebutuhan segmen khusus seperti hotel, restauran, dan sejenisnya. Di luar segmen tersebut, kebutuhan daging sapi sudah dipenuhi dari sapi lokal di Indonesia secara cukup.

Kedua, strategi dan perencanaan pelaksanaan program swasembada daging sapi harus diubah secara signifikan. Yang pada awalnya ditekankan pada peningkatan populasi sapi lokal, perlu diubah fokusnya pada peningkatan kualitas sapi dan lebih khusus lagi kualitas peternaknya. Ketersediaan pakan dan penguasaan teknologi yang berbasis sumberdaya lokal harus diutamakan pula. Program pembibitan ternak lokal harus menjadi lokomatif penting dalam program swasembada daging sapi. Dalam hal ini pemerintah harus memberi contoh yang baik dan benar dalam mengembangkan usaha pembibitan sapi lokal sehingga dapat memotivasi peternak di Indonesia untuk mau mengembangkan usaha sapi lokal di wilayahnya masing-masing. Di sisi lain, pemerintah harus mendorong, memotivasi, dan memfasilitasi instansi swasta yang ingin berinvestasi dalam usaha pembibitan sapi di Indoneisa.

Ketiga, definisi swasembada daging sapi perlu direvisi dan dikaji ulang. Swasembada yang didefinisikan sampai hari ini adalah pemenuhan 90 % kebutuhan daging sapi berasal dari sapi lokal dan 10% sisanya dari impor sapi bakalan dan daging beku. Berdasar hasil sensus, proporsi impor sapi dan daging beku dapat dikurangi.

Keempat, pemotongan ternak ruminansia betina produktif yang dilarang oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu diperjelas definisi ternak ruminansia betina



produktifnya. Menurut saya, ternak ruminansia betina produktif yang benar-benar dilarang dipotong adalah ternak ruminansia betina produktif yang tingkat reproduktivitasnya tinggi. Ternak betina produktif di luar kriteria berreproduktivitas tinggi boleh dipotong. Mengapa demikian? Karena tampaknya sapi betina produktif yang dipotong selama ini adalah yang berkualitas jelek sehingga terpotongnya betina produktif tersebut tidak mempengaruhi perkembangan populasi sapi lokal di Indonesia. Ini dicerminkan dari hasil sensus yang mengindikasikan bahwa setiap tahun masih ada pertambahan populasi walaupun sekitar 200 ribu ekor betina produktif dipotong setiap tahun.

Kelima, dan ini bukan yang terakhir, pemerintah harus segera menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaan Undang Undang No. 18 Tahun 2009 sebagai landasan hukum dalam mengimplementasikan program swasembada daging sapi versi baru nanti. Beberapa rancangan peraturan yang perlu segera diterbitkan diantaranya adalah (i) Peraturan Pemerintah tentang Sumberdaya Genetik dan Perbibitan Ternak, (ii) Peraturan Presiden tentang Budidaya Hewan Peliharaan, (iii) Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Peternak; dan (iv) Peraturan Menteri Pertanian RI tentang Pewilayahan Sumber Bibit. Peraturan lain yang terkait dengan penanganan kesejahteraan hewan juga perlu untuk segera diterbitkan.

Semoga hasil sensus ternak sapi tersebut dapat memberi keyakinan dan rasa percaya diri yang tinggi kepada komunitas peternakan di Indonesia dalam ikut serta mengembangkan usaha ternak sapi lokal.

September 2011

12. Membangun Kerjasama Bisnis Persapian Indonesia-Australia

Akhir-akhir ini hangat dibicarakan tentang adanya rencana revisi Undang Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UUPKH) atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Akan-



kah pendekatan “*country based*” dalam pemasukan hewan dan produk hewan ke Indonesia diubah lagi menjadi “*zona based*”?

Pertanyaan bernada kekhawatiran tersebut sangat relevan karena Pemerintah ingin konsisten melaksanakan program swasembada daging 2014, dimana import daging dan bakalan sapi harus diturunkan sampai 10 % saja pada tahun tersebut. Dari hasil sensus sapi dan kerbau yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hal itu tampaknya dapat direalisir berdasarkan asumsi yang dibangun dalam penyusunan *Blue Print Swasembada Daging 2014*. Pemerintah Australia tampaknya juga mendukung kebijakan pemerintah Indonesia. Akibatnya ekspor daging dan sapi ke Indonesia harus disesuaikan dengan permintaan pemerintah Indonesia. Ini yang membuat beberapa pihak merasa tidak nyaman karena kuota impor dikurangi.

Dengan pendekatan “*country based*”, hanya empat negara (Australia, New Zealand, Canada, dan USA) yang dapat mengekspor hewan dan produknya ke Indonesia. Supaya dapat mengimpor hewan dan produknya dari selain empat negara itu, ada keinginan beberapa pihak agar pendekatan “*zona based*” diterapkan kembali. Pengadaan daging melalui impor memang lebih gampang, lebih cepat, lebih untung, dan lebih-lebih lainnya daripada harus memproduksi sendiri di dalam negeri melalui usaha peternakan sapi. Logika ini benar secara ekonomi tetapi membahayakan Indonesia yang telah memperoleh pengakuan internasional sebagai negara bebas PMK.

Tiga Opsi Agar tidak Menjadi Bangsa Importir

Kalau para elit politik di DPR dan para pengambil kebijakan di pemerintahan mengakomodasi kepentingan segelintir orang untuk merivisi UU No. 18 Tahun 2009 khususnya terkait impor hewan dan produknya dengan tujuan jangka pendek, kehancuran di bidang peternakan secara permanen tinggal menunggu waktu saja. Peternak berskala kecil akan gulung tikar, motivasi masyarakat untuk beternak menurun, para generasi muda meninggalkan usaha Peternakan, dalam jangka panjang Fakultas



Peternakan pun ditutup, dan kita sebagai bangsa akan sangat tergantung pada luar negeri karena peternakan sengaja digilas secara sistematis melalui legitimasi Undang Undang.

Jika memang revisi tersebut dikaitkan dengan keinginan memasukkan hewan dan produknya dari berbagai negara sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak, ini benar-benar pemikiran yang sangat berbahaya dan harus dihentikan. Para politisi di Senayan dan para pejabat eksekutif dalam pemerintahan SBY-Boediono harus bersatu untuk mencegah keinginan itu jika para elit tersebut masih memikirkan nasib dan kesejahteraan peternak berskala kecil yang jumlahnya jutaan di seluruh Indonesia.

Komitmen pemerintahan SBY-Boediono untuk swasembada daging 2014 seharusnya dijadikan momentum penting dalam membangun peternakan melalui penguatan usaha pengembang-biakan atau pembibitan ternak. Wujudkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan asal hewan secara mandiri dan berdaulat. Impor daging dan sapi harus tetap dipertahankan 10 % dari total kebutuhan daging nasional. Untuk dapat menyediakan 90 % daging sapi secara berkelanjutan,



tiga opsi yang mungkin dapat dilakukan adalah:

Pertama, mendatangkan sapi betina produktif ke Indonesia untuk menambah jumlah populasi sapi betina indukan yang sudah ada selama ini. Ini tidak harus dilakukan oleh pemerintah tetapi diharapkan dilakukan oleh pihak swasta. Pengelolaan sapi betina produktif juga dapat dikelola peternak terpilih dan terampil sehingga lembaga keuangan (bank atau non-bank) dapat memback-up pembiayaannya.

Kedua, pemerintah memberi kemudahan bagi investor Indonesia maupun investor Australia (atau investor asing lainnya) agar tertarik untuk menanamkan modalnya ke usaha pembibitan atau pengembang-biakan sapi di Indonesia.

Ketiga, pemerintah memperkuat usaha pengembang-biakan di level peternak berskala kecil melalui pendekatan kelompok. Pembinaan terhadap kemampuan manajerial dan organisasi kelompok, teknis beternak yang baik, dan pengendalian kesehatan, serta penerapan biosecuritas kepada kelompok terpilih dilakukan secara sistematis dan terprogram. Akreditasi dan sertifikasi terhadap kelompok peternak pengembang-biak harus mulai diterapkan. Dengan demikian, ke depan hanya kelompok bersertifikasi saja yang berhak memperoleh fasilitas dari pemerintah.

Eksportir Ternak, Mungkinkah?

Dengan tiga opsi tersebut, dalam jangka panjang, tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat kembali menjadi negara eksportir ternak dan produknya mengingat potensi sumberdaya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Perusahaan besar dapat menjamin ketersediaan bibit sapi di Indonesia untuk dikembang-biakan; peternak berskala kecil semakin profesional; produktifitas dan kualitas sapi yang dihasilkan juga akan meningkat. Status Indonesia sebagai salah satu negara bebas PMK yang diakui dunia memiliki nilai strategis tinggi secara ekonomis.

Namun demikian, jika revisi terhadap UU No.18 Tahun 2009 memang akan dilakukan untuk mengubah pendekatan "*country based*" menjadi "*zona based*" lagi, maka peluang Indonesia terkena wabah penyakit menular



seperti PMK menjadi sangat besar. Ini sangat membahayakan status Indonesia sebagai negara bebas PMK yang upaya pembebasannya memakan waktu hampir satu abad lamanya.

Untuk memajukan usaha pengembang-biakan dan usaha pembibitan sapi di Indonesia tampaknya perlu ada "diplomasi politik usaha sapi" antara pengusaha Australia dan Indonesia. Pemerintah kedua negara perlu mendorong terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan itu. Tidak semua pengusaha di Australia hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Demikian juga di Indonesia. Masih cukup banyak pengusaha di dua negara tersebut yang berkarakter idealist untuk secara bersama-sama membangun industri peternakan di era global yang tidak lagi mengenal batas-batas geografi ini.

Keberhasilan kerjasama bisnis tersebut akan memberikan efek domino positif bagi masyarakat, misalnya dapat meningkatkan peluang tersedianya lapangan pekerjaan, menambah tingkat kesejahteraan peternak, meningkatkan daya beli masyarakat, dan ujung-ujungnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Fakultas Peternakan juga semakin bergairah karena akan lebih termotivasi untuk mencetak tenaga profesional di bidang peternakan.

Rasanya tidak pantas jika pengusaha Indonesia dan Australia bersatu-padu untuk menghancurkan peternak berskala kecil di Indonesia. Kekompakan pengusaha Australia dan Indonesia harus dapat diformulasi-kan dalam rangka memberdayakan peternak berskala kecil yang tersebar di seluruh pelosok pedesaan.

Semoga revisi UU atas inisiatif DPR-RI tersebut bukan untuk kepentingan sesaat tetapi untuk dapat menyempurnakan lagi agar memberi suasana kondusif bagi perkembangan peternakan di Indonesia.

Februari 2012





C

Optimisme dan Kontra Produktif dalam Memajukan Peternakan



1. Tsunami dan Pilkada

Suatu perubahan (tentunya ke arah yang lebih baik) dapat dilakukan melalui skenario alam dan skenario manusia. Tragedi tsunami yang melanda Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Pulau Nias; dan upaya melakukan rekonstruksinya telah menyadarkan kita sebagai penghuni negara besar yang multibudaya, multibahasa, multisuku untuk lebih memaknai rasa kebersamaan menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menumbuhkan rasa kebersamaan, setiap insan dengan berbagai macam latar belakang dapat bekerjasama bahu membahu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, seberat apapun persoalan tersebut.

Di sektor peternakan, banyak persoalan yang semakin hari bukannya berkurang tetapi semakin menggunung, sebagaimana ditulis oleh Dirjen Bina Produksi Peternakan dalam bukunya "Peternakan Harus Jadi Unggulan". Semua persoalan tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan oleh seorang Dirjen. Dengan dukungan seluruh *stakeholder* termasuk di dalamnya peternak dan praktisi lainnya di bidang peternakan, Kepala Daerah (Kada) yaitu Bupati dan Walikota yang memiliki otoritas dan kewenangan tinggi dalam mengelola daerahnya seharusnya dapat dijadikan tumpuan harapan bagi berkembangnya sektor peternakan di masa mendatang.

Oleh karena itu, perubahan politik yang memungkinkan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada) harus dijadikan momentum penting untuk mewujudkan peternakan sebagai sektor penting dan strategis karena peran dan posisinya sebagai sumber bahan pangan protein hewani pencerdas manusia Indonesia. Dalam pelaksanaan pilkada nanti, ada suatu kondisi yang saling membutuhkan antara Cakada (calon kepala daerah) dan konstituennya (masyarakat pemilihnya). Cakada memerlukan dukungan suara pemilih untuk dapat terpilih, sedangkan masyarakat pemilih menginginkan Kepala Daerah yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan termasuk di sektor peternakan.

Dalam konteks pilkada, melalui asosiasi atau himpunan profesi yang bergerak di sektor peternakan, kita semua perlu bergerak dan berpartisipasi





aktif untuk berkontribusi memilih Cakada yang peduli terhadap perkembangan sektor peternakan. Para akademisi melalui Forum Dekan Fapet dan Forum Dekan FKH, para sarjana peternakan melalui ISPI, para dokter hewan melalui PDHI, para mahasiswa melalui jaringan ISMAPETI dan IMAKAHI, serta asosiasi peternak atau praktisi lainnya perlu berkonsolidasi merancang strategi yang tepat untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pilkada dan ikut pula berperan memilih pemimpin daerah yang peduli terhadap pembangunan sektor peternakan.

Saat ini proses pilkada sudah dimulai. Partai politik sebagai institusi yang paling penting dalam *perlombaan politik* tengah mengelus-ngelus jagonya dan mempersiapkan berbagai strategi untuk memenangkan perlombaan tersebut dan mendudukkan kadernya menjadi orang nomor satu di setiap daerah. Tidak jarang isu-isu tradisional yang sama sekali tidak profesional seperti isu SARA (suku, agama, ras/etnik) dan sejenisnya diangkat ke permukaan untuk mengarahkan masyarakat agar memilih jagonya. Di jaman yang sudah semakin maju dan syarat persaingan ke arah profesionalisme dalam berbagai bidang kehidupan, tentunya sudah tidak pantas lagi mengangkat isu-isu tradisional tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan upaya membangun rasa kebersamaan menuju tercapainya kehidupan yang nyaman dan damai di tengah kemajemukan bangsa. Walaupun sekedar isu, apabila terkait dengan SARA, hal itu akan menum-



bukan rasa permusuhan dan perpecahan di kalangan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tsunami sebagai suatu kejadian alam telah mengajarkan kepada kita tentang makna kebersamaan. Pilkada sebagai peristiwa buatan manusia diharapkan dapat menjadi arena *perlombaan politik* dalam payung kebersamaan sehingga pilkada bukan menjadi ajang permusuhan tetapi menjadi ajang pembelajaran kepada masyarakat tentang makna demokrasi sesungguhnya. Ini akan dapat terjadi apabila kita selalu berfikir profesional, rasional, dan proporsional!

April 2005

2. RPPK, Masihkah Peternakan Terpinggirkan?

Tanggal 11 Juni 2005 lalu tepatnya di Waduk Jatiluhur Purwakarta, Presiden SBY mencanangkan kebijakan Revitalisasi Pertanian Perikanan Kehutanan (RPPK). Ada beberapa hal menarik terkait dengan kebijakan tersebut, yaitu (1) kebijakan ini merupakan kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu. Untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan RPPK, Komite dibentuk berdasarkan Keppres dan dipimpin Menko Perekonomian; (2) kebijakan ini sebagai acuan untuk jangka waktu 20 tahun; (3) komoditas peternakan yang masuk prioritas dalam RPPK adalah sapi dengan penekanan pada aspek perbibitan secara berkelanjutan dan ayam dengan penekanan pada aspek sarana-prasarana dan pemasaran produknya.

Jelas hal tersebut merupakan langkah politik yang harus didukung karena kebijakan tersebut ingin menjadikan PPK sebagai kekuatan perekonomian nasional ke depan. Berdasarkan Keppres sebagai payung hukumnya, kebijakan tersebut akan diimplementasikan dengan berbagai konsekuensinya dalam rangka mencapai cita-cita pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan terutama di sektor pertanian, meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas, dan mengurangi tingkat kemiskinan.



Dengan komitmen yang ditunjukkan Presiden SBY dalam rangka RPPK, pemerintah harus mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan produktivitasnya di bidang peternakan. Seperti terungkap dalam Diskusi Seri Peternakan (kerjasama ISPI-TROBOS) tahun 2004 lalu, banyak pihak mengeluhkan lahirnya beberapa kebijakan pemerintah di bidang peternakan yang terkesan tumpang-tindih, bersifat ego sektoral, serta kontra produktif terhadap upaya pengembangan sektor peternakan, dan masih segudang *uneg-uneg* lainnya yang dilontarkan peserta diskusi. Seluruh hasil diskusi tersebut sudah dirangkum dalam buku yang diberi judul "*Peternakan Terpinggirkan*". Melalui kebijakan RPPK ini, semua keluhan itu seharusnya dapat direspon oleh Komite tersebut di atas dalam upaya pengembangan sektor peternakan ke arah yang lebih kondusif lagi.

Memang hingga saat ini masih terdengar komentar sayup-sayup sampai vulgar dari beberapa kalangan terhadap acara pencanangan RPPK tersebut. Ada yang apatis terhadap acara tersebut dan tidak jarang yang berkomentar bahwa itu hanya retorika pemerintahan SBY-JK saja. Konsep yang dihasilkan tak lama lagi juga akan masuk kotak. "*Lagu lama kemasan baru*" kata mereka yang kontra.

Harapan masyarakat tentunya adalah pencanangan RPPK oleh Presiden SBY tidak sekedar menjadi "tontonan menarik sesaat" dan bukan suatu kegiatan yang "bernuansa proyek" saja. Hadirnya beberapa Menteri dan pejabat tinggi lain setingkat Menteri yang mendampingi SBY jelas merupakan indikator keseriusan pemerintah dalam program RPPK. Namun itu saja belum cukup. Yang jauh lebih penting adalah langkah-langkah konkret pascapencanangan RPPK dengan indikator keberhasilan yang terukur dan *accountable*.

Sangat jelas pesan SBY dalam pencanangan RPPK tersebut. "*Pencaanagan RPPK ini bukan sekedar retorika dan bukan untuk main-main*" katanya. Kita semua berharap demikian karena jika ternyata pencanangan program RPPK hanya bersifat seremonial dengan nuansa proyek, sungguh sangat ironis penyelenggaraan program tersebut di tengah suasana makin banyak-



nya kejadian busung lapar, gizi buruk, polio, lumpuh layuh, dan kaki gajah di beberapa wilayah Indonesia, yang telah merenggut banyak nyawa.

Kemauan dan komitmen politik pemerintahan SBY-JK untuk melakukan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan momen-tum yang tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sering menyelimuti dunia peternakan untuk pengembangan sektor ini ke depan. Semoga niat baik para pengambil keputusan di jajaran dan lingkup Menko Perekonomian dalam memajukan sektor pertanian perikanan dan kehu-tanan di Indonesia selalu mendapat hidayah dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Juli 2005

3. Potensi Domba/kambing yang Terlupakan!

Ada persamaan dan perbedaan antara sapi lokal dan domba/kambing lokal terkait dengan populasinya di Indonesia. Menurut data statistik peter-nakan, jumlah populasi ketiga komoditas tersebut sama-sama relatif kon-stan dari tahun ke tahun. Namun perbedaannya, jumlah sapi lokal yang konstan tersebut karena adanya impor sapi dari Australia setiap tahun da-lam jumlah besar (sekitar 400 ribu sapi per tahun) sedangkan pada komo-ditas domba/kambing hanya ada impor dalam jumlah sangat kecil. Padahal jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat yang berarti kebutuhan daging pasti meningkat juga.

Fenomena di atas menunjukkan peningkatan kebutuhan daging sapi selama ini dipenuhi melalui impor sedangkan peningkatan kebutuhan da-ging domba/kambing dapat dipenuhi melalui peningkatan jumlah popu-lasinya oleh peternak. Tampaknya ada korelasi positif antara peningkatan jumlah penduduk dengan peningkatan jumlah populasi domba/kambing di Indonesia. Secara teknis masuk akal karena ternak ini memiliki karakteristik seperti tubuh kecil, tingkat reproduksi cukup tinggi, sangat adaptif terhadap berbagai lingkungan, dan murah. Karena pemeliharaan ternak



domba/kambing tidak menimbulkan bau berlebihan, komoditas tersebut banyak ditemukan di pemukiman padat penduduk. Peran komoditas domba/kambing sebagai tabungan hidup juga sangat tinggi karena seringkali dipelihara untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah, perkawinan anak, atau acara lain yang bersifat insidentil. Itu yang menyebabkan banyak masyarakat merasa mudah memelihara komoditas tersebut.

Di sisi lain, ada beberapa komunitas tertentu yang sangat profesional mengelola domba/kambing misalnya di Kabupaten Garut yang sangat pandai dan terampil memelihara dombanya sehingga menghasilkan domba unggul yang kuat, besar dan gagah. Demikian juga di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo sangat piawai menghasilkan kambing Peranakan Etawa (PE) yang panjang dan besar dengan produksi susu tinggi. Masih ada beberapa komunitas lain seperti itu. Jelas bahwa domba/kambing merupakan komoditas ternak yang sangat potensial sedangkan komunitas peternaknya merupakan sumberdaya manusia yang juga sangat potensial untuk mengembangkan komoditas tersebut ke depan.

Hal yang menjadikan domba/kambing lebih berpotensi lagi adalah kebutuhan ternak domba/kambing bagi masyarakat luar negeri khususnya yang beragama Islam. Ternak tersebut digunakan untuk hewan korban



pada Idul Adha atau acara keagamaan lainnya. Malaysia, Saudi Arabia dan negara-negara Timur Tengah lainnya merupakan pangsa pasar potensial untuk komoditas ini. Jadi, dari banyak aspek, peran, dan fungsi domba/kambing di Indonesia sebenarnya sangat luar biasa besar.

Namun demikian, yang sering terdengar di komunitas peternakan adalah hiruk pikuk tentang sapi impor dan ayam ras. Karena seringnya diperdebatkan oleh banyak kalangan, kebijakan Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK) juga hanya memasukkan komoditas sapi dan ayam saja untuk revitalisasi di sektor peternakan. Bagaimana dengan domba/kambing? Lewat!

Begitu pentingnya peran ternak yang tergolong jenis ruminansia kecil ini sebagai penyedia daging dan kebutuhan bahan industri lainnya, tiga lembaga internasional yaitu IAEA (*International Atomic Energy Agency*), FAO (*Food and Agriculture Organization*), dan ILRI (*International Livestock Research Institute*) mengintroduksi program terkoordinasi yang berorientasi pada upaya melestarikan dan mengelola sumberdaya genetik ruminansia kecil secara berkelanjutan di Asia dan di belahan dunia lainnya. Langkah kecil sudah dimulai di delapan negara Asia termasuk Indonesia untuk memetakan keberadaan bangsa dan posisi ternak domba/kambing dengan segala keunikannya. Gabungan ilmu genetika molekuler dan genetika klasik diaplikasikan dalam pemetaan ternak ini, selain *animalculture* (baca opini TROBOS edisi Januari 2005) sebagai basis berkembangnya komoditas ternak sebagai makhluk hidup yang berdampingan dengan manusia.

Dalam kerangka itu, bertepatan dengan Pekan Peternakan Unggulan Nasional (PPUN) di Pandaan Jawa Timur pada 19 - 23 September 2005 mendatang, perwakilan dari tiga organisasi internasional tersebut ditambah delegasi dari Bangladesh, Sri Langka, Pakistan, Vietnam, Arab Saudi, Iran, China, dan Indonesia akan berkumpul di Pandaan dan di Bogor membahas berbagai hal seputar potensi genetik ternak ruminansia kecil ini dalam tajuk "*Small Ruminant Research Coordinator Meeting*". Dalam konteks kebijakan RPPK yang belum lama digulirkan pemerintahan SBY-JK, pemerintah seyogyanya tidak melupakan ternak ruminansia kecil ini sebagai komoditas



peternakan yang sangat potensial menjadi andalan dan unggulan!

September 2005

4. Ekspor Sapi Bali ke Malaysia

Rasanya bangsa Indonesia perlu bersyukur dengan kekayaan alam yang ada di wilayah kedaulatannya termasuk sapi Bali (*Bos javanicus*) yang memang asli Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mensyukuri adanya plasma nutfah seperti sapi Bali yang memiliki banyak keunggulan? Beberapa keunggulan yang ada misalnya dapat hidup pada kondisi lingkungan buruk, rakus makan, ukuran tubuh ideal dalam pembentukan daging, tekstur dan rasa daging yang baik; walaupun ada juga kelemahannya seperti adanya penyakit jembrana.

Saat ini jumlah populasi sapi Bali di Indonesia secara pasti sulit diketahui tetapi sapi Bali termasuk bangsa sapi yang banyak dipelihara oleh peternak kecil di banyak pelosok Indonesia. Ada kemungkinan penurunan populasi sapi Bali karena dampak krisis moneter tahun 1997 lalu. Produktivitasnya juga menurun bila dilihat dari ukuran tubuh yang makin lama makin mengecil. Selain semakin sempitnya lahan sumber pakan, cara pemeliharaan yang masih sangat tradisional merupakan penyebab turunnya sapi Bali secara kuantitas maupun kualitasnya. Sapi Bali biasanya dipelihara oleh peternak kecil yang rata-rata tingkat kepemilikannya 2-3 ekor dan biasanya digunakan sebagai tabungan (*livestock*), bukan untuk industri penyediaan bahan pangan.

Tingkat kesejahteraan peternak berskala kecil lebih memprihatinkan lagi, tidak kunjung meningkat karena secara ekonomis sapi Bali tidak dapat bersaing dengan sapi impor. Seringkali di dalam negeri harga sapi lokal lebih mahal daripada harga sapi impor. Untuk meningkatkan pendapatan peternak, peluang Malaysia yang mau membeli sapi Bali dari Indonesia perlu dipertimbangkan sepanjang lebih menguntungkan daripada dijual di pasar domestik. Namun demikian, karena sapi Bali ini akan dikeluarkan dari In-



donesia, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga dalam jangka panjang tidak merugikan Indonesia sebagai habitat asli sapi Bali.

Sedikitnya ada tiga hal yang perlu disyaratkan yaitu (1) sapi Bali yang dijual ke Malaysia (atau negara lain) bukan sapi Bali yang terbaik mutu genetiknya. Sebagai konsekuensinya, perlu ada mekanisme penentuan rangking mutu genetik dalam suatu populasi. (2) jumlah minimum sapi Bali dalam suatu populasi harus ditentukan pemerintah dan harus dijamin ketersediaannya secara berkelanjutan. Dengan kata lain, sapi Bali tidak dapat dikeluarkan dari populasi tersebut apabila jumlahnya kurang dari jumlah minimum. Hal ini dimaksudkan untuk mengantipasi pengurusan sapi sehingga mengganggu keseimbangan populasi yang akibatnya akan semakin menurunkan mutu genetik sapi dalam populasi tersebut. (3) sebaiknya sapi yang dijual hanya berjenis kelamin betina saja. Apabila yang dijual sapi jantan, sapi harus dikastrasi dulu. Semen sapi Bali juga tidak dapat dijual ke Malaysia. Dengan demikian, sapi Bali betina yang ada di Malaysia hanya dapat dikawinkan dengan sapi jantan non-Bali sehingga Malaysia tidak akan pernah dapat mengembangkan populasi sapi Bali murni. Artinya, pengadaan sapi Bali akan selalu tergantung pada Indonesia.

Adanya kekhawatiran bahwa ekspor ternak sapi Bali ke luar negeri akan mengakibatkan terkurarsnya sapi Bali sebaiknya disikapi secara profesional yaitu dengan meningkatkan produktivitas sapi Bali. Kalau kita hanya khawatir saja dan kemudian hanya mempertahankan populasi sapi Bali yang ada, hasilnya justru malah kontra-produktif yaitu penghasilan peternak tetap rendah dan produktivitas sapi Bali juga tidak meningkat.

Keinginan pihak Malaysia membeli sapi Bali dari Indonesia merupakan peluang bagi kita sebagai salah satu upaya pengembangan sapi Bali di Indonesia sepanjang kita tetap memperhatikan kepentingan nasional. Keinginan tersebut seyogyanya tidak dilihat sebagai ancaman akan terjadinya depopulasi sapi Bali di Indonesia karena kita tahu bagaimana mencegahnya.

Okttober 2005



5. Glonggongan dan Tiren Menuntut Perhatian

Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan besar melalui jalan pintas tampaknya mendera sebagian pelaku bisnis daging sapi maupun daging ayam. Konon hal ini sudah berjalan beberapa tahun tetapi belum ada gerakan atau tindakan apapun untuk menghentikannya. *Pertama*, sapi *glonggongan!* Sapi dipaksa minum air sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan selang ke dalam mulutnya (*diglonggong*). Sapi tampak menderita, *megap-megap*, wajahnya tampak merana dengan tatapan mata menyedihkan, dan setelah sekarat, sapi dipotong (baca kesaksian Nana Diana yang ditulis pada Harian Kompas Jumat 20 Oktober 2006 halaman 7). Harapan si penyiksa sapi tersebut adalah daging yang dihasilkan nanti bertambah berat karena mengandung banyak air sehingga keuntungan dari tambahan berat daging tersebut akan diraih. Konsumen pun pasti dirugikan. Benar-benar keterlaluan!

Kedua, ayam mati kemarin (*ayam tiren!*)! Normalnya dan menurut aturan, daging ayam diperoleh dari ayam sehat yang dipotong dengan benar. Namun demikian, oleh beberapa oknum, ayam yang telah mati kemarin (mungkin karena sakit) dijual dan si pembeli pada hari ini menggunakan dagingnya untuk diolah menjadi makanan favorit masyarakat kita yaitu mie ayam atau jenis makanan lain. Artinya, ketika konsumen makan mie ayam tersebut, maka konsumen tersebut berarti telah makan bangkai ayam. Penjual mie ayam ini tentu saja meraih keuntungan lebih besar karena harga ayam *tiren* jauh lebih murah daripada harga ayam hidup. Tentunya ini lebih keterlaluan lagi, karena bagi umat beragama Islam (yang jumlahnya dominan di Indonesia) hukumnya haram memakan bangkai. Jadi konsumen dirugikan secara material dan spiritual. Belum lagi resiko penyakit akibat makan bangkai!

Akankah ini dibiarkan terus? Akan lebih keterlaluan lagi apabila pemerintah tidak berbuat apa-apa. Kalau kita tengok Undang-Undang No 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, tidak ada klausul spesifik yang mengatur perihal penyiksaan binatang atau perihal jual beli bangkai. Karena itu, Rancangan Undang-



Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang substansinya melengkapi dan menyempurnakan UU 6/1967 tersebut perlu segera dibahas di DPR dan disahkan menjadi UU. Adanya perangkat hukum itu nanti diharapkan memudahkan aparat pemerintah untuk dapat melindungi masyarakat dari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab.

Yang lebih penting lagi adalah mengubah pola pikir atau mental masyarakat kita yang cenderung lebih suka memakai jalan pintas tanpa berpikir cerdas. Ketika di belahan dunia lain, orang berpikir keras untuk meningkatkan daya saing melalui berbagai cara yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan produktivitas, di sini di Indonesia masih sering terdengar berbagai tindakan kontraproduktif dan berlawanan dengan prinsip-prinsip profesionalisme sebagaimana kedua kasus di atas. Dan tidak hanya dua kasus itu saja. Pencampuran daging tikus di dalam pembuatan bakso pun terjadi. Selain itu, memasukkan air ke dalam daging ayam melalui suntikan agar diperoleh tambahan berat juga dilakukan. Sungguh mengenaskan dan memprihatinkan sekali masyarakat kita!

Terkait ayam *tiren*, pemerintah perlu segera berbuat sesuatu untuk melindungi masyarakat konsumen dari tindakan oknum tertentu yang tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan tetapi juga melanggar perintah Tuhan YME untuk tidak makan bangkai! Selama ini masyarakat kita (khususnya yang beragama Islam) fokusnya hanya daging babi saja apabila berbicara soal makanan haram. Padahal bangkai juga salah satu yang diharamkan dan ini sulit melacaknya apabila sudah jadi makanan. Kalau daging babi masih mudah ditelusuri keberadaannya dalam bentuk makanan apapun.

Bagi kita semua yang merasa bagian dari komunitas peternakan dan kesehatan hewan, tentunya berbagai hal di atas menjadi kepedulian kita. Pemerintah perlu dibantu untuk menyadarkan dan mendidik masyarakat yang “gelap hati dan nuraninya” dalam mengejar keuntungan melalui cara-cara yang sangat memalukan sebagai bagian dari suatu bangsa.

Desember 2006



6. BBM & HDI, Hati-hati CLQ & PMK

Pascalebaran 2007 kemarin, Prof. Dr. Ir. Tjeppy D. Sudjana, MSc dilantik oleh Menteri Pertanian RI sebagai Direktur Jenderal Peternakan menggantikan Ir. Mathur Riady, MA yang kemudian dilantik menjadi Staf Ahli Mentan RI Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Selamat bertugas kepada beliau berdua, semoga amanah yang diberikan dapat diemban sebaik-baiknya untuk lebih memajukan peternakan di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan daging, telur, dan susu bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Tantangan untuk memenuhi kebutuhan produk peternakan tersebut menjadi semakin berat melihat kondisi global yang semakin tidak kondusif. Harga minyak mentah yang hampir menembus US\$ 100 per barel telah membuat subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak (BBM) semakin menggelembung. Sangat tidak menutup kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan harga BBM akan naik lagi. Karena persoalan minyak juga, beberapa negara produsen jagung mengembangkan *biofuel*, yang mengakibatkan pasokan jagung untuk bahan baku pakan ternak menjadi berkurang. Sehingga harga jagung terus membumbung. Dari dua persoalan ini saja, biaya input produksi untuk mengusahakan ternak (khususnya ayam) akan meningkat dan akibatnya harga produk peternakan akan naik lagi.

Di sisi lain *Human Development Index* (HDI) bangsa Indonesia masih berada di urutan nomer 108 dari 190 negara di dunia, yang sangat berkorelasi dengan tingkat konsumsi protein hewani yang masih sangat rendah yaitu 4,5 kg/kapita/tahun (urutan nomor 7 dari 10 negara ASEAN). Bangsa Indonesia yang besar ini masih didominasi penduduk dengan tingkat intelektual rendah dan tingkat kesejahteraan yang rendah juga. Semakin tingginya importasi berbagai produk sandang, pangan, dan papan di era global ini juga melengkapi penderitaan mayoritas penduduk Indonesia karena minimnya peluang pekerjaan yang tersedia. Betul-betul kondisi yang sangat memprihatinkan sebagai suatu bangsa.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan yang baik dan ditopang dengan asupan gizi yang baik merupakan salah satu



kunci pokok untuk membuat bangsa Indonesia ini dapat menjadi lebih baik. Artinya, produk peternakan sebagai penyedia bahan pangan berprotein tinggi akan terus dibutuhkan. Usaha peternakan juga akan tetap menarik bagi masyarakat pedesaan karena fungsi ternak sebagai tabungan hidup, sebagai penyubur tanah, dan sebagai penyedia lapangan pekerjaan yang diharapkan dapat menekan arus urbanisasi. Jadi, di tengah situasi yang kurang kondusif tersebut, peternakan dan produknya akan terus dibutuhkan mengingat hanya produk peternakan saja yang memiliki multifungsi tersebut dan fleksibel untuk diintegrasikan dengan usaha apa saja dan dimana saja.

Celah unik peternakan yang multifungsi tersebut jelas merupakan kekuatan komunitas peternakan, yang oleh karenanya harus dioptimalkan perannya sebagai kontributor utama dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan peluang kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kerjasama yang baik antara pelaku usaha peternakan kecil dan pelaku industri peternakan raksasa yang telah terjalin harus semakin ditingkatkan kualitasnya. Pertentangan antara kelompok kecil dan kelompok raksasa yang masih terus mengumandang akan sangat kontraproduktif dalam upaya berkontribusi bagi terwujudnya bangsa Indonesia yang lebih maju dan lebih cerdas.

Jika memang harga BBM dinaikkan, sedangkan kebutuhan asupan gizi menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bangsa Indonesia, akan sangat mengkhawatirkan apabila hal itu dijadikan alasan utama bagi masuknya produk bahan pangan protein hewani (termasuk produk peternakan) ke Indonesia karena berharga murah seperti *Chicken Leg Quarter* (CLQ) dan daging sapi asal India yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Ini yang perlu diwaspadai oleh siapa saja di komunitas peternakan.

Banyaknya tantangan yang semakin berat dan berakumulasi dari waktu ke waktu harus diselesaikan satu per satu dan bukan diwacanakan dan dibahas saja. Waktu terus bergerak maju dan tidak akan pernah kembali lagi. Semua harus bekerja keras, meningkatkan profesionalitas demi



peningkatan efisiensi dan produktivitas. Hanya itu semua yang harus dilakukan oleh siapa saja yang ingin berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Desember 2007

7. Problem Peternakan Bukan Sekedar AI

Pada 4-6 Desember 2007 lalu, perwakilan dari 111 negara dan 29 organisasi internasional berkumpul di New Delhi, India dalam acara *The New Delhi International Ministerial Conference on Avian and Pandemic Influenza*. Pertemuan ini merupakan yang ke-enam kalinya setelah diselenggarakan di Washington, Geneva, Beijing, Vienna, dan Bamako. Dari pertemuan tersebut, dihasilkan tujuh butir rekomendasi yang sebaiknya dilakukan oleh seluruh negara peserta pertemuan. Empat butir terkait langsung dengan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, dua butir terkait dengan pentingnya komunikasi ke publik dalam menghadapi kemungkinan buruk terjadinya pandemi, dan satu butir terkait dengan perlindungan ternak dari serangan virus *avian influenza* maupun penyakit menular lainnya.

Yang lebih ditekankan dalam hal perlindungan ternak dari penyakit menular tersebut adalah pola kegiatan yang tidak bersifat *ad hoc* (keproyekan) tetapi harus merupakan aktivitas berkelanjutan. Tentunya hal ini harus menjadi kesadaran utama dari para praktisi (peternak berskala kecil sampai berkelas kakap) untuk melaksanakan manajemen peternakan secara baik dan benar. Selain itu, kemauan politis dari eksekutif maupun legislatif sangat penting dalam mengerakkan seluruh praktisi tersebut untuk bertindak profesional. Yang terpenting lagi adalah adanya strategi dan arah yang jelas, membumi (aplikatif), relevan, dan realistik dari departemen teknis yang membidangi masalah peternakan. Bukan lagi strategi yang bersifat makro dan cenderung normatif.

Pengamatan di lapangan selama ini menunjukkan bahwa masih



ditemukan adanya perusahaan peternakan ayam ras (pedaging maupun petelur) yang dikelola “*business as usual*” atau kurang profesional. Selain rentan terhadap penyebaran dan penularan penyakit, pengelolaan ayam yang kurang hati-hati juga sangat berpengaruh terhadap aspek bisnis keseluruhannya. Apalagi untuk komoditas ayam kampung, masih sangat banyak ditemukan para keluarga di pedesaan yang pola beternaknya jauh dari aturan standar minimal sekalipun. Artinya, masalah *missmanagement* dalam pemeliharaan ayam tidak selalu hanya terjadi di peternakan “*back-yard*” saja tetapi juga teridentifikasi pada perusahaan peternakan. Apapun alasannya, fakta masih ditemukannya *missmanagement* di perusahaan peternakan merupakan hal yang sangat menyedihkan.

Di sisi lain, Prof. Bungaran Saragih yang mantan Menteri Pertanian RI periode 2000-2004 berkeyakinan bahwa era pangan murah sudah berakhir. Kebutuhan manusia untuk *food* (pangan), *fuel* (bahan bakar), dan *feed* (pakan) yang semakin banyak dan saling berkompetisi dalam penggunaan bahan bakunya telah berakibat naiknya harga pangan atau pakan semakin menjadi-jadi. Pemerintah sudah tidak mungkin lagi melakukan intervensi terlalu jauh dalam membendung kenaikan harga bahan baku pangan,



misalnya melalui subsidi, karena kocek pemerintah juga semakin menipis akibat didera berbagai bencana alam, bencana non-alam, maupun akibat kondisi makro dunia.

Memang ada sementara pihak yang berkeyakinan bahwa terjadinya AI, rasa kekhawatiran tinggi akan terjadinya pandemi influenza, dan melambungnya harga pangan maupun pakan merupakan konspirasi tingkat tinggi untuk membuat Indonesia semakin terpuruk. Menurutnya, itu semua berlatar belakang dari keinginan menguasai pasar di Indonesia yang sangat potensial. Namun ada juga pihak yang berpendapat bahwa semua kejadian tersebut memang akibat pengaruh global yang tidak dapat dihindari lagi.

Ada atau tidak ada konspirasi, fakta yang telah dan akan terus terjadi adalah harga pangan (termasuk produk peternakan) semakin mahal karena biaya *input* produksi yang terus membubung dan penurunan konsumsi produk peternakan karena semakin kurangnya daya beli masyarakat. Ini merupakan tantangan serius yang harus dihadapi dan dicari solusi riilnya. Khususnya dalam pengelolaan usaha peternakan, efisiensi dalam berbagai aspek manajemen maupun bisnisnya merupakan hal yang mutlak. Perbaikan kualitas sumberdaya manusia yang berkecimpung dalam dunia peternakan tidak dapat dihindari dalam upaya menurunkan biaya *input* produksi. Penyiapan sumberdaya peternak yang profesional (lulusan perguruan tinggi) melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan bisnis juga merupakan keharusan dalam menggarap potensi peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan berprotein tinggi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia

Semoga butir-butir rekomendasi hasil pertemuan di India tersebut di atas memberi motivasi kuat kepada seluruh komunitas peternakan untuk tidak hanya mengatasi masalah virus *avian influenza* saja, tetapi juga dapat menyediakan bahan pangan asal hewan yang harganya terjangkau masyarakat luas untuk membuat bangsa Indonesia semakin cerdas.

Maret 2008



8. Cukup Flu Burung Saja!

Tampaknya masyarakat sudah mulai meninggalkan rasa takutnya memakan daging ayam. Restauran cepat saji yang menghidangkan berbagai produk ternak unggas mulai ramai dan bergairah lagi. Stock ayam beku mulai dikeluarkan dari freezer dan bahkan mungkin sudah habis. Sangat diharapkan peternak dapat menarik nafas lega kembali dan dapat menuai keuntungan lagi dari usaha beternak ayamnya. Semoga kejadian yang memilukan ini tidak terulang. Amin.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai banyak pintu bagi masuknya barang halal maupun haram. Ditambah dengan predikatnya sebagai negara terkorup di Asia dan masuk rangking di level dunia, akan semakin mudah para penyelundup memasukkan barang dagangannya ke wilayah Indonesia. Apa saja diselundupkan, tak terkecuali produk hewan, seperti daging sapi asal India yang konon banyak beredar di ibukota.

Sampai tanggal 20 Mei 2003, dari daftar 57 negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menurut publikasi OIE, India tidak termasuk di dalamnya. PMK (penyakit mulut dan kuku) yang termasuk jenis penyakit cepat menular adalah infeksi yang terjadi pada jenis hewan berkuku dua dan biasa menyerang pada daerah mulut dan kaki terutama kuku. PMK biasa terjadi pada semua jenis ruminansia dan juga babi. PMK mempunyai karakter rendah tingkat kematiannya pada ternak dewasa dan tinggi tingkat kematiannya pada ternak yang masih muda.

Disebabkan oleh *Picornavirus* dan termasuk dalam genus *Aphthovirus* yang mempunyai tujuh tipe, karakter virus PMK adalah sensitif terhadap pengaruh lingkungan, seperti : pH (tetapi akan stabil pada pH 7 dan 9), cahaya matahari, dan dapat bertahan pada suhu yang dingin.

Jika PMK sudah menyerang pada ternak, maka akan timbul suatu gejala dari ternak tersebut yang bisa kita lihat. Gejala yang sering terlihat adalah dari mulut dan kaki terutama pada kuku. Gejala yang sering tampak pada mulut diantaranya : adanya selaput lendir dalam mulut termasuk bibir dan gusi, tampak merah, kering dan panas kemudian bisa melepuh



dan berisi cairan kuning; dari mulut keluar ludah bercampur lendir. Gejala pada kaki : terdapat luka diantara kuku dan kulit-kulit kaki akhirnya menyebabkan ternak berbaring terus karena kakinya sakit, kadang pada ambing juga luka dan melepuh.

Cara penularan PMK bisa terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung berarti kita bersentuhan, bersinggungan atau berinteraksi langsung dengan ternak tanpa melalui media perantara. Penularan melalui kontak tidak langsung yaitu melalui hewan lain yang tidak terjangkit maupun non hewan seperti peralatan yang mengandung virus PMK. Selain itu yang harus kita waspadai juga dari PMK adalah bahwa PMK juga bisa menular melalui media udara seperti kasus PMK yang terjadi di daerah *temperate*.

Kondisi di Dalam dan Luar Negeri

Masalah PMK telah menjadi masalah internasional karena selain berbahaya juga telah ada dari zaman dahulu. PMK merupakan penyakit endemik yang ada di wilayah Asia, Afrika, Amerika Tengah, Timur dan



Selatan. Indonesia sendiri mulai terjangkit PMK pada satu abad yang lalu tepatnya pada tahun 1887 yang kemudian pada pertengahan 1983 sempat mewabah kota-kota di Jawa Tengah. Kita sebagai bangsa Indonesia sepatutnya bersyukur bahwa kejadian tersebut telah memberikan hikmah yang besar kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam penanganan masalah ternak. Sehingga pada beberapa dekade terakhir ini, dengan berusaha bersama pemerintah, Indonesia telah terbebas dari PMK dan diakui secara internasional.

Lain di Indonesia lain pula di luar negri. Amerika misalnya, di Amerika pada tahun 1952 ditemukan PMK yang disebabkan karena mengimpor daging dari Brazil, sempat hilang beberapa dekade kemudian pada tahun 2000 muncul lagi karena ada impor daging sapi ilegal dari Argentina dan Paraguay. Hal ini bisa terjadi karena impor tersebut dilakukan antar individu dan tidak dengan "G to G" (government to government / antar pemerintah). Akibat dari tragedi tersebut Amerika terjangkit PMK lagi dan pemerintah Amerika mengambil kebijakan untuk membunuh secara masal ternak yang diindikasikan terjangkit PMK dan ada sekitar 1000 ternak yang terdiri dari sapi, domba dan babi.

Lain lagi ceritanya dengan kasus PMK yang terjadi di Inggris. Ternak di Inggris terjangkit PMK karena berawal dari turis yang habis berkunjung dari peternakan di negara lain kemudian berkunjung ke Inggris yang tanpa sadar turis tersebut telah membawa dan menyebarluaskan virus PMK.

Sekelumit kasus tentang PMK diatas telah membuat masyarakat internasional lebih hati-hati dan waspada. Sehingga buah dari kehati – hatian tersebut telah tercatat dalam data internasional bahwa hingga Mei 2003 tercatat 57 negara termasuk Indonesia yang sudah bebas penyakit PMK. Kita belum selayaknya bangga dengan data tersebut, tetapi yang terbaik untuk kita lakukan adalah lebih mengoptimalkan usaha dalam menangani dan mengantisipasi PMK.

Kehati-hatian dalam Impor Daging Sapi

Di Indonesia sekarang sedang marak lagi impor daging sapi ilegal,



setelah sempat agak menjauh dari daging sapi Amerika karena penyakit Sapi Gila. Daging sapi yang ada di pasaran sekarang adalah diindikasikan daging sapi dari India, padahal kita tahu bahwa India merupakan salah satu negara yang belum bebas PMK. Jika terbukti benar bahwa daging yang ada sekarang dihasilkan dari ternak yang positif PMK maka selain akan menyebabkan menyebarnya lagi virus PMK di Indnesia juga daging sapi yang kita makan tidak sehat dan akhirnya kita juga yang akan menjadi korban.

Kita sudah seharusnya waspada dan jeli dalam menyikapi hal ini, jika kita sebagai konsumen misalnya, maka kita jangan asal beli daging yang murah tapi kita harus perhatikan juga kulitas dan dari mana daging itu berasal. Atau jika kita sebagai pemerintah selaku yang membuat kebijakan, maka kalau kita akan membuat kebijakan mengimpor daging seharusnya kita impor dari negara yang bebas dari penyakit terutama PMK. Seiring berjalannya waktu pemerintah juga harus mempunyai rencana dan target jangka panjang untuk melakukan seleksi dan pengembangbiakan ternak lokal agar dapat memenuhi kebutuhan daging dalam negri, sehingga kita tidak lagi impor daging bahkan seperti yang kita harapkan yaitu kita juga bisa melakukan ekspor daging nantinya.

Selain usaha-usaha diatas yang terkait dengan kebijakan pemerintah, kita juga harus melakukan usaha-usaha yang terkait dengan penanganan ternak, yang terdiri dari usaha pencegahan dan penanganan PMK. Dalam pencegahan PMK beberapa usaha yang kita lakukan adalah : membuat daerah proteksi/aman yang kemudian kita bisa mengontrol hewan yang masuk daan keluar dari daerah proteksi; Sanitasi pada RPH; Sanitasi pada sarana, seperti baju, mobil dan peralatan; Sanitasi kandang; dan adanya penyediaan tempat karantina. Sedangkan dalam usaha penanganan PMK adalah dapat dilakukan dengan pemberian vaksin inaktif yang dilakukan secara teratur dengan interval 4 – 6 bulan sekali. Cara tersebut telah berhasil diterapkan pada beberapa negara di dunia.

April 2008





D Profesionalitas Sumberdaya Manusia dalam Peternakan



1. Sarjana Peternakan di Era PT-BHMN

Prinsip diberikannya status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) kepada empat PTN (IPB, ITB, UI, dan UGM) adalah perguruan tinggi tersebut dapat mengatur rumah tangganya sendiri tanpa intervensi pemerintah, termasuk kurikulumnya. Saat ini Fakultas Peternakan IPB, khususnya pada program pendidikan sarjana, memiliki empat program studi (PS) yang terdiri atas PS-Teknologi Produksi Ternak, PS-Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, PS-Sosial Ekonomi Ternak, dan PS-Teknologi Hasil Ternak (THT). Ketentuan ini mulai berlaku sejak 1994.

Perdebatan mengenai kualitas S.Pt produk kurikulum 1994 sudah bergulir sejak tiga-empat tahun lalu. Pro-kontra tentang penerapan kurikulum sarjana peternakan dengan empat program studi masih dan terus bergulir. Namun, mengikuti diskusi dari berbagai forum yang diselenggarakan kalangan perguruan tinggi, asosiasi (Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, ISPI), forum pimpinan perguruan tinggi peternakan, atau organisasi mahasiswa lainnya, tampaknya sarjana peternakan yang bersifat generalis dengan sedikit pembekalan minat studi lebih diharapkan.

Kesimpulan yang masih sangat prematur tersebut tampaknya didasari oleh: *Pertama*, S.Pt yang mendalami ilmu yang spesifik belum dapat menunjukkan kespesifikannya. *Kedua*, kesempatan kerja yang tersedia bagi S.Pt berkeahlian spesifik belum banyak. *Ketiga*, S.Pt dengan keahlian spesifik kurang memahami dasar-dasar peternakan secara baik sehingga mereka kurang percaya diri bila diterjunkan ke masyarakat yang umumnya beranggapan semua S.Pt akan mengetahui semua hal yang terkait dengan peternakan. *Keempat*, S.Pt dengan keahlian spesifik sangat diragukan keahliannya karena penguasaan dasar-dasar peternakannya masih terkesan lemah. Walaupun tak didasarkan pada hasil penelitian yang sahih, adanya kenyataan tersebut perlu kitajadikan bahan introspeksi diri dalam upaya meningkatkan kualitas sarjana peternakan di masa mendatang.

Ada satu hal lagi yang mungkin penting dicermati berkaitan dengan kualitas S.Pt. Dalam penerimaan pegawai negeri baru di Deptan tahun ini, dokter hewan (drh) disetarakan dengan pascasarjana (S2), sedangkan S.Pt



hanya disetarakan dengan sarjana (S1). Mungkinkah ini pertanda bahwa kemampuan S.Pt memang di bawah kemampuan drh? Saya tak sanggup menjawabnya, tetapi adanya fakta yang menunjukkan drh. memiliki derajat lebih tinggi perlu dijadikan bahan renungan bagi para praktisi pendidikan di fakultas peternakan.

Bagaimana Fapet IPB Menyikapinya?

Apakah Fapet IPB akan kembali ke S.Pt yang bersifat generalis? Atau mempertahankan sistem pendidikan yang terdiri dari empat program studi? Itu semua sangat mungkin dilakukan. Dalam hal ini, yang terpenting bagi Fapet IPB bukan pada keputusan untuk memilih satu di antara dua pilihan tersebut. Namun, bagaimana Fapet IPB dapat memberikan pelayanan terbaik dalam rangka menghasilkan S.Pt yang berbobot dan berkualitas tinggi, apapun alternatif yang diambil.

Apabila Fapet IPB mengambil alternatif pertama (pendidikan peternakan yang bersifat generalis), perombakan kurikulum dengan materi kuliahnya harus dilakukan secara mendasar melalui pemikiran dari banyak pihak, khususnya pengguna S.Pt di masyarakat. Apabila Fapet IPB mempertahankan alternatif kedua (pendidikan peternakan yang bersifat spesialis), tampaknya pembekalan dasar-dasar peternakan yang menjadi titik lemah S.Pt saat ini perlu disempurnakan dengan menambah beban studinya sampai 160 SKS. Pengembangan keterampilan melalui praktek lapang yang sesuai program studinya perlu diwajibkan sehingga mahasiswa benar-benar mampu menguasai ilmunya dengan baik. Pembekalan *soft-skill* seperti kepemimpinan, manajerial, dan pengembangan diri dalam rangka membentuk S.Pt yang percaya diri juga perlu dilakukan.

Fapet IPB yang selama ini masih menjadi salah satu acuan bagi pengembangan fapet di perguruan tinggi lain di Indonesia, harus mampu menjadi motivator dan inovator dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di sini. Dalam konteks ini, kerjasama yang baik antara Fapet IPB, Himpunan



Alumni Peternakan (HANTER), dan ISPI perlu lebih dieratkan lagi dalam melahirkan pemikiran dan ide-ide segar untuk membangun dunia peternakan kita menjadi lebih baik.

Dengan status BHMN yang disandang IPB, Fapet IPB tampaknya perlu bereksperimen dalam pengelolaan pendidikannya melalui restrukturisasi organisasi yang lebih baik. Prinsip profesionalisme dan keterbukaan dalam kebersamaan visi perlu diterapkan dalam upaya pengembangan pendidikan Fapet ke arah yang lebih baik. Keterlibatan mahasiswa dalam



berbagai diskusi bersama tenaga akademi dan pegawai diharapkan bisa meningkatkan kualitas keputusan yang diambil pimpinan, khususnya dalam menyikapi berbagai persoalan lokal, nasional, regional bahkan internasional.

April 2003

2. Kurikulum Versi 1994: Penghasil S.Pt Seperempat Matang

Sudah cukup sering saya mendengar keluhan dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa kualitas sarjana peternakan (S.Pt) lulusan 1998 ke atas jauh berbeda dengan kualitas S.Pt lulusan sebelum tahun itu. Pengetahuan umum tentang peternakan dan penguasaan dasar-dasar peternakan kurang dikuasai secara baik oleh S.Pt masa kini. Padahal, tengok saja di beberapa Fakultas Peternakan PTN, jumlah dan kualifikasi dosen pengajarnya lebih baik, fasilitas/sarana-prasana untuk proses belajar mengajar relatif lebih maju dan lebih lengkap, ruang perkuliahan lebih besar dan lebih nyaman, dan lain-lainnya juga relatif lebih baik pada kondisi saat ini dibanding kondisi masa lalu. Jadi, kenapa kualitas S.Pt nya justru lebih rendah?

Satu-satunya yang membedakan adalah kurikulumnya. Sebelum 1994, kurikulum yang digunakan di Fakultas Peternakan di seluruh Indonesia adalah kurikulum yang disusun sedemikian rupa sehingga setiap mahasiswa akan dibekali berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang terkait dengan bidang peternakan mulai dari hulu (sarana produksi), kegiatan produksi (*on farm*) sampai pengolahan dan pemasaran hasil (*off farm* atau hilir). Para lulusan Sekolah Menengah Umum yang belajar di Fakultas Peternakan selama 4-5 tahun memperoleh bekal lengkap sebagai seorang S.Pt sehingga merasa menjadi ahli di bidang peternakan. Lulusan S.Pt semacam ini cukup mudah menyesuaikan diri dengan jenis pekerjaan baru yang digeluti ketika berada di tengah masyarakat.

Ini berbeda dengan kurikulum yang diperkenalkan pada 1994. Ada



empat macam kurikulum yang ditawarkan di Fakultas Peternakan, yaitu kurikulum program studi (PS) Teknologi Produksi Ternak (TPT), PS Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak (INMT), PS Sosial Ekonomi dan Industri Peternakan (SEIP), dan PS Teknologi Hasil Ternak (THT). Perbedaan substansi yang diberikan dalam setiap kurikulum sekitar 50% lebih. Artinya, setiap mahasiswa hanya memperoleh bekal ilmu yang sama sebanyak 50% dari 144 SKS (total beban studi minimal bagi seorang sarjana), sedangkan 50% ilmu lain yang diberikan berbeda sama sekali, sesuai PS yang dipilih. Namun demikian, gelar yang diperoleh ketika mahasiswa lulus dari perguruan tinggi sama, yakni Sarjana Peternakan (S.Pt), dan bukan S.TPT (Sarjana Teknologi Produksi Ternak) atau S.INMT atau S.SEIP atau S.THT. Sampai saat ini keempat kurikulum ini masih berlaku di seluruh Indonesia.

Apabila kurikulum versi sebelum 1994 lebih bersifat *generalist* sehingga setiap mahasiswa diharapkan cukup memperoleh bekal iptek di bidang peternakan secara utuh, maka tidak demikian halnya dengan kurikulum versi 1994. Setiap mahasiswa hanya dibekali pengetahuan yang lebih bersifat spesifik. Mahasiswa PS-TPT tahu banyak tentang kegiatan *on-farm* tetapi tidak tahu berbagai hal lainnya. Mahasiswa PS-INMT tahu banyak tentang nutrisi dan makanan ternak tetapi tidak tahu berbagai hal di luar itu. Dengan demikian, kurikulum versi 1994 menghasilkan S.Pt yang dibekali iptek bidang peternakan hanya seperempat bagian saja. Institusi Fakultas Peternakannya mempunyai kepakaran secara utuh karena ada ahli TPT, ada ahli INMT, ada ahli SEIP, dan ada ahli THT.

Tampaknya penerapan empat macam kurikulum versi 1994 tadi didasari niat baik untuk menyiapkan S.Pt dengan keahlian spesifik sehingga S.Pt yang dihasilkan akan lebih terampil bila bekerja sesuai dengan kespesifikannya. Namun fakta di lapangan menunjukkan, hampir tidak ada perusahaan yang membutuhkan S.Pt berdasarkan kespesifikasi yang dimiliki. Mereka menganggap semua S.Pt sama, apapun program studi yang diambil ketika menjadi mahasiswa Fakultas Peternakan.

Walaupun tersedianya empat program studi juga akan meningkatkan



jumlah mahasiswa yang diterima di Fakultas Peternakan (yaitu meningkatkan daya tampung perguruan tinggi bagi lulusan SMU), PT juga perlu mengantisipasi ketersediaan lapangan pekerjaan yang membutuhkan S.Pt dengan keahlian spesifik tersebut.

Satu hal yang terasa agak ganjil pada pembentukan empat program studi berdasarkan kurikulum versi 1994 adalah keterkaitannya dengan program pascasarjana. Sampai saat ini di program pascasarjana, yang seharusnya lebih spesifik, hanya ada satu program studi, yaitu PS Ilmu Ternak atau ada juga yang menamakan PS Ilmu Peternakan, sedangkan di program sarjana justru memiliki empat macam program studi yang lebih spesifik.

Meskipun banyak pihak (khususnya dari pengguna S.Pt) menghendaki agar S.Pt dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan yang lebih general, tampaknya masih ada sementara pihak yang berpendapat, perbaikan fasilitas, sarana-prasarana, dan peningkatan kemampuan dosen jauh lebih penting daripada memperbaiki kurikulum yang saat ini sudah berjalan hampir sepuluh tahun. Bagaimana dengan pendapat mahasiswa Fapet sendiri?

Juni 2003

3. Membangun *Animalculture*

Cukup sering terdengar isu banyaknya kegagalan pembangunan peternakan di Indonesia di samping ada juga keberhasilannya. Salah satunya adalah program pemerintah dalam hal pengadaan ternak ke berbagai wilayah Indonesia yang budaya masyarakatnya sangat beragam. Belum lagi mengetahui akar permasalahan dari kegagalan tersebut, muncul konsep baru pembangunan peternakan berbasis agribisnis atau pembangunan peternakan menuju pola agroindustri.

Menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi saat ini, sebenarnya tidak ada yang salah dalam konsep tersebut bila industri





peternakan di Indonesia tidak ingin tergilas oleh bangsa lain yang menerapkan pola peternakannya secara efisien. Namun demikian, mungkinkah kita dapat menerapkan pola *animalbusiness* atau agribisnis khusus di bidang peternakan atau *animalindustry* tanpa memperhatikan *animalculture*-nya? Yang terakhir ini rasanya kurang mendapat perhatian dan mungkin salah satu penyebab kegagalan pembangunan peternakan.

Bila kita bicara *animalculture*, kita tidak hanya bicara tentang ternaknya tetapi juga peternaknya sebagai satu kesatuan yang juga mencakup tradisi/kebiasaan komunitasnya. Sebagai ilustrasi, bagaimana sapi perah dapat berkembang baik di daerah Pujon (Jawa Timur) atau di Boyolali (Jawa Tengah) atau beberapa daerah di Jawa Barat, tetapi tidak dapat berkembang baik di kawasan lain di Indonesia? Selain agroklimatnya sesuai, hubungan mesra yang terjalin antara peternak dan sapi perahnya telah turun temurun di kawasan tersebut. Bagaimana tidak dapat dikatakan mesra apabila setiap hari (mulai pukul 03.30 pagi) peternak sudah harus bangun untuk memerah susu sapinya, memandikannya, membersihkan kandangnya, dan memberi makan/minum? Sore harinya, aktivitas pemerasan susu dengan segala prosesnya diulangi lagi; esoknya seperti itu lagi; dan seterusnya, bertahun-tahun! Rutinitas ini dilakukan dengan penuh kesabaran dan penuh rasa



kasih sayang antara dua makhluk hidup, yaitu manusia dan sapi perahnya. Jalinan erat antara manusia, ternak, dan kebiasaan komunitasnya itu merupakan bagian penting dari konsep *animalculture* yang harus diperhatikan dalam merancang setiap pembangunan peternakan di Indonesia. Lain sapi perah, lain pula sapi potong dan lain lagi dengan unggas dalam mewujudkan pola jalinan mesra antara manusia, ternak, dan komunitasnya.

Bagaimanapun ternak merupakan makhluk hidup yang secara naluri punya rasa untuk dikasih dan disayangi. Tanpa ada rasa saling menyayangi di antara peternak dan ternaknya, jangan harap ternak dapat memberikan potensi maksimalnya. Ternak tidak dapat dieksplorasi saja tenaga dan produktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memahami perasaannya. Dengan kata lain, mempersiapkan peternak untuk mau dan mampu menjalin kasih sayang dengan ternaknya merupakan persyaratan mutlak keberhasilan pembangunan peternakan secara berkelanjutan apa pun komoditasnya . Jalinan kasih sayang dapat dibentuk dan terjadi apabila peternak mengetahui cara menangani ternak secara baik. Dan, di sinilah pentingnya pendidik, penyuluh, atau pembina peternak. Pemerintah sangat berperan dalam hal ini.

Dalam konteks tersebut, program pengembangan peternakan yang didasarkan atas asas pemerataan menjadi kurang relevan. Tidak semua orang menyukai ternak. Perlu dipilih orang yang benar-benar ingin beternak dan ingin menjadi peternak. Memahami dan menjawab apa yang diinginkan ternak dalam rangka menjalin kasih sayang antara manusia dan ternak merupakan salah satu makna dari *animalculture*.

Animal-business atau *animalindustry* lebih merupakan pengembangan kualitas beternak sehingga dicapai efisiensi dan produktivitas tinggi dalam usaha beternak. Dengan kata lain, perlu ada tahapan yang jelas dan sistematis dalam membangun peternakan ke depan, dengan tahap paling awalnya adalah mempersiapkan si peternak! Ini dapat dilakukan melalui jalur formal (sekolah atau perguruan tinggi) dan jalur informal. Tidak perlu buru-buru dan tidak harus ada target waktunya karena pembangunan



peternakan pada dasarnya juga terkait dengan pembangunan manusia Indonesia. Ini tidak akan pernah berakhir sampai kiamat datang.

Koentjaraningrat, antropolog Indonesia, mendefinisikan budaya atau *culture* sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, serta keseluruhan hasil budi dan karyanya itu. Jika demikian definisi tentang budaya, untuk menerapkan peternakan berbasis agribisnis atau mewujudkan agroindustri di sektor peternakan, diperlukan "*animalculture*" versi Indonesia sebagai landasannya.

Januari 2005

4. Penyuluhan NO, VCD YES!

Berawal dari kegiatan penerapan teknologi yang didanai oleh Pusat Bioteknologi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sejak tahun 2001, program pemurnian sapi Bali digulirkan di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, kawasan ini dapat ditempuh melalui jalan darat atau melalui sungai Barito, atau melalui jalan darat dan menyeberangi sungai Barito. Lokasinya cukup terisolir dan sebagian besar penduduknya transmigran dari Pulau Jawa.

Kawasan ini dipilih untuk program pemurnian sapi Bali karena dua alasan penting. Pertama, setelah lebih dari 20 tahun berpengalaman memelihara sapi di kawasan itu, sapi Bali merupakan sapi yang paling sesuai untuk dikembangkan di sana. Dengan kondisi alam yang tidak begitu baik, sapi Bali masih berreproduksi tinggi, mudah ditangani, dan mengubah lahan menjadi subur. Kedua, sebagai akibatnya, petani hanya mau memelihara sapi Bali. Diberi bantuan untuk memelihara sapi lainnya, mereka akan berkomentar "*prei mawon mas*" alias tidak mau.

Walaupun mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar, sebagian besar petani-peternak sangat terampil memelihara sapinya. Ini ditunjukkan dari penampilan sebagian besar sapi Bali yang warna tubuhnya mengkilap, gemuk dan sehat. Mereka juga kompak sehingga kelompok peternak juga



berjalan cukup efektif. Untuk lebih mengefektifkan lagi dalam mendukung program pemurnian sapi Bali, empat belas kelompok peternak membentuk asosiasi baru yang diberi nama *Lembu Suro*. Keempat belas kelompok ini yang juga menandatangani Deklarasi Masyarakat Peternakan bersama birokrat, asosiasi, dan tim LIPI disaksikan oleh Bupati Kabupaten Barito Kuala dan Wakil Ketua DPRD setempat serta jajaran Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah).

Untuk pembekalan bagi peternak sapi dalam menerapkan program pemurnian sapi Bali di kawasan tersebut serta untuk menambah wawasan peternak, tim LIPI memberi pelatihan dua hari; beberapa bundel majalah peternakan (TROBOS, POULTRY INDONESIA, dan INFOVET); seperangkat komputer dan printer, serta buku panduan program pemurnian. Dari hasil diskusi antara tim LIPI dan petani-peternak, mereka memang perlu secara berkala menerima informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan pemeliharaan sapi yang baik serta informasi lainnya yang terkait dengan kehidupan mereka sebagai petani-peternak. Namun kalau diinformasikan melalui pelatihan atau membaca buku, banyak petani-peternak kesulitan menangkap substansinya. Mereka lebih gampang menerima semua materi jika langsung diberi contohnya sekalian. Daripada diberi buku panduan, mereka lebih suka diberi film VCD yang berisi materi dalam buku panduan dan disertai berbagai peragaan langsung yang sesuai dengan materi tersebut. Rupanya lebih dari 90% petani-peternak sudah memiliki *VCD player*!!

Tentu saja hal itu sangat menggembirakan. Membuat tayangan di dalam VCD tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu sulit. Informasi tentang berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi serta hal-hal lain yang relevan akan jauh lebih mudah ditransfer kepada mereka yang tinggal di kawasan yang cukup terisolir. Tidak hanya program pemurnian sapi Bali saja yang dapat ditayangkan via VCD tetapi program apapun dari pemerintah atau dari mana saja dapat dibuat VCD-nya. Ini benar-benar sangat efektif, efisien, dan produktif. Teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah kepada masyarakat dimanapun berada.



Dalam konteks ini, keberadaan penyuluhan dalam jumlah besar sudah tidak relevan lagi. Namun bukan berarti penyuluhan kepada para petani-peternak ditiadakan. Penyuluhan justru harus lebih ditingkatkan lagi dengan menggunakan fasilitas dan media elektronik yang semakin gampang diperoleh. Dalam rangka efisiensi dan produktivitas, tidak salah juga apabila penyuluhan tidak perlu ditangani secara khusus oleh lembaga tertentu tetapi harus menjadi bagian dari tanggung jawab Direktorat Jenderal teknis. Untuk komoditas peternakan, tentunya Ditjen Bina Produksi Peternakan.

Saat ini para petani-peternak telah menyiapkan media elektroniknya secara mandiri dengan membeli *VCD player* yang memang harganya sudah terjangkau dan mudah diperoleh. Selain dapat dinikmati untuk menonton berbagai tayangan film dalam bentuk VCD, alat tersebut seyogyanya perlu dioptimalkan sebagai media penyuluhan efektif. Untuk itu, Ditjen Bipronak berkewajiban menyediakan tayangan film dalam bentuk VCD yang menarik tetapi berisi penyuluhan tentang usaha peternakan yang baik. Dengan menonton VCD berisi penyuluhan, mereka dapat melepas lelah sambil belajar di rumah. Jadi, tidak salah bila mereka *emoh* penyuluhan tetapi mau VCDnya saja!

Februari 2005

5. Suatu Kebutuhan Bernama Profesionalisme

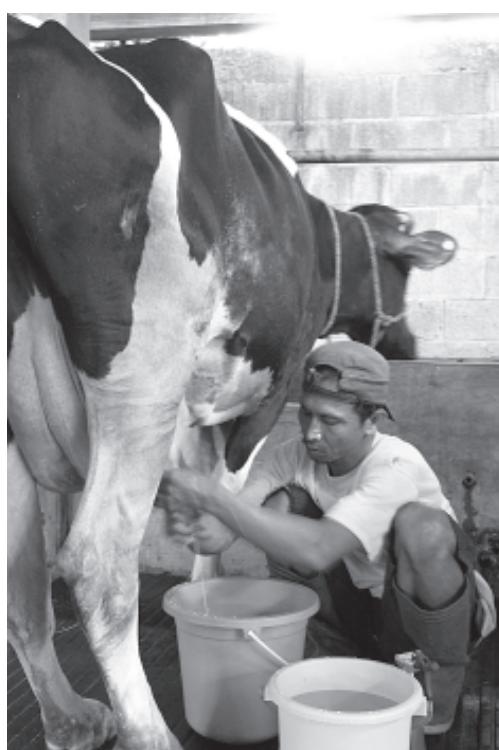
Berita miring tentang kualitas ternak milik pemerintah yang tersebar di berbagai Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) di seluruh Indonesia sering terdengar. Rata-rata mutu dan produktivitas ternak itu hampir selalu di bawah ternak milik masyarakat sehingga nama balai yang demikian "keren" menjadi tak bermakna. Tidak hanya di Baturaden-Jateng dengan sapi perahnya atau di Siborong-borong Sumut dengan babinya atau di Pelaihari-Kalsel dengan kambing/dombanya atau BPTU lainnya. Hampir semua



tidak jauh berbeda. Kondisi seperti itu mengakibatkan masyarakat tidak percaya pada kemampuan pemerintah dalam membina petani peternak ke arah yang lebih maju.

Perubahan kondisi sosial-ekonomi dan politik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir seharusnya juga dijadikan momentum untuk membenahi unit usaha milik pemerintah tersebut melalui pendekatan profesional. Tidak cukup hanya dengan peningkatan hirarki kewenangan, tetapi perlu perombakan mendasar yang terukur dan tersistem secara holistik. Profesionalisme harus menjadi acuan dalam memperbaiki kinerja berbagai unit usaha tersebut. Dengan profesionalisme, berbagai aspek dalam pengelolaan suatu unit usaha harus menjadi perhatian.

Pertama, aspek efisiensi dan produktivitas. Dalam hal ini, perlu ada keseimbangan yang proporsional antara *input* dan *output* dalam suatu



proses produksi untuk dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ini yang seringkali menjadi kendala utama dalam mengelola unit usaha plat merah. Jumlah tenaga kerja berlebih dengan kualitas kurang memadai merupakan salah satu contoh klasik. Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit juga persoalan lain yang sebenarnya disadari pula oleh para birokrat tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak karena aturannya seperti itu.

Kedua, aspek manajemen dan organisasi. Untuk



mengoptimalkan pengelolaan unit usaha, debirokratisasi melalui perampingan organisasi perlu secepatnya dilakukan. Berbagai perubahan atau penyempurnaan hirarki kewenangan di seluruh unit usaha milik pemerintah sudah sewajarnya mengacu pada upaya perbaikan manajemen dan organisasi menuju profesionalisme. Penentuan pucuk pimpinan yang mempunyai kompetensi dan kemampuan manajerial tinggi menjadi keharusan, walaupun ini juga bukan perkara mudah karena intervensi dari banyak kelompok kepentingan. Sialnya lagi, bila akhirnya yang terpilih adalah orang yang tidak mampu apalagi kompeten.

Ketiga, aspek kepemimpinan. Ini sangat menentukan dalam memotivasi staf di lingkungan unit usaha tersebut. Tidak semua pemimpin punya jiwa kepemimpinan yang baik. Pendidikan formal tidak ada hubungan sama sekali dengan kemampuan memimpin. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan tidak berarti semakin tinggi pula kemampuannya dalam memimpin. Walaupun ada faktor genetik (bakat), kemampuan memimpin (*leadership*) dapat diasah melalui berbagai pelatihan. Pergaulan juga sangat mempengaruhi kepemimpinan seorang pemimpin. Dalam konteks ini, latihan kepemimpinan yang diberikan oleh profesional (biasanya dari kalangan industri) menjadi krusial untuk dilakukan secara periodik bagi para staf di suatu unit usaha.

Selanjutnya, aspek keberlanjutan dalam pengelolaan suatu unit usaha. Keberadaan unit usaha itu memang penting dipertahankan sehingga perlu ada jaminan seluruh aspek tersebut dapat dijalankan secara berkelanjutan. Hal ini penting karena seringkali upaya perbaikan dan penyempurnaan suatu unit usaha milik pemerintah dilakukan melalui pendekatan proyek, dan biasanya dananya diperoleh dari pinjaman luar negeri. Begitu proyek berakhir, berakhir pula segalanya. Apakah fenomena semacam ini tetap dipertahankan? Tentunya tidak. Perlu trik-trik tertentu untuk dapat menjamin keberlanjutan suatu sistem yang baik dan profesional.

Untuk tujuan yang sama, saat ini perguruan tinggi negeri juga sedang berbenah. Dengan pemberian status Badan Hukum Milik Negara (BHMN); maka UI, IPB, ITB, dan UGM diberi otonomi lebih besar untuk mengelola



rumah tangga masing-masing walaupun menimbulkan keresahan akibat adanya isu kenaikan SPP di PTN. Di jajaran pemerintahan, UU Otonomi Daerah telah diterapkan walaupun ada dampak kurang baik seperti merajalelanya korupsi oleh pihak eksekutif dan legislatif di daerah. Itu semua sangat alamiah dalam konteks pembelajaran melalui perubahan ke arah yang lebih baik. Yang terbaru, rencana swastanisasi pengelolaan KA Jabotabek dengan menggandeng perusahaan Korea Selatan dalam rangka profesionalisme. Bagaimana dengan pengelolaan unit usaha di sektor peternakan? Jawabannya ada di tangan para *elite* Deptan termasuk Ditjen Bina Produksi Peternakan.

Maret 2005

6. Refleksi Simposium Vienna 2009

Tema yang diambil dalam simposium internasional pada tanggal 8-11 Juni 2009 di Vienna Austria adalah “produksi dan kesehatan ternak secara berkelanjutan”. Tema ini tampak diorientasikan bagi negara-negara berkembang dan lebih difokuskan pada sumberdaya ternak lokal. Dari banyak paparan yang disampaikan pembicara, sudah menjadi kesimpulan umum bahwa ternak lokal di negara berkembang memiliki produktivitas rendah, pertumbuhan lamban, penggunaan pakan tidak efisien, namun memiliki daya tahan tinggi terhadap penyakit atau terhadap kondisi buruk.

Benarkah ternak lokal berproduktivitas rendah? Dibandingkan dengan ternak mana? Dibandingkan dalam lingkungan seperti apa? Dan dibandingkan dalam pola pemeliharaan seperti apa? Kalau pembandingnya adalah ternak dari negara maju yang kondisi lingkungan dan pola pemeliharaannya sangat terencana, tersistem, dan terkontrol, kesimpulan tersebut di atas sangat benar. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah itu perbandingan yang setara (*apple to apple comparison*)? Jelas bukan!! Oleh karena itu, perlu ada pendekatan tersendiri untuk mengetahui atau membandingkan kinerja atau produktivitas ternak lokal di negara



berkembang dan ternak *exotic* di negara maju dengan segala latar belakang yang mendasarinya.

Selama ini terkesan bahwa dalam mengevaluasi ternak lokal yang dipelihara secara tradisional di berbagai negara berkembang, digunakan teori yang dikembangkan atas dasar pengalaman atau hasil penelitian peternakan di negara maju. Jelas tidak tepat. Jangan-jangan teori yang dikemas dalam *textbook* tebal yang menjadi acuan para pembelajar kita di luar negeri sana bisa dijungkir-balikkan dan tak layak pakai dalam kondisi peternakan di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tugas para ilmuwan di bidang peternakan di Indonesia untuk mengembangkan teori yang berlandaskan kondisi lokal Indonesia yang jelas berbeda dengan kondisi negara lain. Yang perlu kita pelajari dari belajar di luar negeri (negara maju) adalah pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan teori itu sendiri. Ini memang bukan perkara gampang dan perlu dikerjakan secara evolutif (tahap demi tahap secara terus menerus).

Memiliki acuan sendiri berupa tiga aset non teknologi yaitu (1) sumberdaya ternak lokal, (2) ekologi lingkungan, dan (3) sosial budaya komunitas merupakan prasyarat penting untuk dapat menerapkan program produksi dan kesehatan ternak secara berkelanjutan di Indonesia. Keberlangsungan hidup sumberdaya ternak lokal secara optimal akan dapat terjadi jika dalam lingkungan yang sesuai dan dikelola oleh sumberdaya manusia yang memiliki kebiasaan beternak. Sebagai contoh, sulit mengandalkan masyarakat pinggir pantai untuk menumbuh-kembangkan ternak sapi perah dengan produkitas tinggi karena (1) kebiasaan orang pinggir pantai adalah berlayar dan (2) suhu panas di pinggir pantai menghambat kenyamanan ternak sapi dalam menjalankan kehidupannya. Ini akan berbeda hasilnya jika ternak sapi perah dikembangkan di daerah pegunungan yang sejuk dengan kebiasaan orang-orangnya memang mengolah lahan dan akrab dengan ternak. Oleh karena itu, perlu diperkuat adanya *animalculture* terlebih dahulu sebelum diintrodusir konsep *animalindustry*.

Itu refleksi pribadi saya dari salah satu diskusi menarik dan menjadi



perhatian saya dalam simposium yang diikuti oleh 488 peserta dari 86 negara termasuk Indonesia. Yang jelas keberhasilan pembangunan peternakan di Indonesia melalui produksi dan kesehatan ternak lokal secara berkelanjutan sangat tergantung pada komitmen dan keseriusan pemimpin bangsa Indonesia saat ini dan masa mendatang. Oleh karena itu, dalam suasana pilihan presiden RI tanggal 8 Juli 2009 mendatang, saya berharap semoga siapapun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI nanti akan dapat bersikap amanah dan memiliki keberpihakan kepada kaum lemah, serta tentunya pro-rakyat. Sikap pemimpin yang demikian itu perlu terus dilanjutkan oleh siapapun pemimpinnya; dan yang lebih penting lagi, siapapun pemimpinnya harus bertindak lebih cepat dan lebih baik lagi bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia bangsa Indonesia.

Juli 2009

7. Membangun Militansi Ilmuwan Peternakan Indonesia

Belum lama ini telah terlahir Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia (HILPI) atau dalam bahasa inggrisnya *Animal Scientist's Society of Indonesia* (ASSI). Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disahkan dalam Kongres I tersebut, anggota biasa HILPI adalah Ilmuwan berkualifikasi pendidikan minimal S2 (master) yang menekuni bidang Peternakan (mulai dari aspek hulu sampai hilir, termasuk aspek peternak dan sumberdaya pendukungnya). Ilmuwan di luar definisi tersebut diklasifikasikan sebagai anggota luar biasa. Dengan demikian, yang berpotensi menjadi anggota biasa tidak hanya berlatar belakang pendidikan sarjana peternakan saja tetapi juga dokter hewan, sarjana biologi, sarjana statistik, sarjana pertanian, sarjana teknologi pertanian, sarjana sosial ekonomi, sarjana sosiologi, dan lain lain.

Ada beberapa ragam komentar atas kelahiran HILPI, namun ada dua komentar yang menggelitik. Pertama, di *facebook*, seorang *facebooker*



mengomentarinya dengan menulis "*semoga independen dan memiliki bargaining position kuat, bisa memberikan dukungan politik bagi ilmuwan untuk lebih berani mengumumkan sendiri hasil penelitiannya*".

Komentar ini menunjukkan bahwa selama ini terkesan Ilmuwan kurang berani menyampaikan hasil penelitiannya dan tidak memiliki posisi tawar cukup kuat. Jika betul demikian, tugas himpunan Ilmuwan semacam HILPI ini yang harus mampu menunjukkan kepada khalayak bahwa ilmuwan memiliki posisi tawar kuat dan memiliki keberanian menyampaikan pendapatnya dan hasil penelitiannya kepada publik. Cara menunjukkannya tentu saja bukan dengan berkunjung ke sana kemari untuk memperoleh pengakuan eksistensi HILPI tetapi dengan cara kerja keras untuk menghasilkan karya intelektual yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas khususnya komunitas Peternakan.

Kedua, seorang dosen yang berstatus mahasiswa S3 di IPB berceloteh "*wuihh ilmuwan berhimpun pak? Emangnya kenapa, tanya saya. Terasa angker pak nama Ilmuwan*". Dari mimik wajahnya ketika berkomentar tadi tampak ada kesan bahwa apakah dosen seperti kita ini layak disebut Ilmuwan?. Tampak ada rasa minder disebut ilmuwan. Mungkin saja keminderan itu benar adanya karena sangat jarangnya karya intelektual monumental yang dihasilkan akademisi atau peneliti di bidang Peternakan. Ini mungkin membebani pikiran para dosen/peneliti disebut Ilmuwan. Fakta ini juga menjadi tantangan dan tugas terberat HILPI yaitu meningkatkan rasa



percaya diri ilmuwan dalam pergaulan di level nasional maupun internasional. Tentu saja cara yang digunakan untuk memoles rasa percaya diri Ilmuwan tidak melalui kursus personalita agar mampu membawa diri dalam berbagai suasana tetapi dengan cara mengisi rasa ingin tahu pikiran universal kita melalui pencarian dan penggalian ilmu pengetahuan terbaru baik melalui penelitian sendiri di dalam negeri atau dari hasil penelitian orang lain di luar negeri.

Dua komentar tersebut di atas merupakan hal mendasar sekali dan sangat filosofis. Itu harus dijawab HILPI melalui berbagai upaya serius yang dilandasi sikap militan untuk meningkatkan kualitas penelitian di bidang Peternakan di Indonesia. HILPI perlu bekerja sama dengan otoritas bidang penelitian di dalam negeri untuk secara optimal menghasilkan karya intelektual yang monumental; menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian asing untuk membuka akses bagi anggotanya untuk melakukan penelitian bersama; mempercepat proses alih iptek dari Negara maju ke Indonesia; dan yang lebih penting mendorong perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk memperkuat laboratorium sebagai basis utama bagi Ilmuwan untuk beraktivitas.

Oleh karena itu, HILPI yang telah lahir tersebut dimaksudkan untuk memperkuat soliditas dan jaringan antar Ilmuwan Peternakan yang tersebar di berbagai instansi pendidikan maupun instansi penelitian dalam rangka memacu perkembangan ipteks Peternakan di Indonesia. Hanya dengan kekompakkan dan komunikasi intensif antar Ilmuwan akan terbangun militansi Ilmuwan untuk melahirkan ide inovatif dan karya produktif yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia khususnya komunitas Peternakan. Semoga niat baik dari para Ilmuwan tersebut mendapat rahmat dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Maret 2011





E

Revitalisasi Peran Kelembagaan



1. Peternakan Perlu Koalisi

Pesta demokrasi (pemilu) bernuansa baru di negara ini ternyata menguras pikiran banyak orang, mulai dari tukang sapu sampai profesor. Maklum, pesta demokrasi yang melibatkan jutaan orang ini sangat menentukan masa depan bangsa. Tidak mengherankan apabila siapapun orangnya, apakah ia seorang tukang becak, penjual sayur, tukang ojek, supir angkot, anak kandang, pengusaha, birokrat, satpam, mahasiswa, dosen, apalagi politisi tidak henti-hentinya membicarakan agenda masa depan bangsa ini.

Di antara banyak obrolan tentang pemilu, ada dua pertanyaan dari dua orang berlatar belakang berbeda. *Pertama*, "Kok isu flu burung kagak terdengar lagi?" tanya seorang satpam. Pertanyaan satpam tersebut, sedikit membuat penulis agak *belepotan* untuk menjawabnya. Walaupun bukan seorang politisi, dengan sedikit politis, saya menjawab: "Mohon dimaklumi saja, kan budaya di Indonesia sudah begini". Persoalan satu belum tuntas, persoalan lain datang untuk menutupi persoalan sebelumnya yang belum tuntas". Dalam hati, pertanyaan satpam ini banyak benarnya. Sampai saat ini isu flu burung seperti hilang tertelan bumi semenjak digelarnya kampanye parpol, sampai-sampai dana kompensasi sebesar 212 miliar rupiah yang dijanjikan Jusuf Kalla "terbawa angin" entah ke mana. Saya pun bingung harus menjawab apa kalau diuber pertanyaan semacam ini.

Kedua, pertanyaan dari seorang mahasiswa yang tidak kalah kritisnya, "Saya heran pak, semenjak reformasi hingga kini, kebijakan dunia peternakan sepertinya mengalami stagnasi dan tidak ada yang baru. Bagaimana tanggapan Bapak? Apa yang harus kita perbuat? "Stagnasi apa maksudmu?" saya balik bertanya. "Stagnasi, karena saya melihat tidak adanya gagasan-gagasan baru dan populis yang ditawarkan oleh pengambil kebijakan," kata mahasiswa beropini.

Memang persoalannya agak kompleks. Secara umum kita bisa melihat sejak pemerintahan orde baru sampai rezim saat ini, petinggi kita masih memandang sebelah mata terhadap dunia pertanian termasuk peternakan.

Di dalam lingkup pertanian sendiri, seorang Dirjen merasa tidak punya



teman untuk memperjuangkan perbaikan dunia peternakan. Sepertinya para pemimpin bangsa ini tidak menyadari bahwa produk peternakan itu sangat penting sebagai sumber protein hewani untuk menghasilkan bangsa Indonesia yang cerdas! Kalau SDM-nya tidak cerdas, selamanya bangsa Indonesia selalu kalah bersaing dalam hal apapun.

Saya heran, mengapa itu semua terjadi? Adakah yang salah? Apa yang harus diperbuat oleh para pengampu kepentingan (*stakeholder*) di bidang peternakan?

Kalau dipikir secara jernih dan melihat ke belakang sejenak, jika dibandingkan dengan sektor lain, sektor peternakan jauh lebih unggul dan mempunyai kompetensi. Ini terbukti saat krisis ekonomi dan moneter menerpa bangsa ini. Sektor peternakan dapat bertahan dari badai krisis 1998. Ini disadari dan diakui oleh banyak pihak. Jadi, mengapa terjadi stagnasi di sektor ini sebagaimana ungkapan mahasiswa tadi?

Tampaknya *bargaining position* para pelaku peternakan mulai dari birokrat, praktisi, asosiasi, akademisi, dan lain-lain masih sangat lemah hingga kini. Terbukti dari berbagai kegiatan yang dilakukan para pelaku peternakan sangat jarang terpublikasi dengan baik di berbagai media massa umum, kecuali media massa yang *concern* di profesi kita. Di samping itu, pemikiran para pelaku di bidang peternakan masih bersifat parsial dan belum mempunyai kesamaan visi. Hampir semua gagasan yang muncul didasari oleh kepentingan masing-masing. Sampai-sampai masih banyak pihak yang tidak peduli terhadap RUU Peternakan dan Kesehatan yang sedang digodok. Dan saya kira masih banyak hal lagi yang membuat stagnasinya sektor peternakan.

Mungkin sudah saatnya kita membangun koalisi bersama. Suatu koalisi yang menitikberatkan pada proses pembelaan sektor peternakan ini dari ketermarjinalannya. Koalisi ini mencakup berbagai komponen yang *concern* dan punya komitmen terhadap dunia profesi kita, seperti para praktisi, pengusaha, asosiasi, organisasi profesi, birokrat, akademisi, dan mahasiswa. Koalisi bersama ini harus dilandasi kemauan dan itikad baik yang dibingkai dengan kesetaraan. Setara dalam berargumen, setara dalam



pengambilan keputusan, dan setara dalam segala hal.

Tidak ada yang memperhatikan nasib dan atau kemajuan sektor ini selain kita sendiri yang *concern* dalam dunia peternakan. Kalau kita berpikir mau maju, maka peternakan pasti akan maju. Demikian pula sebaliknya, kalau kita sendiri hanya saling menyalahkan, hancurlah dunia peternakan kita. Modal awal untuk melakukan koalisi bersama sudah ada, yaitu deklarasi hari lahir, hari kebangkitan, dan bulan bakti peternakan & kesehatan hewan yang ditandatangani 24 unsur pada 26 Agustus 2003. Tanpa tindakan konkret dari kita semua, deklarasi yang dimotori pihak birokrat hanya melahirkan gebyar tanpa makna! Jadi, tunggu apa lagi? Selamat berkoalisi membangun sektor peternakan demi pencerdasan anak bangsa di masa depan.

Mei 2004

2. Di Balik Rumor Sukses Dirjen

Beberapa bulan lalu hingga saat ini, berita tentang adanya pergantian (sukses) Dirjen Bina Produksi Peternakan masih terus bergema. Konon di Gedung C; Deptan; dan di tempat kebijakan-kebijakan peternakan dibuat, perpisahan antara Pak Sofjan (Dirjen sekarang) dengan para stafnya telah dilakukan. Persiapan acara serah terima jabatan juga santer terdengar, tetapi sampai tulisan ini dibuat sukses belum terjadi.

Berbagai pihak seperti pengusaha, peternak, asosiasi, dan kalangan akademisi menjadi ingin tahu ada apa di balik berita (rumor) itu? Perdebatan tentang sukses di antara insan peternakan pun menjadi menarik. Beberapa analisis pun berkembang sampai ke yang berbau politis. Pendapat yang terkesan politis senantiasa menghubungkan pergantian Dirjen dengan beberapa kebijakan dalam konteks kekinian. Maklum, Indonesia saat itu lagi dihebohkan dengan berbagai isu panas seperti kasus flu burung, kenaikan harga pakan unggas, dan penyelundupan produk peternakan (sapi dan unggas). Jadi, para insan peternakan menduga-duga, rumor



suksesi Dirjen diidentikkan dengan kinerja birokrat di Gedung C dalam menangani berbagai masalah peternakan khususnya flu burung dan dampak ikutannya.

Seiring berhembusnya rumor suksesi tersebut di tengah-tengah masyarakat peternakan, beberapa asosiasi dan institusi lainnya mengirim surat resmi kepada Menteri Pertanian (Mentan). Intinya menyampaikan gagasan agar calon Dirjen (siapapun orangnya) diberi kesempatan pada suatu forum untuk menyampaikan visi dan misinya dalam membangun peternakan di Indonesia. Diharapkan forum tersebut terdiri dari seluruh *stakeholder* di bidang peternakan seperti asosiasi, organisasi profesi, himpunan peternak, peneliti, akademisi, dan birokrat. Forum tersebut tidak perlu harus menentukan siapa yang layak menjadi Dirjen, tetapi menghasilkan masukan penting bagi Mentan sebelum memutuskan pengganti Dirjen, si orang nomor satu di bidang peternakan.

Gagasan tersebut sangat baik untuk kemajuan dunia peternakan dan tidak dimaksudkan untuk mengobok-obok “jabatan karir” para birokrat di sana karena penentuan posisi Dirjen telah ada prosedur bakunya. Namun gagasan penyampaian visi dan misi kandidat Dirjen mengandung nilai lebih dalam upaya membangun bidang peternakan di masa mendatang.

Penulis ingin merujuk pendapat White, salah satu ilmuwan sosial, tentang adanya tiga pilar dalam penegakan *civil society*, yaitu negara, ekonomi, dan individu. White berpendapat, *civil society* terwujud apabila ada keseimbangan peran dan akses terhadap fungsi-fungsi sosial ketiga pilar tersebut. Dalam konteks dunia peternakan, Dirjen adalah perwujudan dari wakil negara, sedangkan para pengusaha adalah perwujudan pilar ekonomi, dan kalangan akademisi/peneliti/mahasiswa/para peternak adalah perwujudan pilar individu-individu *civil society*. Meskipun demikian, sosok pribadi seorang Dirjen dan pengusaha dapat saja mewujud sebagai individu dalam konteks lain *civil society*.

Jadi, gagasan penyampaian visi dan misi para kandidat Dirjen kepada masyarakat peternakan itu sangat penting dan perlu diapresiasi. Ada beberapa alasan untuk itu. *Pertama*, karena visi adalah suatu cita-cita



seorang calon pemimpin dalam memajukan bidang yang dipimpinnya, maka visi kandidat Dirjen diharapkan merupakan penjelmaan cita-cita bersama masyarakat peternakan untuk memajukan dunia peternakan. Karena itu, visi seorang Dirjen ke depan semestinya bukan cerminan cita-cita individu dan visi tersebut harus tercermin dalam sikap, tindakan, serta ucapannya ketika penyampaian visi di hadapan *stakeholder* peternakan.

Kedua, walaupun Dirjen adalah jabatan karir bagi birokrat di pemerintahan, tidak ada salahnya jika sebelum sosok orang nomor satu ditentukan Mentan, visi dan misinya dapat diketahui masyarakat peternakan. Dengan demikian, kalangan non pemerintahan dapat memberi kontribusi atau masukan tentang ke mana dunia peternakan akan dibawa.

Ketiga, ajang penyampaian visi dan misi kandidat Dirjen dapat memadukan pemikiran dan keinginan seluruh elemen masyarakat peternakan untuk menentukan langkah bersama dalam rangka menyelesaikan beragam persoalan yang menghimpit dunia kita saat ini serta memajukan potensi peternakan.

Keempat, kita memulai sebuah sejarah baru dalam menentukan seorang pemimpin yang diharapkan dapat menjadi pengayom, pelindung, dan penampung aspirasi masyarakat peternakan dalam mewujudkan industri peternakan yang maju dan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.

Pepatah bijak mengatakan, "hari ini adalah refleksi masa lalu dan masa depan adalah refleksi hari ini". Artinya, kondisi peternakan saat ini tidak terlepas dari masa lalu dan kemajuan dunia peternakan ke depan sangat tergantung kemauan kita saat ini untuk bersama-sama memperbaiki dan membangun dunia peternakan. Jika forum penyampaian visi dan misi itu benar-benar terjadi, kita perlu bersyukur dengan adanya *gonjang-ganjing* terjadinya suksesi Dirjen Bina Pronak. Paling tidak kita telah memberikan loncatan pemikiran pada upaya melibatkan masyarakat untuk andil dalam menentukan perjalanan pembangunan peternakan ke depan.

Juni 2004



3. Dirjen Baru dengan Segudang “PR”

Akhirnya “rumor” pergantian Dirjen Bina Produksi Peternakan jelas sudah. Awal Juni lalu, posisi orang nomor satu di bidang peternakan telah diserahterimakan oleh Menteri Pertanian RI dari Dr. Drh. Sofjan Sudardjat, MS ke Prof. Dr Drh. Wasito, M.Sc. (Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UGM). Suara-suara sumbang maupun merdu yang meramaikan rumor tersebut berakhir juga. Inikah salah satu bentuk demokratisasi di peternakan kita? Lumrah ada pro-kontra semacam itu.

Ada berbagai masalah di tengah isu pergantian Dirjen sampai pada pelantikan Dirjen baru tersebut. Cobalah kita kembali menilik kembali *file-file* berita yang masih segar di berbagai surat kabar nasional terkait dengan bidang peternakan. Setidaknya ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih berkecamuk di benak kita. Mengapa kasus impor ilegal berbagai produk peternakan masih hadir menghiasi dunia peternakan tanah air ini? Mengapa kasus AI juga masih bergema di Propinsi Sejuta Sungai (Kalmantan) atau mungkin di tempat lainnya juga, padahal kasus BSE di USA sana dalam seminggu tuntas...tas....tas? Bagaimana pula nasib ternak (sapi) lokal kita yang tampaknya terdesak oleh keberadaan ternak sapi bakalan impor?

Setiap orang bisa menjawab pertanyaan itu dengan versinya masing-masing, sedangkan benar-tidaknya jawaban tersebut, penulis juga tidak tahu. Untuk kasus AI, biarlah rekan-rekan dokter hewan yang lebih kompeten menjawabnya. Sebenarnya kasus impor ilegal gampang dilacak, tergantung mau atau tidak melacak dan menyelesaiannya secara tuntas. Untuk impor sapi legal, yang kata salah seorang bupati di Jawa Tengah menyebabkan terpuruknya nasib peternak sapi lokal, memang dilematis. Apabila kita melakukan impor sapi secara terus menerus, tentu saja yang paling untung adalah peternak sapi Australia. Namun demikian, kalau tidak impor, nyatanya daging sapi sulit diperoleh. Jadi? Inilah salah satu tugas Dirjen baru.

Jelas posisi pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pronak) memegang peranan yang sangat penting. Pemerintah selayaknya tidak



hanya merumuskan dan melaksanakan program yang telah dirancangnya, akan tetapi juga harus memberikan contoh “tindakan konkret” terhadap berbagai kasus yang menghimpit dunia peternakan kita saat ini. Kasus impor daging asal India yang beritanya dirilis beberapa media beberapa bulan lalu seyogyanya diusut sampai ke akar-akarnya. Ini penting karena India belum termasuk negara bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) sedangkan upaya Indonesia membebaskan diri dari PMK perlu waktu hampir 100 tahun. Ini jelas bukan rentang waktu yang singkat!

Di samping itu, pemerintah harus mempunyai komitmen untuk menumbuh-kembangkan ternak lokal Indonesia, khususnya sapi. Penyediaan bibit sapi lokal perlu mendapat perhatian super serius daripada kita menyesal menjadi negara pengimpor sapi terbesar di dunia di kemudian hari. Apabila untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan untuk mengalokasikan 20% APBN bagi sektor pendidikan, maka pada sektor peternakan, penyediaan bibit inilah yang penting mendapat prioritas. Mengapa? Protein hewani sebagai sumber esensial pencerdas bangsa Indonesia harus selalu tersedia selama Indonesia masih ada.

Berkaitan dengan maraknya impor daging ilegal dan produksi sapi lokal yang terus menurun, berbagai langkah strategis perlu segera dilakukan melalui program perbibitan yang jelas dan terarah. Perbibitan, khususnya sapi potong, memang perlu waktu lama dan dana cukup besar. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah karena pelaku usaha peternakan sapi didominasi oleh peternak kecil.

Sesungguhnya masih banyak lagi permasalahan yang menjadi “hantu” bagi kalangan peternakan dan pengambil kebijakan pada khususnya. Masalah pakan yang juga masih bergantung dari sumber-sumber luar negeri adalah satu di antaranya. Kalau “hantu-hantu” tersebut tidak segera dieliminasi satu per satu, maka “hantu” tersebut akan terus memperdayai kita semua.

Sosok Dirjen Bina Pronak memegang peran yang sangat strategis untuk membawa masa depan peternakan kita. Status Dirjen saat ini tidak saja



menambah panjang daftar prestasi Prof. Dr. Drh. Wasito, tetapi segudang "PR" juga siap membebannya dan perlu dituntaskan secepat mungkin. Mengingat Dirjen manusia biasa dan tentu saja buka "dewa" yang dalam sekejap bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, pejabat baru ini perlu dibantu oleh berbagai pemikiran cerdas dan tindakan konkret dari seluruh pelaku peternakan. Saya yakin Bapak Dirjen baru ini sangat terbuka dengan berbagai masukan serta bersedia secara bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghimpit dunia peternakan saat ini. Selamat bertugas Pak Dirjen!.

Juli 2004

4. Organisasi Peternak Kuat, Semua Kuat

Di tengah kesibukan tim sukses pasangan SBY-Kalla dan Mega-Hasyim melakukan *deal-deal* politik dengan berbagai elemen, komunitas lain (dunia perunggasan) khususnya para peternak juga sedang berjuang menentukan nasibnya di pinggiran-pinggiran Indonesia. Sama-sama sibuk, tetapi urusan Capres-Cawapres jauh lebih sering terpublikasi oleh media massa daripada urusan peternakan unggas.

Ada satu hal sangat penting yang perlu diketahui oleh siapa saja termasuk kedua pasangan Capres dan Cawapres tersebut, yaitu semangat peternak untuk selalu eksis dalam ikut membangun sektor peternakan. Penting diperhatikan karena selama ini peran peternak dalam membesarkan industri perunggasan nasional sering dibarengi dengan keributan yang hampir tidak ada habisnya.

Kasus flu burung yang sampai sekarang juga belum tuntas, langkanya DOC (*day-old chick*) pada suatu waktu, harga pakan yang tiba-tiba melonjak, serta harga ayam yang anjlok saat panen melimpah merupakan sederet contoh permasalahan. Tak jarang permasalahan tersebut melahirkan ketegangan antara peternak, pabrikan (industri pakan dan bibit), dan birokrat (pemerintah). Masing-masing pihak cenderung saling menyalah-



kan. Dan ada kesan, keributan tersebut tampaknya merupakan pertikaian antara peternak dengan kalangan pabrikan yang membuat pemerintah (birokrat) juga terseret.

Ironisnya, dari tahun ke tahun, kontribusi peternakan unggas dalam pembangunan pertanian semakin besar. Ke depan, apakah perkembangan dunia perunggasan di Indonesia harus selalu diikuti pula dengan keributan? Semoga tidak demikian lagi. Repotnya, dalam menghadapi permasalahan tersebut, tidak jarang suara peternak tidak selalu satu. Misalnya dalam kasus tingginya harga pakan yang mencuat satu-dua bulan lalu, Menteri Pertanian Bungaran pun dibikin pusing karena suara asosiasi peternak rupanya tidak sama. Padahal semua asosiasi mengklaim membawa aspirasi anggotanya. *"Kalau sudah begini, asosiasi mana yang harus aku dengarkan?"* kata Menteri Pertanian. *"Kalau kalian tidak bisa bersatu, selamanya posisi kau akan lemah,"* katanya lagi sebagaimana diceritakan seorang pejabat yang mendampinginya. Dengan kata lain, peternak akan kuat dan mempunyai posisi tawar tinggi apabila mereka dapat bersatu dalam membangun industri perunggasan.

Pada dasarnya, kuatnya posisi peternak menjadi harapan semua pihak karena semuanya merasa diuntungkan. Peternak yang jumlahnya ribuan dan tersebar di seluruh pelosok tanah air akan mampu menyediakan makanan bergizi (daging, telur, atau produk ikutan lainnya) bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Mereka akan memberi pakan kepada ternak ayamnya dalam jumlah besar sehingga industri pakan akan terus berproduksi. Lancarnya penyerapan produk perunggasan oleh masyarakat akan mengakibatkan lancarnya pula produksi bibit ayam (DOC). Ini mengakibatkan industri pakan dan bibit terus berproduksi sehingga mengurangi peluang terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan. Pedagang pun ikut bergairah apabila daya beli masyarakat terhadap produk peternakan cukup tinggi. Terakhir, pemerintah dengan jajaran birokratnya bisa tersenyum lebar karena antara produsen dan konsumen saling bersinergi dalam mencapai kenyamanan bersama.

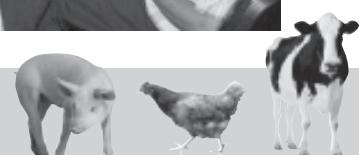
Perlu menjadi perhatian bersama bahwa dalam era global yang



semakin kompetitif, pesaing kita bukan lagi siapa pun yang berkiprah di komunitas perunggasan nasional tetapi produsen luar negeri yang terus ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial. Jadi, peternak harus menghimpun diri sehingga mempunyai kekuatan. Setidaknya unsur-unsur pabrikan-pemerintah-organisasi-peternak sama kuatnya.

Dalam menghimpun diri, organisasi peternak perlu mempunyai asas dan arah perjuangan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi anggotanya, serta memperjuangkan hak-hak anggotanya secara demokratis. Ini semua merupakan poin penting untuk mewujudkan kelembagaan perunggasan yang *solid* dan kuat di masa depan. Asas, strategi, dan arah perjuangan organisasi perunggasan perlu diorientasi ulang dan disesuaikan dengan tuntutan realitas yang terjadi hari ini dan masa depan nanti. Sementara itu, program kerja setidaknya bermuara pada kebutuhan anggota, sehingga kesan *top down* tidak menjadikan "sindrom" bagi organisasi ini ke depan.

Terakhir, karena organisasi peternak unggas bersentuhan dengan dunia usaha, sebaiknya dalam konteks ini, "keuntungan" bukan menjadi orientasi



utamanya. Yang lebih penting adalah menomorsatukan penguatan keorganisasian. Bermula dari suatu kekuatan, peternak bisa melakukan apa saja sepanjang hal itu menguntungkan anggota dan bangsa Indonesia. Semoga perkembangan perunggasan nasional tidak akan selalu dibarengi lagi dengan ribut-ribut. Amien...

Agustus 2004

5. Perlukah Dibentuk Departemen Peternakan?

Tanpa disadari dalam beberapa bulan terakhir ini, masyarakat peternakan cukup disibukkan dengan berbagai diskusi "beraroma intelektual" yang dilandasi semangat kebersamaan, kesetaraan, dan keterbukaan. Tidak hanya lembaga profesi atau asosiasi seperti ISPI, PDHI, APFINDO, dan PPUN sebagai pelaksana diskusi tersebut, pemerintah pun juga semakin membuka ruang untuk mencoba duduk bersama *stakeholder* peternakan guna mencari dan mengupas tuntas akar permasalahan dan penyelesaian dalam sektor peternakan.

Dari berbagai forum diskusi tersebut, prinsip keterbukaan dan kejujuran para *stakeholder* setidaknya memberikan kesan positif bahwa mereka ingin menyelesaikan masalah dan kemelut di peternakan selama ini dan kemudian membangunnya secara bersama-sama. Tidak dipungkiri lagi, insan peternakan (produksi ternak dan kesehatan hewan) sebenarnya telah memiliki *capital social* (modal sosial) yang patut dan harus ditumbuhkembangkan.

Yang menarik dari tradisi intelektual (baca: diskusi) tersebut adalah adanya gagasan mewujudkan departemen peternakan. Apakah gagasan ini dipengaruhi oleh iklim politik di negara kita yang baru pertama kali menyelenggarakan pemilihan presiden/wapres secara langsung? Apapun dasarnya, yang jelas gagasan ini tidak berlebihan untuk dipertimbangkan.

Gagasan perlunya ada departemen peternakan sesungguhnya sudah hadir sejak lama. Ini tidak saja menjadi komoditas pembicaraan di tingkat





elit birokrat, akademisi, dan praktisi, tetapi juga di tingkat diskusi-diskusi kecil mahasiswa dan peternak. Sayangnya, diskusi tersebut berhemus begitu saja dan belum menjadi pembicaraan di tingkat legislatif karena sangat jarang orang yang mengerti bidang peternakan di DPR.

Di alam demokrasi seperti ini, menjadi hak setiap orang maupun kelompok untuk dapat merealisasikan gagasan yang dibuat dan diimpikannya. Namun demikian, hal itu perlu pertimbangan matang karena beberapa alasan berikut. *Pertama*, kita tidak menginginkan departemen peternakan ini terwujud hanya dalam satu periode pemerintahan. Keberadaannya harus langgeng siapapun presiden yang menjabat dan apapun bentuk pemerintahannya. Insan peternakan harus dapat meyakinkan kepada publik bahwa tanpa produk peternakan jangan berharap rakyat bisa cerdas, pertumbuhan ekonomi rakyat bisa cepat, dan kesejahteraan sosial masyarakat bisa tercapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kajian secara holistik yang mencakup teknis, ekonomis, sosial, budaya, maupun politik.

Kedua, untuk mewujudkan gagasan departemen peternakan, insan peternakan harus dapat mencari suatu pemicu "berbau ideologis" yang mampu menggerakkan opini umum terhadap pentingnya penyediaan produk peternakan secara mandiri sebagai bahan pangan protein hewani



pencerdas bangsa, dan penyedia lapangan pekerjaan bagi penduduk di seluruh pelosok tanah air.

Ketiga, komitmen untuk mempertahankan kebersamaan dan kesetaraan di antara elemen masyarakat peternakan harus terjaga. Tidak ada satu elemen yang lebih tinggi dan lebih penting daripada elemen lain untuk mendorong sektor peternakan menjadi sektor andalan. Semua elemen mempunyai posisi yang tinggi dan penting.

Keempat, dalam menimba departemenisasi peternakan, seluruh insan peternakan harus mampu secara jernih melihat efisiensi dan produktivitas yang dihasilkan sektor peternakan dibandingkan sektor lainnya. Justifikasi untuk menentukan efisiensi dan produktivitas ini harus jelas dan terukur. Kita tidak dapat selalu beranggapan sektor kita sendiri yang penting dan sektor lainnya tidak penting hanya berdasarkan pada pendapat kualitatif yang cenderung subyektif. Ini watak ego yang harus dihilangkan bila berpikir untuk kepentingan nasional.

Dengan dinamika politik bangsa Indonesia sampai hari ini, adakah peluang mewujudkan departemen peternakan? Bagi kita insan peternakan, tidak mudah untuk menjawabnya secara obyektif. Bagi mereka di luar peternakan, mungkin sangat jelas jawabannya, yaitu "tidak perlu". Wacana pembentukan peternakan memang mudah dibicarakan dan didiskusikan, tetapi perlu kerja keras dan keseriusan seluruh insan peternakan membuktikan kepada publik secara obyektif tentang perlunya seorang Menteri Peternakan di Indonesia untuk selamanya!

Oktober 2004

6. Dualisme Birokrasi Peternakan

Banyak harapan di balik terpilihnya "SBY" dan "JK" sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Republik ini. Harapan tersebut sangat beragam, misalnya kaum miskin berharap agar pemerintahan baru lebih memperhatikan kondisi kemiskinan yang mereka alami saat ini. Kaum menengah



ke atas termasuk pengusaha berharap agar pemerintahan baru memperhatikan kondisi keamanan agar usaha mereka dapat berjalan dengan baik. Kaum akademisi berharap pemerintahan "SBY" dan "JK" memfokuskan dunia pendidikan yang lagi "di persimpangan jalan", dan masih banyak harapan lagi yang dinantikan. Lalu harapan apa yang dinantikan masyarakat peternakan dari kedua pemimpin tersebut?

Pertanyaan ini tentunya dikembalikan kepada kita semua yang sedikit-banyak mengetahui tentang luar dalamnya peternakan. Satu di antaranya tentang kondisi birokrasi peternakan yang tampaknya perlu diperbaiki sehingga dapat lebih efektif membangun sektor peternakan. Hal ini penting karena berkaitan dengan penentuan regulasi yang akan menuntun perjalanan nasib sektor ini ke depan.

Ada "dualisme birokrasi". Pada tataran nasional, birokrasi sektor peternakan di bawah kontrol Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan yang berorientasi hanya pada peningkatan produksi. Padahal sektor peternakan bukan hanya masalah produksi. Sementara itu, pada tataran daerah, birokrasi sektor peternakan di bawah naungan birokrasi yang begitu beragam, seperti Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehewanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan bahkan ada yang tidak mempunyai legitimasi dinas apapun. Pada tataran daerah, kehadiran birokrasi peternakan mempunyai orientasi beragam pula yang harus disesuaikan dengan kebijakan kepala daerahnya masing-masing. Lalu apa dampak terjadinya "dualisme birokrasi" bagi kemajuan sektor peternakan?

Rasanya perlu penelitian untuk menjawabnya! Namun secara logika rasional, "dualisme birokrasi" ini akan dapat berdampak terhadap kemandekan pembangunan sektor peternakan. Birokrasi peternakan di pusat dengan penyempitan nama "Ditjen Bina Produksi Peternakan" hanya berwenang mengatur kebijakan produksi, sedangkan yang mengatur pengolahan dan pemasarannya adalah ditjen lain. Jika kedua dirjen yang memimpin instansi tersebut tidak mempunyai kesamaan visi dalam membangun sektor peternakan, apa jadinya? Sudah ada beberapa kasus yang





menunjukkan betapa seorang Dirjen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengurus keributan yang seharusnya tidak perlu (baca: misalnya, buku "Gundah Hati Seorang Dirjen").

Sementara itu, di daerah fungsi dan tugas pokok birokrasi di sektor peternakan terjebak dalam kepentingan masing-masing kepala daerahnya. Jika kepala daerah yang bersangkutan mempunyai komitmen terhadap kemajuan dunia peternakan, maka bisa jadi sektor ini akan berkembang. Namun jika sebaliknya, maka kemandekan terjadi pada sektor ini.

Realitas birokrasi yang demikian ini tampaknya perlu segera diperbaiki. Ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan baru untuk mendorong kemajuan sektor peternakan. *Pertama*, makna peternakan perlu dipandang secara lebih luas sehingga kehadiran birokrasi peternakan tidak menempatkan sektor peternakan hanya kepada persoalan produksi, tetapi mencakup persoalan hulu sampai hilir. Ini harus ditangani dalam satu komando (setidaknya setingkat Ditjen). *Kedua*, adanya realitas orientasi regulasi yang berbeda antara pusat dan daerah untuk memajukan sektor peternakan, maka tidak ada salahnya jika birokrasi peternakan tersentralisasi ke dalam bentuk badan tersendiri, misalnya Badan



Koordinasi Pembangunan Peternakan Nasional atau sejenisnya. *Ketiga*, biarkan kondisi saat ini berjalan seperti apa adanya dan kita semua (*stakeholder* bidang peternakan) mendiskusikan bentuk birokrasi peternakan yang ideal dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Yang pasti, gejala dualisme birokrasi yang dapat menyebabkan kemandekan sektor peternakan perlu dicari solusinya. Jika saja kita tak tersadarkan dengan kondisi hari ini, jangan berharap adanya kemajuan sektor peternakan. Yang terjadi bisa sebaliknya. Kemandekan akan terus menghantui pembangunan peternakan ke depan. Semoga tidak demikian!

November 2004

7. Reorganisasi Birokrasi Peternakan

Dari sumber yang dapat dipercaya, ada usulan untuk membentuk direktorat baru di lingkungan Ditjen Bina Pronak dengan nama *Direktorat Pengawasan Obat dan Pakan*. Bagi sementara pihak, usulan itu mungkin sangat realistik. Namun pihak lainnya berpendapat, hal tersebut terlalu berlebihan. Terlepas diterima atau tidaknya usulan tersebut oleh pemerintah (dalam hal ini Departemen Pertanian), isu yang lebih penting untuk diangkat adalah struktur organisasi saat ini. Sudahkah struktur organisasi di Ditjen Bina Pronak dapat melayani masyarakat dan *stakeholder* di bidang peternakan dan kesehatan hewan secara efisien dan efektif?

Pemerintah sebagai fasilitator (bukan aktor) di bidang peternakan dan keswan sudah sepatutnya menempatkan posisinya secara tepat sehingga dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diinginkan oleh "aktor" dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakannya. Sang aktor adalah peternak berskala kecil yang jumlahnya jutaan jiwa dan pengusaha besar di bidang peternakan dan keswan yang jumlahnya sangat sedikit tetapi asetnya besar. Para aktor itu yang sebenarnya tahu betul tentang ternak, bukan fasilitator, apalagi komentator. Jadi, bagi pemerintah, yang terpenting adalah memfasilitasi para aktor tersebut dengan baik, adil,



dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Mengacu pada filosofi tersebut, mungkin pembentukan *Direktorat Pembinaan dan Pemberdayaan Peternak Kecil* yang secara khusus menangani permasalahan para peternak kecil menjadi relevan. Tidak hanya terkait dengan peternak sapi atau peternak ayam, tetapi peternak untuk setiap komoditas ternak. Direktorat ini harus mampu menjadi representatif yang dapat diandalkan bagi para peternak. Di sisi lain, untuk dapat meningkatkan daya saing dalam kancah internasional, pembentukan *Direktorat Pengembangan Industri Peternakan* yang secara khusus menangani para pengusaha peternakan berskala besar juga penting. Sebagaimana dirancang dalam RUU, definisi peternak kecil dan peternak besar dibedakan atas dasar perlu tidaknya izin dari pemerintah dalam melakukan usaha peternakan. Dengan demikian, kedua direktorat tersebut masing-masing mempunyai gambaran utuh tentang semua hal dalam usaha peternakan yang berbeda skala itu. Harapannya, semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat diperdebatkan terlebih dahulu antardirektorat karena masing-masing memahami benar permasalahan yang dihadapi kedua usaha peternakan tersebut. Hal ini juga akan menjadi taruhan pejabat, dapatkah masing-masing mengakomodasi kepentingan *stakeholder*-nya?

Terjaminnya kesehatan ternak dan produknya sebagai bahan pangan manusia tentu menjadi tugas pemerintah. Untuk menjamin kondisi tersebut, ketersediaan pakan dan obat secara berkecukupan juga menjadi tanggung jawab pemerintah seperti diamanatkan UU maupun RUU. Karena itu, Direktorat Kesehatan Hewan perlu lebih diperkuat tugas dan kewenangannya. Mungkin direktorat ini perlu diubah menjadi *Direktorat Kesehatan, Pengawasan Obat dan Pakan* yang khusus menjamin terwujudnya kondisi ternak sehat sehingga menghasilkan produk ternak sehat. Dalam rangka menjamin keamanan produk ternak sebagai bahan pangan untuk konsumsi manusia, *Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner* masih perlu dipertahankan keberadaannya.

Ditjen Bina Pronak memiliki berbagai unit usaha di bidang peternakan dan keswan seperti Pusvetma di Surabaya, Balai Inseminasi Buatan di



Singosari dan di Lembang, serta Balai Besar Perbibitan Ternak Unggul Sapi Perah di Baturaden. Seluruh unit tersebut diatur dan dikendalikan oleh satu Direktorat khusus, yaitu *Direktorat Pengembangan Unit Usaha Milik Ditjen Bina Pronak*. Hal ini dapat disetarakan dengan penanganan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah kendali Menteri Negara BUMN. Agar tidak kerdiri, nama Ditjen pun perlu dikembalikan ke nama semula, *Direktorat Jenderal Peternakan*, sehingga lebih luas cakupannya.

Wacana pembentukan lima direktorat itu sengaja digulirkan. Tujuannya untuk mencoba memberi masukan terhadap munculnya pendapat yang sering terdengar bahwa apa yang dikerjakan beberapa direktorat saat ini (Perbibitan, Budidaya, Penyebaran dan Pengembangan) dan Puspitnak tampak tumpang-tindih dan kurang jelas arah tujuannya masing-masing.

Februari 2005

8. IPTEKDA LIPI

Banyak data menyebutkan bahwa dari waktu ke waktu produktivitas ternak lokal di Indonesia mengalami penurunan. Ini terjadi hampir pada semua komoditas. Namun hal itu tidak terjadi pada beberapa komoditas yang sering digunakan sebagai bagian dari aktifitas budaya masyarakat. Sebagai contoh, domba Garut yang digunakan sebagai adu seni ketangkasan domba bagi komunitas masyarakat Jawa Barat; atau karapan sapi di Madura. Pengelolaan dan pemeliharaan pada ternak domba Garut aduan atau sapi karapan terkesan berlebihan, seleksi dilakukan secara ketat untuk memilih ternak terbaik. Situasi ini berbeda dengan ternak lokal lainnya yang dikelola secara apa adanya dan pada umumnya tanpa ada sentuhan teknologi.

Ironisnya di Indonesia ada lembaga penelitian, perguruan tinggi, badan atau balai pengkajian teknologi. Jumlahnya banyak dan tersebar di hampir semua propinsi di Indonesia. Jumlah pakarnya juga cukup banyak. Setiap



tahun hasil penelitiannya dipresentasikan di beberapa seminar nasional atau forum ilmiah lainnya. Tak jarang, para birokratpun ikut meneliti atau setidaknya mengkaji juga. Hasilnya juga dibahas dalam pertemuan nasional pula. Namun, tampaknya, apa yang dikerjakan oleh para peneliti dan birokrat lebih seringkali tidak menjawab persoalan yang dihadapi peternak di lapangan. Ada kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan oleh para peneliti atau akademisi dan persoalan praktis riil yang muncul di lapangan!

Adanya kesenjangan tersebut tampaknya disadari oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang kemudian meluncurkan program iptekda (ilmu pengetahuan dan teknologi daerah). Sebagai wujud kepedulian LIPI terhadap upaya pemerintah melakukan pemulihan kondisi perekonomian masyarakat pedesaan akibat terpaan krisis moneter tahun 1997, LIPI mengalokasikan dananya untuk program penelitian yang bersifat aplikatif dan harus melibatkan peternak kecil dalam pelaksanaannya. Dana iptekda diperebutkan melalui kompetisi yang pada pokoknya untuk melakukan usaha peternakan dan dana tersebut harus digulirkan dengan harapan menambah populasi ternak yang akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan komunitas peternak. Yang lebih penting lagi, aktifitas iptekda harus bermuatan teknologi dan ada proses alih teknologi ke masyarakat peternak.

Kegiatan penelitian aplikatif juga harus melibatkan pihak perguruan tinggi. Walaupun aktifitas ini memberikan banyak manfaat kepada para peternak, tak kurang juga ada komentar miring dari beberapa pihak yang berpendapat bahwa LIPI telah meninggalkan *khitahnya* sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang seharusnya bergerak di wilayah ilmu-ilmu dasar (*basic science*). Di kalangan internal LIPI sendiri pernah terdengar komentar bahwa kualitas penelitian di LIPI cenderung menurun karena disibukkan dengan aktifitas penelitian aplikatif yang dirasakan monoton dan kurang inovatif. Jelas ini merupakan tantangan buat para peneliti LIPI.

Tampaknya sulit juga posisi LIPI. Beraktifitas dalam rangka meng-aplikasikan iptek di daerah untuk mengurangi kesenjangan sebagaimana



disebut di atas dinilai "menyimpang" dari ranah kewenangannya. Sebaliknya, beraktifitas dalam kegiatan penelitian yang berorientasi pada kemajuan iptek modern agar tidak tertinggal di kancah global juga dikatakan "menyimpang" dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya.

Jadi? LIPI dan institusi lainnya yang bermitra dalam pelaksanaan program iptekda harus mampu membuktikan kepada masyarakat luas bahwa kegiatan iptekda telah memacu berkembangnya karya-karya inovatif berupa iptek yang berbasis sumberdaya lokal, selain itu juga meningkatkan produktivitas ternak maupun kesejahteraan peternak dan penelitiya. Berbekal idealisme dan totalitas membina peternak melalui program iptekda-LIPI, biasanya ada jalan menuju terciptanya karya karya inovatif yang bermanfaat bagi banyak orang. Semoga!

Agustus 2005

9. Menunggu Gebrakan Tim Baru Ditjen Peternakan

Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia dipastikan terus meningkat sehingga kebutuhan pangan juga pasti meningkat, termasuk pangan sumber protein hewani. Konsekuensi logisnya adalah populasi ternak sebagai sumber pangan protein hewani harus juga ditingkatkan jumlah dan kualitasnya. Populasi ternak di sini termasuk kelompok non ruminasia (diantaranya unggas dan babi), kelompok ruminansia (diantaranya sapi, kerbau, domba, kambing), dan kelompok lainnya.

Pemikiran tersebut di atas sebenarnya bukan barang baru dan sudah menjadi komitmen para penyelenggara peternakan di negeri ini. Berbagai proyek besar yang berorientasi pada upaya peningkatan populasi ternak dan penyebarannya telah dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Proyek ADB I dan ADB II atau IFAD serta proyek lainnya merupakan bentuk implementasi terhadap pemikiran tersebut di atas. Namun demikian, setelah bertahun-tahun berlangsung, hasil yang tampak saat ini adalah impor sapi bakalan yang hampir mencapai 400 ribu ekor per tahun, impor



daging (legal maupun illegal), impor bahan baku pakan khususnya untuk ternak non ruminansia, penurunan populasi sapi, kerbau, domba, kambing, atau bahkan kuda secara kuantitas maupun kualitas.

Kalaupun berbagai proyek tersebut dikatakan gagal, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk mengusut dan menelusuri siapa saja yang salah dan bertanggungjawab atas kegagalan tersebut. Yang jauh lebih penting adalah mempelajari dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai proyek tersebut secara jernih. Evaluasinya dilakukan tidak hanya oleh pemerintah saja tetapi oleh seluruh *stakeholder* di bidang peternakan. Hasilnya dijadikan sebagai acuan untuk membangun peternakan secara lebih profesional dan dapat dirasakan manfaatnya oleh anak-cucu kita pada generasi yang akan datang.

Era ketika dilaksanakan berbagai proyek tersebut di atas memang jauh berbeda dengan era saat ini. Perubahan sosial politik secara mendasar sejak runtuhnya pemerintahan Soeharto, perubahan perilaku masyarakat Indonesia yang cenderung lebih bebas berekspresi, perubahan situasi global yang syarat dengan persaingan, dan perubahan-perubahan lainnya menuntut profesionalisme dalam membangun semua sektor di Indonesia termasuk peternakan. Ini semua merupakan tantangan ke depan bagi "tim baru" Direktorat Jenderal Peternakan, yang terdiri atas seorang dirjen dan lima direktur yaitu Direktur Kesehatan Hewan, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktur Perbibitan, Direktur Budidaya Ruminansia, dan Direktur Budidaya Non Ruminansia, serta ditambah seorang Sekretaris Direktorat Jenderal.

Saat ini, yang pasti bangsa Indonesia pada umumnya dan komunitas peternakan pada khususnya menunggu gebrakan dan terobosan baru dari tim baru tersebut setelah sekian lama dunia peternakan didera berbagai persoalan besar. Flu burung yang akhirnya mendunia kejadiannya, ancaman masuknya paha ayam ke Indonesia dengan harga murah, pungutan retribusi pemerintah yang semakin membebani masyarakat maupun peternak, pengenaan pajak pertambahan nilai (ppn) produk peternakan yang kurang tepat sasaran, dan segudang permasalahan lain merupakan



pekerjaan rumah tim baru yang ada di depan mata.

Karena begitu kompleksnya permasalahan di sektor peternakan sedangkan perangkat hukum yang dijadikan acuan dalam pembangunan peternakan hanya UU no. 6 tahun 1967 dengan berbagai kelemahan yang terdapat di dalamnya, terbitnya Undang-Undang baru yang mampu memayungi berbagai kepentingan untuk menyelesaikan berbagai persoalan besar tersebut lebih merupakan kemutlakan agar peternakan di Indonesia dapat lebih dikembangkan lagi.

Keberhasilan Kapolri dengan tim barunya yang sangat melegakan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia karena berhasil menewaskan Dr. Azahari (pelaku utama berbagai pengeboman di Indonesia) dan membongkar pabrik ekstasi beromzet 100 miliar per minggu semoga dapat diikuti tim baru Direktorat Jenderal Peternakan dalam menghasilkan berbagai kebijakan yang membuat majunya sektor peternakan di Indonesia. Amin.

Desember 2005

10. Ditjennak, ISPI, FPPTPI: Berpikir Positif Bertindak Kreatif

Penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara Direktorat Jenderal Peternakan (DITJENNAK), Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI), dan Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI) dilakukan pada tanggal 10 Mei 2006 di Pusat Penelitian Peternakan Bogor. Inti dari isi NK tersebut adalah membuat dan melaksanakan kegiatan di bidang peternakan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak untuk jangka waktu lima tahun. Acara penandatanganan NK tampak sederhana dan khidmat. Acara ini dibarengkan dengan acara pengukuhan Ketua ISPI Cabang DKI Jakarta, yang diakhiri dengan diskusi panel tentang Restrukturisasi Perunggasan Nasional.

Lahirnya NK tersebut dilandasi kepedulian dan pola berpikir positif



para pemimpin ketiga organisasi tersebut terhadap situasi peternakan saat ini terutama dipicu atas kejadian flu burung yang tak kunjung reda. Beberapa aktivitas seperti penyuluhan biosecuriti kepada peternak, sosialisasi dan kampanye gizi ke masyarakat luas, dan penataan ulang sistem produksi ternak unggas merupakan rencana yang akan dikerjasamakan antara tiga pihak tersebut. Ribuan mahasiswa yang dimiliki perguruan tinggi, otoritas yang dimiliki Ditjen Peternakan, serta jaringan luas yang dimiliki ISPI merupakan modal besar untuk mengimplementasikan kerjasama yang sangat positif itu.

Lebih jauh diharapkan kerjasama ini tidak hanya diisi aktivitas terkait pengendalian flu burung saja tetapi juga aktivitas lainnya. Sehingga implementasi NK tersebut benar-benar menghasilkan output yang berdampak luas bagi pemulihan kondisi peternakan ke arah yang jauh lebih baik lagi. Impor ternak dan produknya yang semakin tinggi dari waktu ke waktu merupakan realitas yang tidak perlu didiskusikan lagi tetapi perlu segera dicarikan solusinya dan diimplementasikan. Jumlah populasi ternak yang cenderung menurun juga merupakan realitas lain yang memerlukan tindakan nyata untuk mencegahnya dan diupayakan untuk meningkatkannya. Kualitas sumberdaya manusia peternak sebagai tulang punggung utama tersedianya pangan sumber protein hewani bagi bangsa Indonesia perlu ditingkatkan kualitas dan keterampilannya. Tentunya masih banyak lagi. Yang penting sekali untuk dicatat adalah penyelesaian berbagai masalah tersebut tidak dapat dilakukan sendiri tetapi akan sangat efektif bila dilakukan melalui kerjasama yang saling memperkuat sebagaimana telah diwujudkan oleh ketiga organisasi tersebut di atas.

Apapun hasil yang diperoleh dari kerjasama ini nanti, DITJENNAK, ISPI, dan FPPTPI telah memberikan contoh konkret bagi komunitas peternakan untuk secara proaktif mengurangi beban bangsa dan negara Indonesia dari tumpukan persoalan yang menghimpitnya. Ketulusan hati para pemimpin ketiga organisasi itu dan tanggung jawab moralnya ditunjukkan kepada para anggotanya melalui antusiasnya menggalang kerjasama tersebut. Ketiganya memberikan angin sejuk di tengah hiruk



pikuknya suasana menyediakan yang menyelimuti bangsa Indonesia saat ini, semisal perbuatan anarkis buruh dalam demonstrasi tanggal 2 Mei 2006, kisruh politik di Tuban pasca-pilkada, kisruh sosial budaya terkait dengan RUU APP (Antipornografi dan Pornoaksi) yang memicu konflik antar tokoh masyarakat, dan segudang kejadian mengenacksonya lainnya.

Memang untuk ukuran bangsa berpenduduk 220 juta, apa yang diperbuat mereka bertiga (Dirjennak Ir. Mathur Riady, MSc; Ketua ISPI Ir. A. Purwanto, MBA; dan Ketua FPPTPI Dr. Ir. Ifar Subagyo) mungkin terasa bagaikan riak-riak di tengah samudra luas dalam konteks pembangunan nasional secara keseluruhan. Meski demikian, bila semua pemimpin di level manapun selalu menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan saling mengoptimalkan potensi yang dimiliki, maka seberat apapun permasalahan yang dihadapi akan sangat mudah diatasi.

Percayalah dengan apa kata orang bijak. Bila tiga pihak saling bertukar sebuah apel, masing-masing ketiga pihak tersebut hanya akan memperoleh sebuah apel juga. Tetapi, bila tiga pihak saling bertukar sebuah ide, masing-masing akan memperoleh sedikitnya tiga ide. Melalui kerjasama dengan lebih banyak pihak, ribuan ide pasti akan dihasilkan untuk menyelesaikan jutaan masalah!!!

Juni 2006

11. Jelang Kongres IX ISPI

“*Gawe konstitusional*” empat tahunan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) akan segera digelar di Jogjakarta 30 hingga 31 Agustus 2006 mendatang. Gawe tersebut adalah kongres yang kesembilan dalam rangka memilih Ketua Umum dan Pengurus Besar ISPI periode 2006-2010, serta menyusun program kerja empat tahun ke depan. Jelas acara ini sangat penting bagi komunitas Sarjana Peternakan (baik yang memakai predikat Ir atau S.Pt) karena kongres empat tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan



suatu kemutlakan apabila organisasi ini mau diakui eksistensinya dalam pergaulan masyarakat nasional maupun internasional.

ISPI yang lahir pada tanggal 20 Agustus 1968 memiliki jumlah anggota yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Ketika dibentuk, jumlah Insinyur Peternakan masih bisa dihitung dengan jari. Waktu itu mereka adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) yang jumlahnya hanya lima di Indonesia. Mereka yang mengambil minat peternakan memperoleh gelar Insinyur sedangkan mereka yang mengambil minat kedokteran hewan memperoleh gelar Dokter Hewan setelah mengambil koass. Dalam perkembangannya, FKHP dikembangkan menjadi Fakultas Kedokteran Hewan yang difokuskan untuk mempelajari berbagai hal terkait dengan kesehatan hewan dan pengendaliannya; Fakultas Peternakan yang difokuskan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi mengelola ternak dengan segala manipulasinya sehingga dihasilkan ternak berkualitas dan unggul. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 60 Fakultas dan atau Jurusan Peternakan. Tentu saja, sarjana yang dihasilkannya juga semakin bertambah banyak.

Apakah jumlah sarjana peternakan yang makin membludak membuat ISPI juga ikut besar? Rupanya tidak! Malah seringkali ada pertanyaan dari sarjana peternakan *"apa manfaat yang dapat diperoleh menjadi anggota ISPI?"* Sebagian pihak berpendapat bahwa menjadi anggota ISPI atau tidak, seorang sarjana peternakan bisa berprofesi sebagai peternak atau berprofesi di bidang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan peternakan. Pertanyaan tersebut sebenarnya sangat sederhana tetapi sampai saat ini belum ada seorangpun sarjana peternakan mampu menjawabnya.

Untuk saat ini, bagi komunitas ISPI yang lebih penting bukan pertanyaan yang bersifat individual seperti itu tetapi pertanyaan komunal *"apa manfaat adanya ISPI dan tidak adanya ISPI di Indonesia?"* Tentunya kita semua berharap agar ISPI memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia melalui berbagai kiprah dan pemikirannya untuk ikut memajukan dunia peternakan di Indonesia. Kiprah dan pemikiran yang bagaimana agar ISPI mampu memenuhi harapan tersebut? Pertanyaan ini



yang perlu dicarikan jawabannya oleh komunitas ISPI!

Karena itu, diselenggarakannya kongres empat tahunan jangan diartikan hanya sekedar acara rutin untuk pergantian pengurus baru melalui legitimasi baru dari komunitas sarjana peternakan. Tetapi yang lebih penting adalah memformulasikan peran penting apa yang secara riil dapat disumbangkan oleh organisasi ISPI kepada pemerintah dan masyarakat luas. Ini memerlukan banyak pemikiran cerdas dan kreatif. Apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai macam permasalahan. Mulai dari bencana yang terjadi susul menyusul dan mengakibatkan tewasnya ribuan penduduk sampai masih maraknya korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan.

Semoga Kongres ke IX yang direncanakan akan dibuka secara resmi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta memunculkan Ketua Umum PB-ISPI Periode 2006-2010 yang ikhlas mengembangkan tugasnya dan tidak memiliki pamrih apapun kecuali meningkatkan peran ISPI dalam percaturan nasional. Ketulusan dan keikhlasan dalam menahkodai ISPI merupakan syarat mutlak agar ISPI sebagai organisasi nirlaba dan non partisan ini tetap mampu menjadi jembatan silaturahmi antar berbagai komponen bangsa yang bergerak di bidang peternakan sebagaimana telah ditunjukkan selama ini. Selamat berkongres dan bravo ISPI!

Agustus 2006

12. “Ngalor-ngidul” Statistik Peternakan

Alih-alih dapat mencapai target pemerintah berswasembada daging 2010, 70 % dari total kebutuhan daging nasional saat ini dipenuhi dari impor. Bukan sebaliknya seperti yang sering dikatakan bahwa 20 - 30 % kebutuhan daging nasional dipenuhi dari impor. Kesimpulan ini berdasarkan hasil perhitungan angka-angka yang ada di buku statistik peternakan terbitan Direktorat Jenderal Peternakan pada 2007.



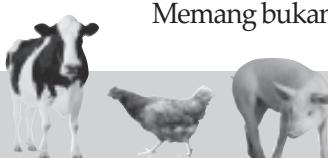
Tidak percaya? Silahkan hitung sendiri dengan data berikut ini. Konsumsi daging sapi 0,31 kg/kapita/tahun; jumlah penduduk Indonesia 221 juta; impor sapi bakalan dan daging sapi rata-rata naik 20 % per tahun. Data teknis yang saya gunakan adalah berat badan sapi impor 400-500 kg; berat badan sapi lokal 300 - 350 kg; karkas 45 - 50 %; kandungan daging dalam karkas 65 %. Mudah-mudahan perhitungan saya tidak salah bahwa hasilnya sekitar 70 % daging di Indonesia berasal dari impor.

Apabila melihat data jumlah pemotongan sapi di Indonesia yang rata-rata 1.768.571 ekor per tahun, pernyataan selama ini bahwa daging impor hanya menutupi 20 - 30 % kebutuhan daging nasional ada benarnya karena rata-rata impor sapi dari luar negeri (sapi bakalan dan daging beku) sebanyak 337.856 ekor per tahun.

Jadi, dengan menggunakan data populasi sapi yang disajikan pada buku statistik peternakan yang sama, hasilnya berbalikan. Hasil yang satu menunjukkan bahwa 70 % kebutuhan daging dipenuhi dari impor sedangkan hasil satunya lagi menunjukkan bahwa 70 % kebutuhan daging dipenuhi dari sapi lokal. Jika dua-duanya tidak bisa diterima, maka jawaban lainnya adalah konsumsi daging sapi di Indonesia tidak lagi 0,31 kg/kapita/tahun, tetapi lebih dari itu!! Inilah potret data statistik peternakan. Angka manakah yang benar diantara angka-angka yang disajikan pada buku yang sama?

Tidak heran apabila banyak pihak sering mengeluhkan kesahihan data keluaran pemerintah. Konon data pemerintah lebih sering kelirunya daripada benarnya. "Ambil saja separonya bila menggunakan data pemerintah" seloroh seorang teman akademisi dari kampus ternama di Indonesia. Tidak hanya data pemerintah saja sebenarnya. Data instansi swasta pun sering tidak akurat karena terkait dengan hitung-hitungan bisnis dan kewajiban membayar pajak. Kata teman yang lain lagi, data yang disajikan pihak swasta bisa berubah-ubah, dan angka yang dimunculkan sangat tergantung pada kegunaan data tersebut. Tampaknya ini sudah menjadi rahasia umum di Indonesia, walaupun sebaiknya jangan dibudayakan.

Memang bukan pekerjaan mudah untuk menghasilkan data yang baik



dan benar. Walaupun dari waktu ke waktu, kualitas buku statistik peternakan (tampilan maupun substansinya) terus diperbaiki namun masih saja hasilnya seperti yang saya uraikan di atas sebagai salah satu contohnya. Namun demikian, bukan berarti kita tidak bisa membuat data statistik yang baik dan benar di masa mendatang. Khususnya data dari pemerintah sebagai lembaga publik, mestinya harus akurat dan tepat mengingat keberadaan data yang baik dan benar merupakan bahan pertimbangan yang penting dalam pengambilan keputusan, apalagi yang menyangkut kemaslahatan umat.

Upaya menghasilkan data statistik yang baik dan benar sangat mungkin dan bisa dilakukan. Banyak pakar statistik di Indonesia, teknologi informasi juga semakin canggih, fasilitas untuk menjalankan teknologi tersebut juga sangat memadai, dan semua perangkat lainnya juga siap mendukungnya. Kita tinggal membutuhkan kemauan dan semangat melayani publik untuk menghasilkan data yang terbaik, tentunya dengan memberikan dukungan finansial dan *reward* yang memadai bagi para profesional yang mengerjakannya.

Contoh menarik tentang akurasi data di Indonesia adalah data yang terkait dengan pemilihan umum untuk memilih pemimpin eksekutif di tingkat pusat dan di tingkat daerah maupun untuk memilih anggota lembaga legislatif di Indonesia sejak era reformasi selama ini. Hasil perhitungan cepat (*quick count*) yang dilakukan oleh lembaga survei seringkali tidak meleset dengan hasil perhitungan manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Memang menghitung jumlah kertas suara (yang merupakan benda mati) sangat berbeda dengan jumlah ternak (barang hidup dan berkembang) apalagi ternak kecil seperti ayam dan sebangsanya. Namun, sekali lagi, bukan berarti tidak bisa.

Januari 2009





F

Perunggasan Di Indonesia



1. Mempersoalkan Peternakan Rakyat di Perunggasan

Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 menyatakan secara jelas, usaha peternakan mencakup peternakan rakyat dan peternakan perusahaan. Sesuai Pasal 9 ayat 2, peternakan rakyat diartikan sebagai peternakan yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani di samping usaha pertaniannya. Posisi peternakan rakyat di tengah-tengah maraknya pembangunan perunggasan di tanah air saat ini tampaknya tidak secara tegas dinyatakan dan lebih terkesan sebagai obyek pembangunan dan bukan sebagai subyek pembangunan. Masih relevankah arti peternakan rakyat tersebut? Dan akankah peternakan rakyat jadi obyek pembangunan terus?

Menguatnya dikotomi peternakan rakyat dan peternakan perusahaan tampak semakin jelas sejak diberlakukannya kebijakan "pintu terbuka" yang memungkinkan masuknya investasi modal asing pada industri perunggasan di dalam negeri. Peternakan rakyat lebih terkesan sebagai usaha budidaya yang keuntungannya hanya untuk sekadar penyambung hidup. Sementara industri perunggasan sebagai usaha komersial yang berorientasi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam setiap usaha, siapapun termasuk peternak rakyat menginginkan keuntungan. Semakin besar keuntungan, semakin baik. Oleh karena itu, peternak rakyat juga berhak menikmati keuntungan besar dalam usaha budidayanya sehingga yang tadinya berskala kecil bisa menjadi berskala besar. Ini dapat dicapai peternak manapun sepanjang mereka mau berusaha keras dan mempunyai komitmen untuk memajukan usaha mereka. Data empiris menunjukkan, peternak rakyat yang sukses biasanya adalah mereka yang berprinsip "mengurangi sikap ketergantungan".

Dalam dunia industri perunggasan, selain ada kelompok penyedia sapronak/pabrikan (bibit, pakan, dan sarana pendukung lainnya) dan kelompok usaha pascapanen, ada juga kelompok budidaya. Saat ini, sedikitnya terdapat empat pola budidaya (baca: ayam pedaging), yaitu (1) perusahaan besar yang hanya melakukan aktivitas budidaya; (2) pabrikan yang melakukan aktivitas budidaya bersama peternak kecil (kemitraan); (3) peternak besar yang melakukan kemitraan dengan peternak kecil; dan (4)



peternak kecil mandiri (sama sekali tidak melakukan kemitraan).

Dari keempat pola budidaya ini, yang dimaksud peternak rakyat tentunya adalah peternak kecil yang bermitra dengan pabrikan; peternak kecil yang bermitra dengan peternak besar; dan peternak kecil mandiri. Jumlah mereka mencapai puluhan ribu dan usaha mereka itu mampu menghidupi jutaan manusia. Peternak rakyat ini yang harus ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan usahanya, diajari dengan lebih baik lagi cara beternak secara efisien dan produktif, dan tentu saja dilindungi keberadaannya melalui berbagai perangkat hukum yang memadai. Ini semua perlu dilakukan dalam upaya menjadikan peternak sebagai subyek pembangunan.

Dalam hal peningkatan efisiensi dan produktivitas bagi peternak berskala kecil, kemitraan dalam pengadaan sarana produksi seperti pakan merupakan suatu alternatif. Akan sangat ideal apabila peternak kecil di suatu kawasan tertentu menghimpun diri dan membuat pabrik pakan mini. Pengoperasiannya bermitra dengan pabrikan besar yang memiliki modal dan teknologi. Jadi seperti model *franchising* ala restoran Mc.Donald dan Kentucky Fried Chicken untuk versi pemilik asing atau oleh restoran Wong



Solo untuk versi pemilik lokal. Kalau bisnis restoran bisa dilakukan secara *franchising*, mengapa pabrik pakan mini tidak bisa? Selama pola usaha seperti itu saling menguntungkan pihak yang bermitra, kenapa tidak? Kalau kita berpikir makro dan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan protein hewani untuk pencerdasan anak bangsa, berbagai pola usaha menuju ke peningkatan efisiensi dan produktivitas harus dikembangkan. Dampak yang diharapkan adalah semakin murahnya produk peternakan dan meningkatnya daya beli masyarakat. Ada pun peran pemerintah lebih ditekankan sebagai fasilitator, regulator yang adil, serta menjadi wasit yang baik dan benar.

Berkaitan dengan upaya membesarkan dan memberdayakan usaha peternakan rakyat untuk mengantisipasi kebutuhan protein hewani bangsa Indonesia yang akan terus meningkat, peran dan posisi peternakan rakyat harus jelas serta dilindungi secara hukum. Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tengah disusun akan menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 harus mencakup substansi yang berkaitan dengan pemberdayaan peternakan rakyat atau peternak berskala kecil.

Hal itu penting agar peran dan posisi peternak rakyat dapat disejajarkan dengan peran dan posisi pabrikan. Dalam membangun industri perunggasan, nuansa kebersamaan antara peternak kecil dan pabrikan perlu lebih ditonjolkan ketimbang nuansa "kemurahan hati" dari pihak yang besar ke pihak yang kecil. Ketersediaan dan kemudahan memperoleh pakan, bibit, dan sapronak lainnya diharapkan akan meningkatkan gairah peternak rakyat.

Oleh karena itu penyusunan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pijakan penentu dalam proses penyelenggaraan dunia peternakan umumnya dan perunggasan khususnya akan senantiasa diarahkan pada pengembangan dan penguatan ekonomi lokal dengan membangun kesetaraan peran berbagai aktor utama dalam dunia perunggasan di Indonesia.

September 2004



2. Dana Kompensasi Subsidi BBM dan Peternakan

Melonjaknya harga minyak dunia telah membuat pemerintahan SBY-JK menjadi limbung, dan akhirnya pemerintah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) lebih dari 100% mulai 1 Oktober 2005 lalu. Dengan kenaikan harga BBM ini, dana pemerintah yang digunakan untuk memberikan subsidi pembelian BBM menjadi berkurang dan sebagian dana tersebut dialihkan untuk membantu rakyat miskin secara langsung (melalui pembagian sejumlah uang) dan sebagian besar lainnya dialihkan untuk peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan.

Terlepas dari pro-kontra terhadap kenaikan harga BBM, "pil pahit" yang diberikan pemerintah SBY-JK kepada rakyatnya diharapkan dapat memberikan dampak positif di masa mendatang. Ini dapat terjadi apabila kita semua selalu berpikir positif dan realistik. Khususnya untuk pengembangan di bidang peternakan, kekhawatiran akan turunnya konsumsi protein hewani yang berakibat mundurnya industri peternakan harus diubah menjadi sebaliknya. Bagaimana mungkin?

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perbaikan kualitas hidupnya, produk peternakan sebagai sumber bahan pangan protein hewani pencerdas anak bangsa tentunya akan semakin banyak dikonsumsi. Karena kualitas hidup manusia akan ditentukan oleh kemampuan intelektualnya (pendidikan) dan ketahanan fisiknya (kesehatan), maka perlu ada saling ketergantungan antara pendidikan, kesehatan, dan peternakan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan, "*three in one*"! Bila kita memahami arti pendidikan (yang membuat cerdasnya suatu bangsa), kita harus memahami pula makna kesehatan jasmani-rohani, dan tercapainya kesehatan ini akan terjadi bila ada pangan protein hewani asal ternak. Oleh karena itu, ketersediaan ternak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mendambakan kualitas hidup yang lebih baik merupakan kemutlakan!

Terkait dengan kebijakan pemerintah menggunakan dananya untuk meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan daripada untuk mem-



berikan subsidi pembelian BBM, tampaknya perlu dibangun sinergisme dalam pemanfaatan kompensasi dana subsidi BBM tersebut untuk pengembangan industri peternakan di Indonesia. Perlu ada kebijakan terpadu!

Bisa saja dana subsidi BBM yang dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan itu sebagian dimanfaatkan secara langsung untuk pengembangan sektor peternakan di pedesaan sebagai basis utama berkembangnya ternak yang harus dekat dengan lahan pertanian atau perkebunan. Bila itu tidak mungkin, sebagian dana sektor kesehatan diwajibkan untuk implementasi berbagai program yang terkait dengan upaya peningkatan gizi anak sekolah melalui konsumsi produk peternakan yaitu susu, telur, dan daging. Demikian juga, sebagian dana sektor pendidikan wajib digunakan untuk pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat pedesaan untuk pengembangan pangan olahan produk ternak sehingga masyarakat setempat dapat mengolah sendiri produk ternaknya untuk kebutuhan mereka. Kedua hal tersebut (program peningkaran gizi dan pengembangan pangan) harus dilakukan secara terus menerus di seluruh pelosok tanah air karena selama manusia ada di muka bumi, maka selama itu pula gizi dan pendidikan harus ada.

Di sisi lain, dana untuk pengembangan peternakan yang penganggarannya ada di bawah otoritas sektor pertanian perlu diperbesar yang tujuan utamanya adalah untuk peningkatan populasi ternak. Komoditas ternak yang dikembangkan dapat dipilih berdasar kesesuaianya dengan agroklimat, jenis lahan, dan kebiasaan masyarakat petani-peternaknya. Dari pemantauan di beberapa kelompok peternak yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, penggunaan dana APBN (dekonsentrasi) untuk pinjaman bantuan langsung masyarakat (PBLM) memberikan dampak yang tidak kecil bagi peningkatan populasi ternak dan pendapatan petani-peternak.

Oleh karena itu, keterpaduan kebijakan dalam penggunaan dana kompensasi BBM untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan dalam rangka pengembangan industri peternakan secara riil akan berdampak



positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, serta berdampak positif pula bagi upaya peningkatan ketahanan pangan nasional.

November 2005

3. HUT ke-61 RI & PMBC

Sangat wajar apabila setiap tahun di bulan Agustus tepatnya tanggal 17, seluruh warga Negara Indonesia secara gegap gempita merayakan hari kemerdekaannya karena bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan tersebut dengan susah payah dan mengalami banyak pengorbanan lahir batin. Patutlah kita semua generasi muda menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan para pahlawan yang telah mendahului kita agar segala pengorbanannya untuk bangsa dan tanah air Indonesia mendapat ganjaran yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Cukupkah hanya dengan doa? Rasanya kurang adil bila hanya berdoa saja. Berdoa wajib tetapi berkreasi, berinovasi, dan beraktivitas mengisi kemerdekaan yang telah diraih adalah mutlak!

Satu aspek sangat vital yang masih menjadi kendala utama membangun bangsa Indonesia secara cepat adalah sumberdaya manusia. Hampir di semua sektor, termasuk di bidang peternakan, SDM-nya lemah. Produktivitas dan efisiensi dalam usaha peternakan masih *jeblok* bila dilihat dari kacamata makro. Ayam yang populasinya melimpah masih belum swasembada dalam penyediaan bahan baku pakannya. Demikian juga dalam usaha ternak babi. Ternak sapi yang hidup di tanah air Indonesia yang agraris nan subur, jumlahnya merosot dari tahun ke tahun. Akibatnya jumlah ternak sapi yang diimpor terus meningkat. Ditambah dengan impor daging sapi, total impor sapi setara dengan 350 ribu ekor per tahun. Tidak ada bedanya pula dengan situasi sapi perah penghasil susu. Siapa yang salah? Tanahnya? Sumberdaya alamnya? Limbah pertaniannya yang kurang berkualitas? Bukan itu semua! Yang salah adalah manusianya!





Banyaknya sarjana peternakan (S.Pt) yang diluluskan dari sekitar 60 perguruan tinggi di seluruh Indonesia masih belum berkorelasi positif dengan banyaknya populasi ternak sebagai bahan baku pangan bagi kebutuhan bangsa Indonesia. Rupanya hal ini memang sudah sering dikeluhkan banyak pihak karena banyak S.Pt yang tidak punya nyali untuk beternak. Ketrampilan teknis (*technical skill*) dan kemampuan *softskill* (*personality*) yang mencakup *leadership*, *manajerial*, rasa percaya diri) S.Pt sangat lemah sehingga mereka tidak berani mengambil keputusan untuk beternak. Mungkin ada sementara pihak membantah fenomena ini, namun faktanya memang demikian.

Yang lebih menyedihkan lagi, banyak perusahaan di bidang perunggasan, karena aspek sumberdaya manusianya juga, tidak dapat menghasilkan keuntungan optimal karena rendahnya kinerja ternak ayam yang dipelihara. Ini juga merupakan bukti bahwa kualitas sumberdaya manusia dalam mengelola ternaknya masih perlu dipertanyakan. Di tengah situasi dan fenomena seperti itu, pada tanggal 13 Juli 2006, *Poultry Man-*



agement and Business Centre (PMBC) atau Pusat Bisnis dan Manajemen Perunggasan (PBMP) diresmikan pendiriannya oleh Direktur Jenderal Peter-nakan (Ir. Mathur Ryadi, MA) setelah membuka *Indolivestock 2006 Expo and Forum* pada tanggal 11 juli 2006 lalu.

Yang sangat menarik terhadap lembaga yang baru lahir ini adalah terlibatnya tiga unsur penting pembangkit kinerja industri perunggasan, yaitu *Akademisi*, *Bisnisman*, dan *Governance*. *Akademisi* sebagai kelompok netral yang mempertaruhkan kredibilitas keilmuan dan idealismenya, *bisnisman* sebagai pemilik *insting kuat* untuk beraktivitas dalam usaha komersial, dan *governance* sebagai fasilitator dan dinamisator publik agar masyarakat terus beraktivitas dan berkreativitas, merupakan tiga komponen penting yang tentu saja saling memperkuat. Tentunya para penggagas berdirinya PMBC ini telah berpikir panjang dan visioner dalam melihat perkembangan industri perunggasan ke depan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Mengapa? Karena PMBC sangat diharapkan dapat *mentranslate* (menerjemahkan) iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) dari negara-negara maju ke Indonesia, *mentransfer* (memindahkan) iptek tersebut ke peternak sesuai kondisi alam & sosial budaya Indonesia, dan *mentransform* (mengubah) pola berpikir peternak dan pemilik peternakan ke arah yang lebih profesional untuk mencapai efisiensi dan produktivitas ternaknya.

Bukan perkara mudah untuk mengembangkan lembaga seperti PMBC. Namun demikian, bercermin pada perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang tentunya amat sangat jauh lebih sulit dalam memerdekakan Republik Indonesia, rasanya PMBC akan mampu mengembangkan visi dan misi para pendirinya. Disadari atau tidak, para penggagas dan pendiri PMBC telah berbuat secara substansial mengisi arti dan makna kemerdekaan Republik Indonesia bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Dirgahayu ke 61 Republik Indonesia dan Selamat Datang PMBC!

September 2006



4. Menata Bisnis Perunggasan Akibat Flu Burung

Akhir-akhir ini restrukturisasi perunggasan dibicarakan banyak orang di berbagai forum dan rupanya para pengampu kepentingan (*stakeholders*) di bidang peternakan dan kesehatan hewan belum memiliki persepsi yang sama tentang restrukturisasi itu sendiri. Kebanyakan berpendapat bahwa restrukturisasi perunggasan hanya diarahkan ke sektor 4 saja (yaitu kelompok ayam kampung yang biasanya diumbar di pekarangan/*back-yard* dalam pemeliharaannya).

Ada yang mengartikan restrukturisasi sektor 4 ini sebagai penataan pola beternak unggas di permukiman, ada pula yang mengartikan pemusnahan unggas yang sakit dan berpotensi sakit, atau ada yang mengartikan pemusnahan unggas secara total untuk menjamin tidak adanya risiko penyebaran virus flu burung. Pemahaman restrukturisasi perunggasan di masyarakat awam, kebanyakan mengartikan pemusnahan ayam kampung. Akibatnya, seorang ibu muda yang saking menahan kejengkelannya kepada pemerintah menangis penuh haru ketika menceritakan bisnis ayam kampungnya hancur berantakan. Ini terjadi di hotel berbintang lima ketika berlangsung Rembug Nasional Peternak Ayam Komersial di Jakarta yang dihadiri banyak tokoh perunggasan.

Kepanikan pemerintah akibat terus bertambahnya korban berjatuhan akibat flu burung (62 orang meninggal dunia) dan ketakutan masyarakat mengonsumsi daging ayam juga telah mengakibatkan ruginya bisnis perunggasan yang mencapai satu triliun rupiah di awal tahun 2007 ini. Untuk itu, komunitas peternakan (dokter hewan, sarjana peternakan, peternak, pebisnis di sektor peternakan, pengamat, birokrat, dan lain-lain) harus menjadikan kasus *avian influenza*/flu burung sebagai momentum penting untuk memajukan industri perunggasan dan industri peternakan pada umumnya.

Memandang restrukturisasi perunggasan hanya sebagai upaya melakukan penataan usaha peternakan unggas di sektor 4 saja sangat tidak tepat. Lebih-lebih kalau hanya dipandang sebagai pengaturan pemeliharaan ternak unggas di permukiman, atau menjadikan restrukturisasi



perunggasan hanya sebagai satu dari sembilan langkah pencegahan dan penanggulangan flu burung. Rasanya kurang tepat!! Restrukturisasi perunggasan harus dipandang sebagai upaya menata industri perunggasan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir beserta segala aspek pendukungnya.

Dengan demikian, restrukturisasi perunggasan setidaknya mencakup (a) revitalisasi usaha perunggasan mulai dari aspek hulu (penyediaan sarana produksi ternak seperti bibit, pakan, dan obat), aspek budidaya, aspek panen dan pascapanen, serta aspek pemasaran. Di sini harus ada perbaikan menyeluruh baik manajemen internal suatu perusahaan maupun sistem bisnisnya. Pada aspek budidaya, pola kemitraan yang telah berjalan dengan baik perlu ditata secara lebih profesional dan tersistem agar lebih efisien dan produktif. Demikian juga rumah potong ayam dan pasar penjualan daging harus ditata supaya lebih higienis dan menjamin rasa aman bagi konsumen; (b) revitalisasi peran kelembagaan di pusat dan daerah, antara lain perlu reorganisasi direktorat jenderal peternakan. Struktur organisasi yang ada saat ini membuat peran yang dimainkan pemerintah kurang maksimal dalam memacu pembangunan perunggasan di Indonesia. Selain itu, pembentukan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan yang diberi mandat dan otoritas penuh untuk mencegah dan mengendalikan ratusan macam penyakit lebih merupakan keniscayaan. Terakhir, adanya



Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan di setiap provinsi/kabupaten/kota juga merupakan kemutlakan; (c) revitalisasi sumberdaya manusia di semua level melalui pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan manajemen dan bisnis perunggasan apabila kita ingin produk perunggasan berdaya saing tinggi.

Itu semua bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab industri besar. Kalangan industri besar, dengan intervensi minimal pemerintah, harus mampu merevitalisasi diri sendiri, sedangkan kalangan menengah ke bawah, termasuk kelompok usaha perunggasan sektor 4, perlu fasilitasi pemerintah pusat/daerah dalam melakukan revitalisasi usahanya. Keberhasilan restrukturisasi perunggasan yang tentunya bersifat evolutif dan berkesinambungan ini mestinya menjadi agenda bersama seluruh *stakeholder* di bidang peternakan. Lebih khusus lagi, ini merupakan *agenda bersama PDHI dan ISPI* sebagai representasi komunitas profesi dokter hewan dan representasi komunitas peternak dalam memainkan perannya untuk memajukan industri perunggasan dan industri peternakan secara umum dalam rangka menjamin ketersediaan bahan pangan sumber protein pencerdas bangsa Indonesia!

Maret 2007

5. Selamat Tinggal Pola “Primitif”

Satu dari lima topik yang dibahas selama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penanganan dan Pengendalian Flu Burung tanggal 1-2 Maret 2007 lalu di Jakarta adalah Restrukturisasi Perunggasan. Dalam diskusi muncul bahwa sebenarnya pada tahun 2006 ada *budget* sebesar Rp 500 miliar untuk restrukturisasi perunggasan sebagaimana disampaikan oleh Bappenas. Ironisnya, hanya Rp 30 miliar yang bisa digunakan di Departemen Pertanian. Tidak ada yang tahu bagaimana ini bisa terjadi.

Tidak penting membahas lebih lanjut tentang mengapa dana setengah triliun rupiah itu tidak termanfaatkan optimal. Yang lebih penting dilakukan





saat ini, memikirkan cara agar dana tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk restrukturisasi perunggasan, dan bagaimana dana khusus restrukturisasi perunggasan tersedia setiap tahunnya. Karena, restrukturisasi merupakan program yang bersifat evolutif dan berorientasi untuk mengubah pola berpikir pelaku bisnis perunggasan ke arah yang lebih profesional, untuk itu harus berlangsung secara berkelanjutan. Perlu dibangun kebersamaan *stakeholders* dalam mengembangkan industri perunggasan melalui penguatan manajemen dan bisnis setiap pelaku usaha perunggasan sehingga diperoleh efisiensi dan produktivitas tinggi. Ini semua akan menghasilkan produk unggas yang murah harganya, tinggi nilai nutrisinya, dan berdaya saing.

Dalam industri perunggasan Indonesia, salah satu komoditas yang dominan adalah ayam ras *broiler* (pedaging). Dinamika yang terjadi selama ini membuat pola kemitraan inti-plasma semakin diminati oleh banyak praktisi perunggasan. Para peternak berskala kecil merasa lebih nyaman ikut bergabung dalam kemitraan karena tidak terguncang oleh fluktuasi harga ayam di pasar. Industri *feedmill* atau pemodal kuat biasanya berperan



sebagai inti sedangkan peternak sebagai plasmanyanya.

Dalam konteks pengelolaan dan distribusi pemasaran produknya, komoditas ayam *broiler* jauh lebih dinamis, namun dari berbagai aspek kesehatan dan lingkungan mengandung risiko lebih tinggi. Misalnya di budidaya, banyak kandang berkapasitas ribuan ekor tersebar di banyak daerah tanpa penerapan biosekuriti ketat. Sedangkan di hilir, ayam hidup didistribusikan dari kandang ke pangkalan ayam, lanjut ke pasar, kemudian ke pengecer, dengan sarana transportasi yang juga tidak memenuhi persyaratan biosekuriti.

Tempat Pemotongan Ayam (TPA) sebagai tempat pengolahan dan pemrosesan ayam hidup menjadi karkas memiliki fasilitas dan infrastruktur yang jauh dari kesan higienis. Di banyak TPA, darah ayam bercerakan dimana-mana dan menempel ke dinding yang diliputi lumut hijau tebal. Limbah cair merah kecoklatan tidak mengalir sempurna ke pembuangan, menimbulkan bau tak sedap dan di sana-sini terlihat tumpukan limbah padat yang juga menimbulkan bau cukup menyengat. TPA semacam ini jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia. Dari tempat semacam itu pula, sebagian besar restoran dan pelaku bisnis makanan membeli daging ayam untuk diolah dan dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat. Karena itu, sebagian besar ayam yang dipelihara melalui pola kemitraan inti-plasma juga dijual ke tempat "primitif" tersebut.

Memang, sampai saat ini, belum pernah ditemukan kasus orang meninggal dunia akibat makan daging ayam yang dibeli dari TPA "primitif" seperti itu. Sepanjang daging diperoleh dari ayam sehat dan daging dimasak dengan benar, maka dapat dipastikan aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, jika pengelolaan ayam hidup menjadi karkas yang dilakukan secara primitif itu menjadi budaya masyarakat kita, kapankah produk kita dapat berdaya saing di tengah tuntutan masyarakat global yang semakin memperhatikan aspek lingkungan dalam berbisnis apapun.

Penerapan integrasi vertikal total dari hulu (penyediaan bibit dan *feedmill*) sampai hilir (penyediaan Rumah Potong Ayam dan penjualan produknya) dalam satu manajemen perusahaan yang sangat efisien ini hanya



akan mungkin dilakukan oleh *integrator* (pengusaha kelas kakap). Hal ini akan berdampak pada hilangnya mata pencarian banyak orang yang selama ini terlibat dalam mata rantai perdagangan dari hulu ke hilir tersebut. Mungkin integrasi versi *Academicians-Businessmen-Governers* (ABG) lebih sesuai sebagai solusi perunggasan Indonesia.

Harapannya, rekomendasi yang dibuat untuk restrukturisasi perunggasan dalam Rakernas tersebut di atas menjadi komitmen semua *stakeholders* perunggasan. Mengubah pola primitif dalam menghasilkan produk unggas menjadi pola yang lebih berbudaya bersih dan sehat di era global nan modern ini.

April 2007

6. ABG Harus Solid

Sekjak dikeluarkannya Peraturan Gubernur DKI yang menyatakan bahwa secara bertahap wilayah DKI harus bersih dari peternakan ayam maupun bersih dari lalu lintas ayam hidup, Provinsi Jawa Barat melihat peraturan itu sebagai peluang. Setidaknya beberapa kabupaten di Jawa Barat seperti Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Bekasi dapat memanfaatkan aturan tersebut untuk menyediakan fasilitas Rumah Potong Ayam (RPA) modern berkapasitas tinggi. Dengan demikian, semua ayam yang masuk DKI sudah dalam bentuk karkas dan tingkat higienisnya terjamin. Kalaupun ada pihak yang menghendaki Tempat Pemotongan Ayam (TPA) berkapasitas kecil, maka TPA yang dibangun harus memenuhi azas kebersihan lingkungan, kesehatan manusia, dan kesehatan dagingnya. Intinya, kondisi di banyak TPA saat ini yang terkesan kumuh dan jauh dari nuansa sehat seyogyanya tidak akan eksis lagi dalam industri perunggasan ke depan.

Pengadaan fasilitas RPA atau TPA yang lebih profesional dan berorientasi menghasilkan daging halal, aman, utuh, dan sehat hanya merupakan *entry point* saja untuk melakukan restrukturisasi perunggasan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir. Ada rantai distribusi ayam mulai





dari perusahaan peternakan ayam *Grand Parent Stock* (GPS) ke *Parent Stock* (PS) selanjutnya ke *Final Stock* (FS) lalu ke RPA, dan terakhir ke konsumen. Kalau serangkaian usaha mulai dari GPS sampai RPA ini dimiliki oleh satu perusahaan (integrasi vertikal), maka akan sangat mudah bagi pemerintah dalam rangka mengatur industri perunggasan menjadi sangat efisien dan produktif. Tetapi, fakta di lapangan tidak seperti itu. Banyak pihak terlibat dalam kegiatan ekonomi dari GPS sampai ke konsumen. Jadi, tugas pemerintah adalah membentuk integrasi vertikal yang komponen di dalamnya terdiri banyak pihak yang beraktivitas di setiap lini dalam rantai agribisnis tersebut.

Jelas bukan pekerjaan ringan bagi pemerintah. Jika pemerintah hanya bertindak sendiri, maka peluang gagalnya akan sangat besar. Walaupun ada alokasi anggaran dalam jumlah cukup, pemerintah kurang atau tidak memiliki jiwa bisnis. Akibatnya sebagus apapun fasilitas RPA atau fasilitas lainnya yang dibangun, belum tentu fasilitas tersebut akan beroperasi secara berkesinambungan. Alih-alih fasilitas tersebut seringkali menjadi bangunan mubazir kemudian roboh digerogoti umur tanpa memberi makna apapun bagi publik. Sudah cukup banyak contoh yang bisa dilihat tentang fasilitas



publik yang dibangun hanya oleh pemerintah saja dan sama sekali tak berfungsi sebagaimana diharapkan. Hal seperti ini mestinya tidak boleh terjadi lagi.

Dalam konteks membangun integrasi vertikal di industri perunggasan (tentunya mengakomodasi kepentingan semua pemain dari hulu-hilir), pemerintah perlu mengajak pebisnis. Bagaimanapun pebisnis memiliki *sense* yang kuat dalam berbisnis dan memahami betul situasi pasar, lika-liku para pedagang, serta perilaku pembelinya. Namun demikian, menjadikan dua komponen (pemerintah dan pebisnis) saling bersinergi untuk membangun berbagai fasilitas publik bukan persoalan mudah. Ada perbedaan mendasar antara "bahasa" pemerintah dengan "bahasa" pebisnis. Pemerintah lebih banyak berorientasi pada pemberian layanan publik (karena memang uangnya milik publik) sedangkan pebisnis lebih banyak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sendiri (karena uangnya memang bersumber dari usaha sendiri). Tidak ada yang salah dengan karakter masing-masing komponen tersebut. Penyamaan dua bahasa yang berbeda tersebut menjadi satu bahasa yang cantik merupakan tugas para akademisi yang pada umumnya bersikap independen, objektif, ilmiah, dan terbuka.

Kebersamaan komponen *academician* (A), *businessman* (B) dan *governor* (G) dalam membangun aktivitas bisnis yang berorientasi pada kepentingan publik harus semakin lebih dikembangkan lagi pada jaman sekarang. Dengan demikian, semua sumberdaya yang dimiliki ketiga komponen tersebut dapat dioptimalkan dalam rangka membangun profesionalisme dalam industri perunggasan yang lebih efisien dan produktif. Dengan kebijakan otonomi daerah yang memberi kewenangan besar bagi daerah kabupaten/kota, mestinya keterlibatan tiga komponen tadi mampu memberikan arah pengembangan aktivitas ekonomi di setiap daerah secara tepat, apapun jenis aktivitas ekonomi yang akan dikembangkan.

Bagaimanapun restrukturisasi perunggasan yang sudah digulirkan sebagai akibat merebaknya virus flu burung harus dapat mengubah paradigma atau pola berpikir semua *stakeholder* perunggasan dari pola



"business as usual" ke pola "fully planned business and management". Semoga kematian 64 manusia akibat terinfeksi virus flu burung tidak sia-sia. Amiin.

Mei 2007

7. Faktor SDM menentukan!

Dibanding dengan komoditas ternak lainnya, boleh dibilang ayam ras pedaging (broiler) merupakan ternak yang paling banyak memperoleh sentuhan teknologi tinggi dengan biaya tinggi pula. Sebagai contoh, puluhan tahun lalu, seekor broiler memerlukan waktu lebih dari 2 bulan dan mengonsumsi lebih dari 3 kg pakan untuk mencapai bobot badan 1 kg. Saat ini, melalui penelitian bertahun-tahun dan tak pernah berhenti, seekor broiler berbobot badan 1 kg hanya memerlukan waktu 24 hari dan 1,5 kg pakan. Tingkat reproduksinya juga sangat tinggi, dimana sepasang *parent stock* menghasilkan sekitar 135 telur yang akan menetas menjadi broiler selama masa produksinya. Akibatnya, setiap minggu Indonesia dipadati lebih dari 20 juta ekor broiler atau lebih dari 1 miliar ekor per tahun.

Industri ayam pedaging telah menjadi industri biologis yang melibatkan jutaan orang dan menjadi salah satu penggerak roda ekonomi secara nasional. Dari sekian banyak manusia itu, jika dipilah-pilah, sebenarnya hanya ada dua kelompok yaitu (1) pemilik (*owner*) usaha di bidang peternakan ayam pedaging dan (2) karyawan (mulai dari yang profesional sampai yang tanpa keterampilan khusus). Memang yang tetap bertahan dalam industri ini merupakan pemilik usaha yang terseleksi secara alam karena tidak sedikit pengusaha yang berjatuhan dan tak berani lagi bermain dalam industri yang sangat fluktuatif dalam banyak aspeknya.

Goncangan DOC yang harganya sangat naik-turun, goncangan pakan yang bahan bakunya terus menanjak harganya, goncangan penyakit, dan berbagai goncangan lainnya membuat usaha di industri ini perlu dibentengi oleh orang-orang (baik pemilik maupun karyawan) yang handal dan mencintai ayam. Tidak hanya di usaha berskala kecil, tapi juga usaha ber-



skala besar tentunya.

Sumberdaya manusia merupakan faktor penentu dalam konteks restrukturisasi perunggasan secara menyeluruh. Penguasaan teknis (*hard skill*) bagi setiap insan yang bergerak di bidang usaha ini jelas merupakan kemutlakan. Ini termasuk kemampuan dalam urusan pakan, kesehatan, penetasan, pembibitan, dan lain-lain. Yang lebih penting lagi adalah *soft skill* seperti kemampuan kepemimpinan, *manajerial*, *networking/jejaring*, komunikasi dan lain-lain. Yang terakhir ini seringkali terlupakan atau bahkan sengaja dilupakan karena alasan biaya. Bagi kalangan negativisme (orang yang berpikir negatif), meningkatkan kemampuan *soft skill* secara berkelanjutan merupakan *cost* (biaya) namun bagi kalangan positivisme (orang yang berpikir positif) hal itu adalah investasi.

Peningkatan dan pembinaan *hard skill* dan *soft skill* secara berkesinambungan di dalam suatu perusahaan menjadi sesuatu yang sangat relevan pada saat ini mengingat pendidikan tinggi di bidang peternakan mengalami degradasi mutu. Biaya pendidikan yang terus membumbung tinggi membuat mahasiswa ingin cepat lulus dengan bekal minim. Penjuruhan minat studi yang terlalu sempit juga semakin menambah minimnya pengetahuan dan penguasaan lulusan perguruan tinggi terhadap persoalan peternakan atau perunggasan yang sangat kompleks.

Terkait dengan peran dan fungsinya, manusia tadi diharapkan tidak terjebak dalam rutinitas suatu pekerjaan yang pada akhirnya menurunkan kinerja dan profesionalitas. Sampai-sampai Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) meminta mbah Marijan menutup Rapat Pimpinan Golkar di Jogjakarta beberapa bulan lalu. Hebatnya lagi, sambutan penutup mbah Marijan (yang hanya rakyat jelata dan tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik) menggunakan “jasa penerjemah” raja Kasultanan Ngayogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Jadi, Sri Sultan langsung yang men-*translit* sambutan mbah Marijan. JK beralasan, penutupan oleh mbah Marijan dilakukan untuk memotivasi kader Golkar agar memiliki disiplin tinggi, seperti yang dilakukan mbah Marijan dalam melaksanakan amanah dari Sri Sultan HB IX, menjaga Gunung Merapi.



Itu sebuah contoh kreatif, bagaimana me-recharge (isi ulang) pemikiran manusia agar terus memperbaiki kualitas dan potensi dirinya dalam menggeluti pekerjaan dan profesinya. Seribu satu cara dapat digunakan untuk me-recharge pemikiran manusia, termasuk yang bergerak di bidang perunggasan. Dengan diperkuat manusia-manusia yang memiliki motivasi tinggi dan *soft skill* yang diasah secara terus menerus, suatu perusahaan akan stabil dalam menghadapi berbagai goncangan. Dampaknya, secara keseluruhan, industri broiler akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya untuk menghasilkan daging murah nan ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal) sehingga akan dapat pula meningkatkan daya saing yang tinggi.

Juni 2007

8. Harus Tahu Dulu Strukturnya!

Industri broiler (ayam pedaging) tidak hanya padat teknologi dan modal saja tetapi juga ribet dalam hal distribusi dan pemasarannya mulai dari *Grand Parent Stock* (GPS) sampai produk olahannya seperti *chicken nugget*, sosis, dan lain-lain. Semua komponen (manusia, barang, dan jasa) yang terlibat dalam industri ini bergerak dan berputar cepat sehingga terjadinya “tubrukan” antar pihak yang berkepentingan seringkali tidak dapat dihindari. Dibanding komoditas ternak lainnya, mungkin, industri ternak broiler ini yang paling ribet.

Ketika isu restrukturisasi digulirkan, ada beberapa pertanyaan yang muncul di komunitas perunggasan maupun komunitas peternakan secara umum. Beberapa diantaranya adalah apakah ini restrukturisasi perunggasan atau restrukturisasi industri perunggasan? Apakah restrukturisasi atau strukturisasi perunggasan? Unggas yang mana yang perlu dan yang harus direstrukturisasi atau distrukturisasi? Ada juga pertanyaan, apakah batas yang jelas antara sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan sektor 4 sehingga siapapun memiliki persepsi yang sama? Dan lain-lain pertanyaan sejenis.





Siapapun berhak dan sah-sah saja mendefinisikan dan menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana restrukturisasi perunggasan. Yang jelas, sampai saat ini, memang belum ada kesamaan pandangan/persepsi tentang restrukturisasi. Dua pembicara dalam Seminar Internasional Vaksinasi Avian Influenza 11-12 Juni 2007 di Hotel Grand Melia Jakarta memiliki jawaban berbeda ketika ditanya tentang restrukturisasi. Pembicara pertama berpendapat bahwa restrukturisasi adalah penataan mata rantai pemasaran unggas mulai dari kandang sampai konsumen. Pembicara kedua menyatakan bahwa restrukturisasi adalah penataan pemeliharaan unggas yang selama ini dipelihara di pekarangan rumah (*backyard farming*) mulai dari registrasi telurnya sampai pemusnahan sebagian unggas kampung. Adapun pemerintah sendiri (dalam hal ini disuarakan Direktorat Budidaya Non Ruminansia) berpendapat bahwa restrukturisasi adalah penataan industri perunggasan mulai dari hulu sampai hilir, yang menyangkut semua ternak unggas (termasuk ayam broiler yang sudah terindustrialisasi maupun ayam kampung).

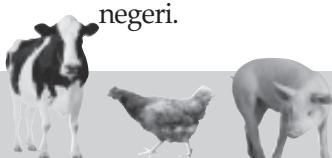
Logikanya, jika ada restrukturisasi (menata kembali struktur) tentunya



harus ada struktur yang mau ditata tersebut. Kalau strukturnya tidak diketahui terlebih dahulu, bagaimana akan melakukan restrukturisasi? Tanpa mengetahui strukturnya, sulit menentukan sasaran yang tepat untuk direstrukturisasi dan sulit juga menentukan metode yang digunakan untuk merestrukturisasi. Kesulitan ini tentunya tidak hanya terbatas pada upaya pemberantasan dan pengendalian virus AI saja tetapi juga pada berbagai macam penyakit lainnya. Sebaliknya, dengan mengetahui struktur industri perunggasan dari hulu sampai hilir secara jelas dan gamblang, maka akan sangat mudah bagi siapapun untuk menentukan sasaran yang ingin direstrukturisasi dan mudah pula mengena sasarannya.

Walaupun industri broiler di Indonesia itu sangat rumit, ribet, dan seringkali ricuh; rupanya strukturnya sederhana setelah dipilah-pilah berdasarkan siapa bergerak di usaha apa; serta dipetakan tipe pengusahaannya mulai dari sektor hulu sampai hilir. Dengan memahami struktur industri broiler ini secara baik, pemerintah (pusat maupun daerah) juga akan terbantu dalam membuat kebijakan yang kondusif bagi seluruh pelaku di industri broiler ini. Bagaimanapun, kebijakan yang dilahirkan pemerintah dalam menata industri broiler ini seyogyanya spesifik dan tidak pukul rata karena memang ada perbedaan antara pelaku industri kelas kakap, kelas sedang, dan kelas kecil. Para pelaku industri itu sendiri juga akan tahu dimana posisinya dalam struktur tersebut sehingga diharapkan juga tahu apa peran dan tanggung jawabnya.

Adanya struktur industri broiler yang jelas dan gamblang diharapkan juga mempermudah upaya membuat sistem informasi berbasis komputer terkait dengan pengendalian dan pemberantasan *Avian Influenza*, yang bermanfaat tidak hanya bagi para praktisi di industri broiler tetapi juga bagi pemerintah. Tentunya sistem informasi yang tengah dirancang tersebut dapat dikembangkan lagi penggunaannya dalam rangka menata industri broiler secara lebih rapi, terstruktur, dan profesional sehingga efisiensi dan produktivitasnya dapat ditingkatkan. Ini semua diharapkan agar produk broiler memiliki daya saing yang lebih tinggi di dalam maupun di luar negeri.



Oleh karena itu, restrukturisasi perunggasan (baik yang sudah ter-industrialisasi maupun yang belum) mutlak dilakukan tidak hanya karena adanya wabah penyakit *avian influenza* saja tetapi seharusnya lebih dikarenakan tuntutan profesionalisme untuk meningkatkan daya saing dalam industri broiler di Indonesia. Ini juga sejalan dengan visi RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang saat ini dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Juli 2007

9. Menyikapi Perda DKI No 4/2007

Dalam upaya pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas hidup di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 telah diterbitkan. Yang diatur dalam Perda tersebut diantaranya adalah larangan pemasukan unggas pangan (termasuk broiler dan ayam kampung) dari luar Jakarta ke Tempat Penampungan Ayam (TPnA) di dalam wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan Perda tersebut, dalam waktu tiga tahun, seluruh TPnA sudah harus direlokasi. Bila hal ini tidak dilakukan oleh para pemilik TPnA, maka pemda akan menutup paksa TPnA dan menyita seluruh unggasnya. Tempat Pemotongan Ayam (TPA) juga akan direlokasi dalam kurun waktu yang sama.

Semangat yang ingin ditunjukkan dalam Perda tersebut adalah bahwa DKI Jakarta harus bersih dari peredaran ayam hidup; harus bersih dari usaha pemotongan ayam hidup yang kumuh dan tidak higienis; dan produk broiler yang dipasarkan di dalam wilayah DKI Jakarta sudah dalam bentuk karkas yang bersih, sehat, aman, dan higienis. Dengan demikian, merebaknya virus flu burung di wilayah DKI Jakarta dapat dihindari secara total. Bagaimanapun juga, dengan telah meninggalnya lebih dari 70 orang karena flu burung, virus *Avian Influenza* (AI) masih harus mendapat perhatian penuh.

Tentu saja konsekuensi dari implementasi Perda tersebut sangat besar





terhadap komunitas yang terkait dengan aktivitas penampungan dan pemotongan ayam hidup di DKI Jakarta. Setidaknya ini mencakup pemilik usaha penampungan dan pemilik usaha pemotongan ayam hidup, tukang potong ayam yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan tersebut, pedagang eceran ayam hidup, peternak yang sudah terbiasa memasok kebutuhan warga DKI Jakarta melalui TPnA, dan lain-lain profesi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan itu. Pastinya, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan yang tentunya akan menimbulkan dampak sosial yang sangat serius.

Namun demikian, di sisi lain, implementasi Perda DKI tersebut juga akan memunculkan peluang besar dan prospektif bagi daerah yang mengelilingi DKI Jakarta seperti Bogor, Sukabumi, Subang, Tangerang, dan lain-lain. Lahan yang masih luas (setidaknya jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang sudah sangat padat) di daerah tersebut merupakan modal penting dalam penyediaan lokasi TPnA dan lokasi Rumah Potong Ayam (RPA) modern untuk menyediakan daging ayam bagi warga DKI Jakarta yang setiap harinya memerlukan ratusan ton. Pemerintah daerah tersebut berpeluang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bila mau membangun fasilitas RPA yang kemudian dikerjasamakan dengan pebisnis



dalam operasionalisasinya. Dengan demikian, masyarakat atau warga di daerah tersebut juga berpeluang memperoleh pekerjaan dari usaha RPA. Akibat langsungnya adalah peningkatan kegiatan ekonomi di daerah-daerah penyangga DKI.

Sebenarnya, terkait dengan tingkat kepadatan penduduk DKI Jakarta yang sangat tinggi, dibangunnya TPnA baru dan RPA modern di daerah penyangga kota Jakarta merupakan sesuatu yang sangat ideal. Daging ayam yang dihasilkan akan terjamin mutu dan kebersihannya karena diproses dengan fasilitas RPA modern. Limbah RPA juga dikelola dengan baik untuk menghindari pencemaran lingkungan penduduk karena masih tersedianya lahan yang cukup luas dan jauh dari tempat pemukiman penduduk. Justru yang menjadi permasalahan adalah kebiasaan orang atau masyarakat Indonesia yang lebih suka membeli daging segar dan tidak dalam keadaan beku. Data empiris menunjukkan bahwa 80% daging ayam diperjual belikan dalam keadaan segar (habis dipotong) sedangkan 20% dalam bentuk daging beku atau karkas beku.

Oleh karena itu, dalam menerapkan perda tersebut, pemda DKI dan pemda sekitarnya perlu membangun komitmen bersama untuk mengatasi kemungkinan timbulnya dampak buruk bagi banyak orang ini. Peran dan tanggung jawab masing-masing pemda perlu dirumuskan secara matang, proporsional, dan berkeadilan. Keterlibatan pebisnis yang lebih bisa berpikir praktis sangat membantu dalam mencari solusi yang pas. Yang juga penting untuk dilibatkan adalah kalangan akademisi yang diharapkan mampu meramu pemikiran banyak pihak dalam mencari solusi terbaik. Yang jelas, apapun solusi yang dipilih, tidak akan dapat menyenangkan semua pihak. Ini wajar.

Semoga dialog publik bertajuk "*Unggas dilarang masuk DKI, konsekuensinya?*" pada tanggal 9 Agustus 2007, yang terselenggara atas kerjasama GOPAN, PINSAR, dan TROBOS dapat memberikan masukan solusi terbaik dengan risiko terkecil.

Agustus 2007



10. Hasil Catatan Dialog Publik

Dialog publik tentang penataan Tempat Penampungan Ayam (TPnA) dan Tempat Pemotongan Ayam (TPA) yang dituangkan dalam Perda DKI Nomor 4/2007 mengindikasikan bahwa Perda tersebut masih belum diterima secara bulat oleh para pelaku bisnis ayam pedaging (broiler) di sektor hilir. Beberapa pemilik TPnA, TPA, dan pengecer broiler mengeluh diberlakukannya Perda tersebut yang secara teknis sulit dilaksanakan sehingga mereka akan mempertahankan keberadaan TpnA/TPA sampai ada solusi terbaik. Dari hasil dialog tadi, tampaknya semua pihak harus menahan diri agar tidak terjadi gejolak sosial yang merugikan banyak pihak. Apalagi bangsa kita ini juga lagi babak belur dengan segudang permasalahan yang belum dapat terselesaikan.

Tampaknya ada beberapa hal mendasar yang membuat perda tersebut tidak atau belum dapat diterima secara utuh. *Pertama*, kasus *Avian Influenza* (AI) yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Perda untuk melakukan relokasi TPnA/TPA ternyata tidak terbukti. Sampai saat ini, tidak ada orang yang bekerja atau yang bertempat tinggal di atau dekat TPnA/TPA meninggal dunia karena AI. Jadi, kalau demikian adanya, kenapa harus direlokasi, kata beberapa pengusaha.

Kedua, pemda DKI belum menyiapkan lahan baru yang layak untuk TPnA/TPA yang direlokasi. Lahan yang disediakan di Rawakepiting, sebagaimana dilaporkan oleh salah seorang yang mengecek lokasi tersebut, sangat tidak layak untuk digunakan dalam aktivitas TPnA/TPA. Selain infrastrukturnya sangat tidak memadai, lokasi tersebut juga sudah berdekatan dengan pemukiman penduduk. Artinya, relokasi TPnA/TPA bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah saja.

Ketiga, rencana jadwal relokasi tidak mempertimbangkan pola berbisnis komoditas broiler sehingga dikhawatirkan akan mengganggu transaksi jual beli antara produsen (peternak) dan konsumen (masyarakat luas). Apalagi bulan puasa dan hari raya Idul Fitri yang biasanya tinggi tingkat transaksinya juga sudah semakin dekat. Ini mengindikasikan bahwa penerapan perda tersebut perlu direncanakan secara lebih baik lagi.



Tanpa ada niat untuk memihak siapapun, tampaknya ketiga alasan tersebut realistik dan perlu dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator yang harus melindungi seluruh warganya dari semua kepentingannya. Memang tidak mungkin bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan menyenangkan semua pihak tanpa ada pihak manapun yang merasa dirugikan. Namun demikian, pemerintah harus dapat membuktikan bahwa kebijakan yang dihasilkan jauh lebih banyak memberi rasa sejuk bagi sebagian besar warganya daripada memberi nuansa panas nan meresahkan.

Dialog publik tanggal 9 Agustus 2007 lalu memberi banyak pelajaran bagi banyak pihak khususnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang menyusun dan mengesahkan Perda tersebut. Walaupun Perda tersebut disusun atas dasar masukan dari masyarakat luas dan komunitas perunggasan, kenyataannya produk yang dihasilkan masih menimbulkan resistensi tinggi bagi para pelaku usaha. Lembaga DPRD yang merupakan perwakilan rakyat dan diberi mandat menggodok dan mengesahkan perda tampaknya juga belum memiliki suara yang sama dengan konstituennya (warga masyarakat yang diwakili). Memang tidak



mudah mengatur dan menata hal apapun yang berhubungan dengan urusan perut atau periuk nasi orang. Apalagi periuk nasi milik ribuan orang yang telah sekian lama menggantungkan hidupnya dari aktivitas yang akan ditata tersebut.

Karena ini menyangkut masalah bisnis, pendekatan yang digunakan dalam menata TPnA/TPA tampaknya harus berbasis bisnis pula. Sepanjang pelaku bisnis tidak dirugikan dalam menjalankan usahanya dan keberlanjutan usahanya tidak terancam, maka relokasi di manapun tempatnya dan apapun alasannya bukan merupakan persoalan penting.

Pendekatan bisnis dalam menata TPnA/TPA di DKI Jakarta perlu dipahami secara baik oleh para pengambil kebijakan. Ini tidak berarti bahwa kebijakan pemerintah harus menyesuaikan dengan kemauan para pebisnis semata, tetapi kebijakan tersebut harus bisa menunjukkan kontribusi pemerintah secara proporsional dan riil bagi perkembangan bisnis perunggasan, khususnya yang terkait dengan TPnA/TPA di lokasi yang baru. Tentunya para pebisnis juga harus dapat meyakinkan pemerintah bahwa kontribusi pemerintah tadi akan berdampak positif bagi peningkatan peluang kerja masyarakat, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta peningkataan kegiatan roda ekonomi masyarakat.

September 2007

11. Himpuli dan Flu Burung

Ketika jumlah manusia yang dinyatakan positif terinfeksi virus flu burung semakin banyak meninggal, unggas lokal termasuk ayam kampung menjadi sasaran utama untuk dimusnahkan. Uggas lokal dituding sebagai makhluk hidup yang menyebarkan virus dan menularkan virus ke manusia yang mengakibatkan kematian lebih dari 100 orang jumlahnya. Semua pergerakan unggas lokal diawasi dan segala jenis unggas hias atau jenis lainnya yang dipelihara di permukiman perlu disertifikasi atau dimusnahkan apabila unggas tersebut tidak dikandangkan secara benar. Di DKI





Jakarta, ada Peraturan Daerah yang melarang masuknya unggas hidup ke wilayah DKI pada tahun 2010 nanti. Ribuan ayam kampung dan unggas lokal lainnya yang hidup di wilayah DKI Jakarta sudah dibinasakan. Para pedagang, peternak ayam kampung, dan pemilik unggas pun berteriak, dan itu semua memicu lahirnya Himpunan Peternak Uggas Lokal Indonesia (HIMPULI) pada tanggal 6 Juli 2007 di Palembang. Apresiasi perlu disampaikan kepada para tokoh peternakan unggas lokal dan Direktorat Budidaya Ternak Non Ruminansia Ditjen Peternakan yang memfasilitasi dan mendorong lahirnya himpunan tersebut.

Tidak ada yang membantah secara resmi bahwa unggas lokal sebagai pembawa virus flu burung karena sebagian diantara populasi unggas tersebut memang memiliki daya tahan tinggi terhadap serangan virus tersebut. Artinya, walaupun unggas tersebut terinfeksi virus flu burung, hewan tersebut tidak mati. Yang masih menjadi pertanyaan besar adalah mengapa manusia yang meninggal karena terinfeksi virus AI bukan para peternak unggas lokal itu atau para pedagang unggas tetapi justru orang awam yang



dalam kesehariannya tidak sering bersentuhan dengan unggas itu. Hal ini yang membuat para peternak atau hobiis unggas lokal merasa sangat keberatan bila makhluk yang dicintainya itu dimusnahkan. Di sini muncul konflik antara pemerintah yang melakukan tindakan pemusnahan unggas lokal dengan para peternak/pedagang unggas lokal.

Dalam konteks penyalamanan nyawa manusia dari jumlah kematian yang lebih besar lagi, tindakan pemerintah DKI Jakarta untuk memusnahkan unggal lokal termasuk ayam kampung yang hidup secara umbaran (tidak dikandangkan) sangat tidak salah dan perlu didukung karena tingkat kejadian orang meninggal akibat virus flu burung di DKI Jakarta menduduki peringkat teratas di Indonesia. Namun demikian, apabila tindakan pemusnahan unggas lokal dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, maka hal ini yang perlu dicegah. Potensi ayam kampung sebagai salah satu aset sumberdaya genetik Indonesia sangat besar bagi masyarakat di perdesaan. Adanya sifat ayam kampung yang resisten terhadap virus flu burung menunjukkan adanya gen penting yang mungkin saja sangat berpotensi secara ekonomis. Ditambah lagi dengan temuan yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu dari tiga pusat domestikasi ayam di dunia (baca artikel ayam kampung di TROBOS edisi Mei 2008), maka keberadaan unggas lokal Indonesia di muka bumi harus dipertahankan atau dilestarikan.

Untuk itu, program penataan usaha perunggasan atau sering disebut restrukturisasi perunggasan yang menjadi salah satu agenda kegiatan penting KOMNAS Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (FBPI) tidak dapat digeneralisasi dalam penerapannya. Perlu pendekatan yang berbeda dalam menata unggas industri (ayam ras broiler maupun layer) dan unggas lokal. Unggas industri yang terlahir dengan tingkat keseragaman genetik tinggi jauh lebih mudah dalam mengendalikannya dibandingkan unggas lokal yang sangat beragam karakteristik genetiknya.

Melalui HIMPULI yang saat ini menghimpun lebih dari 58 tokoh peternak dan tersebar di 22 propinsi di seluruh Indonesia, akan sangat



efektif bagi pemerintah pusat maupun daerah di bawah koordinasi KOMNAS FBPI untuk menata unggas lokal di Indonesia dalam upaya mengendalikan dan menghentikan penyebaran virus flu burung di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang mengerti dan memahami beternak ayam kampung atau unggas lokal lainnya. Mereka dapat menjadi agen perubahan perilaku masyarakat yang memelihara ayam kampung secara asal-asalan di perdesaan. Mereka sangat berkepentingan terhadap kelangsungan hidup unggas lokalnya karena telah menjadi sumber kehidupannya selama ini. Mereka juga berkeinginan memusnahkan virus flu burung dari wilayah Indonesia. Yang terpenting, mereka berada di garda terdepan dalam menangani virus flu burung di Indonesia sehingga merupakan kumpulan orang yang tepat untuk diberi peran penting ke depan.

Akan sangat bijaksana apabila asosiasi yang menangani unggas industri juga mengambil inisiatif dan peran yang lebih besar dalam ikut menata unggas lokal Indonesia. Menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mensinergikan para pelaku bisnis unggas lokal dan pelaku bisnis unggas industri dalam menata perunggasan nasional yang lebih baik dan lebih profesional. *Good luck!!!*

Juni 2008

12. Skenario Kompensasi yang Produktif

Istilah kompensasi menjadi sering disebut seiring dengan maraknya kasus flu burung di Indonesia. Kompensasi dalam konteks ini merupakan penggantian dengan sejumlah uang atas unggas yang didepopulasi (dimusnahkan). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Peternakan No.21055/Kpts/KU.510/F/04/2008, hanya peternak yang memiliki unggas sampai dengan 500 ekor yang memperoleh kompensasi. Uggas (ayam, itik, entog, burung hias, dan sejenisnya) yang terinfeksi virus *avian influenza* atau yang masih sehat akan diganti dengan uang apabila didepopulasi menurut justifikasi dokter hewan berwenang atas nama pemerintah.



Ada beberapa kelemahan yang muncul dalam implementasi skema kompensasi berdasar peraturan tersebut di atas. *Pertama*, hanya ada dua pihak saja yang terlibat dalam skema kompensasi yaitu pemerintah sebagai penyandang/pemberi kompensasi dan peternak sebagai pemilik unggas/penerima kompensasi. *Kedua*, proses birokrasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan calon penerima kompensasi dan jumlah unggas yang dikompensasi memerlukan waktu lama. *Ketiga*, proses pencairan dana pemerintah kepada penerima kompensasi juga memerlukan waktu yang panjang. Ini memang sudah aturan sebagai konsekuensi penggunaan dana publik. *Keempat*, skema kompensasi ini hanya sebatas kegiatan penggantian dana dari pemerintah kepada peternak berskala kecil. Tidak lebih dari itu. *Kelima*, pola pemberian dana seperti itu kurang mendidik dan mungkin tidak memberi dampak signifikan bagi perkembangan usaha perunggasan di Indonesia.

Beberapa kelemahan itu memungkinkan penerapan kompensasi di Indonesia tidak berjalan secara optimal. Peternak yang memiliki unggas lebih dari 500 ekor tentu keberatan. Apabila dana kompensasi per ekor unggas yang diberikan oleh pemerintah nilainya lebih tinggi daripada harga unggas tersebut bila dijual, ada upaya peternak untuk membuat unggasnya terinfeksi virus sehingga harus didepopulasi dengan harapan mendapat uang kompensasi. Belum lagi adanya salah sasaran dalam pemberian dana kompensasi serta kebocoran dana di sana sini. Oleh karena itu, perlu dirancang skema kompensasi yang lebih baik dan lebih berdaya guna.

Salah satu skema yang bisa dilakukan adalah skema yang melibatkan pemerintah, industri peternakan, lembaga independen, dan semua peternak atau pelaku usaha peternakan. Kompensasi di sini juga tidak hanya terkait dengan unggas dan virus AI saja tetapi untuk semua ternak. Kejadian AI di Indonesia harus dijadikan pelajaran berharga untuk merestrukturisasi atau menata industri peternakan di Indonesia, salah satunya melalui mekanisme kompensasi ini.

Dalam skema ini, industri peternakan sebagai pemilik modal, teknologi, dan manajemen profesional mengalokasikan sebagian dananya



dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk membantu meningkatkan keterampilan peternak atau pelaku usaha peternakan. Penggunaan dana CSR untuk kegiatan ini idealnya dikerjasamakan dengan lembaga independen (misalnya perguruan tinggi). Dengan adanya tiga pihak (industri, peternak, dan lembaga independen), tingkat keberhasilan dalam bekerjasama jauh lebih tinggi karena ada mekanisme saling mendukung dan saling mengawasi.

Sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan dana CSR dari kalangan industri, pemerintah harus mengalokasikan dananya untuk membangun infrastruktur publik yang berdampak secara langsung bagi perkembangan industri peternakan dan secara tidak langsung bagi masyarakat luas. Kompensasi juga dapat diwujudkan dalam bentuk insentif pajak atau stimulus lainnya. Untuk menjamin bahwa pihak pemerintah maupun pihak industri peternakan mengalokasikan dananya masing-masing dalam skema kompensasi ini, kedua belah pihak harus bersepakat dalam suatu perjanjian yang diikat secara hukum. Lembaga independen dapat pula dilibatkan sebagai saksi atau pengawas dalam kesepakatan tersebut.

Melalui skema kompensasi seperti itu, penggunaan dana industri dalam bentuk CSR bagi peternak akan tidak berbelit-belit. Peternak dan pelaku usaha di bidang peternakan juga akan lebih terampil dan profesional karena mendapat pelatihan atau supervisi dari pihak yang kompeten. Dana pemerintah juga digunakan sebagaimana mestinya karena untuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan publik. Infrastruktur ini tentunya akan sangat membantu industri peternakan dan peternak meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam bisnis peternakan. Dengan demikian, harga produk peternakan juga diharapkan akan lebih murah.

Semua pihak akan diuntungkan dan masyarakat luas pun akan menikmati produk ternak yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih terjangkau harganya. Pada gilirannya masyarakat juga akan semakin cerdas karena asupan konsumsi protein hewannya lebih banyak.

Maret 2009



13. Kendalikan Perijinan Perusahaan Peternakan

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2009, yang dimaksud dengan perusahaan peternakan adalah perorangan atau badan hukum yang sebelum menyelenggarakan usaha budidaya ternak di atas jumlah tertentu harus memperoleh ijin usaha dan persyaratan lainnya. Adapun peternak adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha budidaya ternak di bawah jumlah tertentu dan tidak memerlukan ijin dalam menjalankan usahanya. UU tersebut juga mengamanahkan agar pemerintah mendorong masyarakat sebanyak banyaknya untuk menyelenggarakan budidaya ternak. Pemerintah perlu memanfaatkan definisi tersebut untuk mengatur secara tegas perlu tidaknya memberi ijin pendirian usaha peternakan berkapasitas di atas jumlah tertentu.

Ketegasan tersebut merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi gejolak di industri peternakan khususnya unggas (ayam ras petelur dan ayam ras pedaging), tentunya dengan dasar pertimbangan kuat dan objektif. Seperti terjadi pada peternakan ayam ras petelur dalam beberapa bulan terakhir ini, harga DOC ayam petelur mencapai harga tertinggi (Rp 13.500,-) dalam sejarah industri peternakan tersebut. Para tokoh perunggasan mensinyalir bahwa penyebab tingginya harga tersebut diantaranya adalah permintaan tinggi DOC sebagai akibat berdirinya perusahaan ayam petelur berkapasitas besar; serta kurangnya pasokan DOC sebagai akibat serangan penyakit di beberapa perusahaan pembibitan ayam petelur.

Jika berdirinya perusahaan ayam petelur berkapasitas besar tersebut benar, di masa mendatang akan ada gejolak baru yaitu turunnya harga telur karena kelebihan pasokan sehingga peternak ayam petelur menderita kerugian besar lagi. Kalau keseimbangan antara pasokan dan permintaan tidak dijaga, keresahan dalam berbisnis ini akan terus berlanjut dan membuat para pelaku usaha frustrasi. Mengendalikan perijinan pendirian perusahaan peternakan mutlak harus dilakukan karena ada Undang Undang yang memberi amanah kepada pemerintah untuk melakukannya. Jika tidak dikendalikan, berarti pemerintah sengaja melakukan pembiaran



terhadap situasi yang cenderung akan mematikan peternak berskala kecil dalam jangka panjang.

Sebagai landasan terpenting dalam mengendalikan perijinan tersebut adalah tersedianya data yang benar tentang populasi ternak mulai dari *Grand Parent Stock* (GPS), *Parent Stock* (PS), dan *Final Stock* (FS) nya. Dengan mengetahui data populasi tersebut secara akurat, pemerintah dapat memprediksi jumlah pasokan telur dan daging ayam secara nasional dari waktu ke waktu. Adapun untuk mengetahui kebutuhan telur dan daging ayam (aspek permintaan/*demand*), pola naik turunnya konsumsi kedua komoditas tersebut mestinya dapat diprediksi lebih mudah karena banyak tersedia informasi tentang produksi unggas. Jika semua pihak (pemerintah dan pelaku usaha) transparan, maka data yang diperoleh dapat dijamin kebenarannya dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk memutuskan perlu tidaknya memberi ijin kepada investor baru yang ingin berbisnis di dunia perunggasan.

Namun demikian, agar dalam penyediaan data populasi benar-benar dapat dijamin kebenarannya, perlu ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Bukan hanya tidak percaya kepada pemerintah yang diberi mandat untuk mengatur industri dan bisnis perunggasan, namun adanya pengawas independen dari pihak ketiga tersebut juga dapat menjadi



jaminan terhadap kredibilitas pemerintah dalam melakukan semua kebijakannya demi terciptanya suasana kondusif bagi pelaku usaha. Kita harus mengikuti pola pengawasan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK (sebagai pihak ketiga) sehingga terjadinya transaksi dan besarnya nilai uang yang ditransaksikan antara dua pihak dapat diketahui dan kebenarannya dapat dipercaya. Jika tidak ada pihak ketiga seperti PPATK, ada kemungkinan terjadinya "main mata antara pihak satu dan pihak kedua" yang membuat situasi menjadi lebih runyam lagi.

Pihak ketiga yang diberi amanah untuk menjadi pengawas independen itu sebaiknya lembaga pemerintah atau lembaga swasta terakreditasi yang profesional di dalam bidang pengawasan dan bukan bagian dari komunitas peternakan. Lembaga tersebut tentunya memiliki kode etik dan dapat dipegang integritas dan kredibilitasnya. Yang terpenting, lembaga tersebut harus diberi pemahaman yang baik tentang berbagai hal teknis dalam industri peternakan. Misalnya tentang definisi bibit dan non-bibit; FCR (*feed convention ratio*); atau hal teknis lainnya. Pemahaman yang baik akan dapat menambah profesionalitas lembaga itu dalam melakukan pengawasan nanti.

Seperti harapan publik, khususnya peternak berskala kecil yang sebagian besar bergerak di aspek budidaya ternak, sudah saatnya pemerintah menggunakan kekuasaan yang diamanahkan dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2009 untuk mengatur dan mengendalikan industri besar ini agar tercipta suasana kondusif yang saling menguntungkan. Pemerintah harus bisa melakukan amanah tersebut karena dilindungi oleh Undang Undang. Tanpa intervensi pemerintah (salah satunya melalui *on-off* perijinan), situasi dalam industri dan bisnis peternakan di Indonesia akan semakin semrawut dan semakin nyaring jeritan peternak berskala kecil. Dan ini artinya cermin kegagalan pemerintah dalam melindungi dan menjamin warganya yang beraktifitas di bidang peternakan.

Juni 2012



14. Integrasi Usaha Perunggasan

Sudah bertahun tahun hubungan peternak budidaya ayam ras pedaging dan perusahaan Peternakan yang menerapkan integrasi vertikal kurang harmonis. Perusahaan integrasi selalu disalahkan dan pemerintah dianggap tidak mampu melindungi peternak ketika harga jual ayam di bawah *Break Even Point* (BEP). Peternak budidaya selalu menuntut pemerintah agar perusahaan integrator dilarang melakukan usaha budidaya ternak. Namun pasal 29 ayat (1) UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan bahwa "*budidaya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus*" tidak memungkinkan pemerintah melakukan pelarangan melakukan budidaya bagi perusahaan integrasi.

Harga jual ayam hidup yang seringkali berada di bawah BEP memang sangat memukul para peternak budidaya. Ini sangat berbeda dengan perusahaan integrasi vertikal. Ketika segmen usaha budidaya terganggu, perusahaan integrasi dapat menutup kerugiannya dari segmen usaha lainnya seperti dari usaha pakan atau bibit atau produk olahannya. Banyak peternak budidaya telah gulung tikar akibat fluktuasi harga tersebut sehingga perusahaan integrasi semakin menguasai pasar.

Namun demikian, saya melihat tidak ada yang salah dengan penerapan integrasi. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, pola integrasi dalam banyak



usaha (tidak hanya peternakan ayam saja) menjadi suatu keharusan. Dari aspek ekonomis, pola integrasi yang menerapkan usaha agribisnis (dari hulu sampai hilir) memang memberikan keuntungan lebih baik dan menjamin keberlanjutan usaha.

Bagaimana dengan peternak budidaya yang terombang-ambing nasibnya oleh pertarungan harga di antara perusahaan integrasi? Menuntut pemerintah agar harga ayam hidup dipatok dengan harga khusus tampaknya tidak mungkin. Menuntut perusahaan integrasi untuk menurunkan harga sarana produksi, juga agak sulit karena hal itu tergantung situasi pasar. Yang terjadi justru sebaliknya, ketika harga jual ayam hidup anjlog, harga sarana produksi malah naik.

Tapi pemerintah harus berbuat sesuatu kepada peternak budidaya. Tidak boleh tidak. Mengacu pada pendekatan efisiensi dan produktifitas dalam mengembangkan bisnis ayam pedaging ini, pemerintah harus mendorong peternak untuk menerapkan pola integrasi juga. Peternak harus dapat menyediakan bibitnya sendiri, pakannya sendiri, pengolahan dagingnya sendiri, dan tentunya tetap melayani pelanggan setianya agar tidak berpaling ke lainnya. Pola agribisnis utuh dari hulu sampai hilir dikuasai peternak.

Modalnya? Kalau modal uang tidak cukup, maka modal kepercayaan, kebersamaan, dan kekompakan sesama peternak sangat mungkin untuk membuat usaha peternakan integrasi. Karena butuh dana besar, peternak budidaya harus bersatu dalam penggalangan dana dan membentuk wadah yang disebut Badan Usaha Milik Peternak (BUMP). Badan ini dibentuk murni untuk tujuan bisnis dan bukan sekedar kumpul-kumpul menggalang aspirasi sebagaimana asosiasi atau perhimpunan atau forum yang selama ini ada.

Anggota BUMP harus sudah berpengalaman dalam usaha ayam ras pedaging serta punya kesamaan visi dan idealisme. Agar bangunan BUMP ini kokoh landasannya, maka aturan main disiapkan sebaik-baiknya. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) disusun seadil dan setransparan mungkin. Hak dan kewajiban harus diuraikan secara



sangat jelas. Pembagian keuntungan dan resiko kerugian juga dibagi secara profesional dan proporsional. Melalui BUMP, para pemegang sahamnya dapat menjalankan usaha integrasi yaitu memiliki peternakan bibit sendiri, memiliki *feedmill* sendiri, menyediakan bahan baku pakan sendiri, dan jika perlu membangun restoran sendiri untuk menjual produknya. Jadi, BUMP tidak tergantung kepada perusahaan integrasi tetapi bisa bermitra dalam menata penguasaan pasar.

Pemerintah akan dapat membantu peternak untuk membangun BUMP tersebut karena saat ini pemerintah sedang menyiapkan perangkat hukumnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Peternak. PP tersebut sudah di sekretariat negara dan tidak lama lagi diharapkan dapat ditandatangani Presiden. Melalui PP ini, pemerintah berkewajiban memfasilitasi upaya pembentukan BUMP.

Dengan meningkatkan porsi usaha dari "hanya melakukan budidaya saja" menjadi usaha "agribisnis terintegrasi" di bawah kebersamaan dalam BUMP, biaya produksi bisa ditekan, harga ayam dapat berdaya saing sehingga daging ayam semakin banyak dikonsumsi karena harga lebih terjangkau. Sumberdaya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam beternak serta energi yang dimiliki lebih baik dimanfaatkan untuk berpikir ekspor produk perunggasan daripada dimanfaatkan untuk berkelahi dengan sesama saudara sebangsa di kandang sendiri.

Januari 2013





G

Apresiasi Peternakan



1. Karya Sang Pioneer

Menjadi *pioneer* atau pemulai dalam suatu aktivitas seringkali tidak dapat dirancang secara sadar agar suatu saat nanti hidupnya akan dikenang sebagai seorang *pioneer*. Justru yang sering terjadi adalah sang *pioneer* itu tidak menyadari bahwa dirinya merupakan orang pertama dalam hal tertentu. Dan rupanya orang-orang yang termasuk dalam kategori *pioneer* biasanya memiliki sikap tekun, konsisten, ingin tahu, dan tulus demi mewujudkan sesuatu yang diimpikannya.

Prof. drh. DTH Sihombing, M.Sc, PhD dapat dikategorikan sebagai *pioneer*. Sosok yang telah meletakkan jabatan fungsionalnya sebagai guru besar di Fakultas Peternakan IPB tanggal 23 April 2005 lalu karena pensiun setidaknya memiliki dua karya besar. *Pertama*, Pak Sihombing muda mulai membangun dan mengembangkan Laboratorium Ilmu Produksi Ternak Babi di awal-awal berdirinya Fakultas Peternakan IPB. Totalitas waktu dan pemikirannya dicurahkan untuk pengembangan ilmu tersebut. Akumulasi dari apa yang diketahuinya, dari tangannya terbit buku Ilmu Ternak Babi setebal sekitar 600 halaman yang sangat komprehensif pada tahun 1994.

Kedua, karena jenuh dengan ilmu ternak babi yang sudah mantap perkembangannya, Pak Sihombing yang sudah professor tergelitik untuk merintis dan mengembangkan ilmu dan teknologi budidaya satwa harapan (semua hewan non ternak yang berpotensi menjadi hewan ternak). Yang termasuk kelompok ini misalnya cacing tanah, bekicot, kupu-kupu, tikus, lebah, mencit, ulat sutera, ular, dan masih banyak lagi karena Indonesia memang kaya keanekaragaman fauna. Dari tangannya pula terbit lagi buku Ilmu Lebah Madu dan buku Satwa Harapan I tahun 1999. Buku Satwa Harapan II, III, dan IV juga sudah siap cetak bila ada investor yang mau menerbitkannya. Hebatnya lagi, rumah yang tadinya dikontrakkan sebagai rumah hunian direlakan untuk digunakan sebagai kandang mencit. Di situ Prof. Sihombing melakukan penelitian tentang berbagai hal yang terkait dengan mencit. Uang gaji juga ikut terkuras karena aktivitas penelitian mandirinya.



Akibat ini semua, istrinya ikut gerah karena gaji yang diterima dari sang suami berkurang dan tetangga rumah resah karena bau mencit.

Jiwa ingin tahu yang melandasai seorang peneliti atau ilmuwan seperti Pak Sihombing terkadang membuat anggota keluarganya atau rekan-rekannya geleng-geleng kepala. Betapa tidak, dirinya sendiri yang berusia hampir 70 tahun dijadikan bahan percobaan. Ketika itu (tahun 2003 lalu) beliau terkena stroke dan masuk rumah sakit berhari-hari. Fisiknyapun terlihat lemah dan bicaranya juga agak sulit dimengerti. Setelah pulih dan agar hal serupa tidak terulang lagi, dokter menyarankan untuk tidak merokok. Hanya dipatuhi beberapa hari, Pak Sihombing merokok lagi dengan alasan ingin tahu sampai berapa lama saya dapat hidup dengan kondisi seperti itu dengan tetap merokok.

Terlepas dari gayanya yang agak tak biasa, banyak hal lain yang dapat dijadikan teladan dari sosok yang dalam kesehariannya selalu memakai topi dan berbaju batik ini. Prof. Sihombing sangat demokratis dan menganggap siapapun (tua, muda, kaya, miskin, pria, perempuan) sebagai mitra dan terbuka menerima segala perbedaan pendapat. Semua jenis hewan ternak maupun non-ternak selalu disapa "kawan" bila mengajar di hadapan mahasiswa. Cara mendidik dan mengajar murid-muridnya atau staf-staf dosen binaannya tidak dengan kata-kata yang berbusa-busa tetapi lebih banyak dengan menunjukkan tindakan dan tingkah lakunya sebagai seorang ilmuwan dan akademisi sejati seperti diceritakan di atas.

Tidak ada seorang manusia ciptaan Tuhan di dunia ini yang sempurna. Tak terkecuali Pak Sihombing yang tentu saja memiliki kekurangan di sana sini. Namun demikian, tidak ada manfaatnya sama sekali melihat sisi negatif seseorang. Akan sangat lebih baik untuk belajar dari sisi positifnya. Ketekunan dan ketulusan Prof. Sihombing sebagai seorang guru dalam mengabdikan dirinya untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sikap yang layak diteladani.

Atas jasa-jasa dan keteladanan yang ditunjukkan selama pengabdiannya, di akhir masa baktinya, para mantan mahasiswa bimbingan dan



anak didiknya menggelar acara purnabakti Prof. DTH Sihombing di Ball Room Hotel Salak Bogor pada tanggal 23 April 2005 dengan tajuk "Karya Sang Pioneer". Selamat terus berkreasi Pak.....

Mei 2005

2. Vaksin AI Rekombinan

Rupanya penyakit *Avian Influenza* (AI) yang memporak-porandakan dunia perunggasan pada tahun 2004 lalu masih belum berlalu. Serangan virus AI subtipe H5N1 kembali terjadi di awal-awal tahun 2005. Banyak pihak menunjukkan kepanikan dan lagi-lagi peternak yang mengalami banyak kerugian. Dengan segala upaya dan keterbatasan yang dimiliki, pemerintah berbuat semaksimal mungkin untuk mencegah meluasnya virus tersebut. Dalam menangani kasus penyakit AI ini, Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, melalui Direktorat Kesehatan Hewan, menerapkan kebijakan vaksinasi dan berharap Indonesia bebas AI pada akhir tahun 2007.

Terkait dengan perkembangan bioteknologi yang semakin canggih, belum lama ini telah diperkenalkan teknologi *reverse genetics* untuk membuat vaksin AI rekombinan. Dalam bahasa awam, prinsip pembuatan vaksin rekombinan adalah sebagai berikut. Virus ganas (biasanya subtipe H5N1) yang selama ini mematikan ribuan unggas diisolasi. Bagian tertentu (sekitar lima belas nukleotida) dari salah satu segmen molekul RNA dihilangkan sehingga sifat ganas (virulen) dari virus tersebut hilang. Kemudian segmen RNA yang telah direkayasa ini dimasukkan bersama segmen lainnya ke dalam virus subtipe lain yang bersifat avirulen (tidak ganas). Perlu disampaikan di sini bahwa genom virus AI terdiri atas delapan segmen molekul RNA. Untuk virus rekombinan ini, enam segmen molekul RNA berasal dari virus avirulen sedangkan dua segmen lainnya (salah satunya sudah direkayasa) berasal dari virus ganas tadi. Virus rekombinan yang sudah avirulen ini kemudian diinaktivkan untuk digunakan sebagai



master seed dalam pembuatan vaksin.

Dibanding dengan cara konvensional yang selama ini digunakan untuk membuat *master seed* dalam pembuatan vaksin AI, bioteknologi *reverse genetics* tersebut sangat efisien, produktif, dan akurat. Dengan teknologi ini, kita dapat secara pasti menggunakan virus ganas penyerang unggas (tetapi sudah direkayasa) sebagai *master seed* untuk pembuatan vaksin. Dengan demikian, susunan nukleotida pada vaksin memiliki tingkat kesamaan tinggi dengan virus penyerangnya (sekitar 99%). Ini jauh lebih tinggi dibanding vaksin konvensional yang hanya memiliki homologi dengan virus sekitar 88%. Jadi, vaksin rekombinan lebih efektif berperan sebagai antibodi terhadap serangan virus.

Apabila ada mutasi pada *master seed* yang digunakan sebagai bahan pembuat vaksin, perubahan yang terjadi mestinya dapat diketahui dan dapat lebih mudah dikontrol. Sebaliknya, pada vaksin konvensional, kejadian mutasi pada *master seed* akan lebih sulit diketahui. Pada dasarnya kedua jenis virus yang digunakan sebagai *master seed* tersebut memiliki resiko yang sama bila mengalami mutasi yang merugikan/membahayakan, tetapi pengendalian resiko penggunaan *master seed* rekombinan tampak lebih pasti daripada penggunaan *master seed* konvensional yang cara pembuatannya menggunakan pendekatan *random reassortment*.

Pemanfaatan bioteknologi *reverse genetics* dalam pembuatan *master seed* untuk produksi vaksin AI mungkin merupakan salah satu contoh tentang bagaimana aplikasi bioteknologi dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan produktivitas dengan tingkat resiko yang sama dengan aplikasi teknologi konvensional. Memang tidak ada teknologi apapun yang tidak menimbulkan resiko. Alat transportasi seperti pesawat, kereta api, mobil, dan lain-lain juga menimbulkan resiko kecelakaan yang dapat merenggut nyawa ribuan orang dimana saja dan kapan saja. Yang terpenting, bagaimana resiko yang ditimbulkan dapat dikendalikan dan diminimalkan frekuensinya.

Ada juga produk rekayasa genetik yang telah bertahun-tahun digunakan pada manusia dan terbukti telah menyelamatkan banyak nyawa



manusia, yaitu hormon insulin rekombinan. Hormon yang sangat dibutuhkan oleh manusia penderita diabetes tersebut dapat diproduksi secara tak terbatas oleh bakteri *Eschericia coli* yang di dalam selnya telah disisipi gen penyandi terbentuknya hormon insulin manusia.

Terlepas dari keunggulan bioteknologi *reverse genetics* yang dicontohkan di atas, perlu tidaknya memproduksi vaksin AI (baik yang rekombinan maupun yang konvensional) tergantung dari otoritas di bidang kesehatan hewan dengan tetap mempertimbangkan segala dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari berbagai aspek.

Juni 2005

3. Satwa Nugraha dan Politik Peternakan

Untuk ketiga kalinya, *Indolivestock Award* akan dianugerahkan kepada orang atau lembaga yang berhak sesuai dengan kriteria. Penganugerahan ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2006 bersamaan dengan acara *Indolivestock Expo & Forum 2006*. Lima kategori yang akan dianugerahkan meliputi 1) rekayasa input, 2) budidaya, 3) inovasi produk, 4) kelembagaan, dan 5) pengembangan sumber daya manusia. Oleh drh. Muhammad Agus Lelana, MS (dosen FKH IPB), masing-masing kategori tersebut diberi nama lain agar terkesan lebih agung yaitu 1) *Cipta Piranti Satwa Nugraha*, 2) *Nastiti Budidaya Satwa Nugraha*, 3) *Adi Guna Satwa Nugraha*, 4) *Praja Mukti Satwa Nugraha*, dan 5) *Widya Karta Satwa Nugraha*.

Di tengah suasana industri perunggasan yang masih lesu akibat *Avian Influenza* (AI), ajang pameran *Indolivestock E&F 2006* digelar. Kondisi serupa (yaitu adanya kasus AI) juga terjadi ketika dilaksanakan pameran *Indolivestock E&F 2004*. Namun demikian, penyelenggaraan ini merupakan langkah tepat dalam upaya terus mempromosikan industri perunggasan dan produk peternakan lainnya. Apalagi dengan adanya penganugerahan *award* tersebut, diharapkan selalu ada kompetisi positif ke arah kemajuan dalam membangun industri peternakan ke depan.



Adanya pameran bertaraf internasional mestinya memberi dampak positif bagi perkembangan industri peternakan di seluruh Indonesia. Selain bertujuan memenuhi dan meningkatkan konsumsi protein hewani bangsa Indonesia, juga sebagai upaya menuju swasembada produk-produk ternak, bahkan upaya untuk eksporasi. Tengok saja saat ini, sebagian besar produk peternakan masih diimpor dengan tingkat importasi yang terus membesar.

Selain promosi, tampaknya perlu perjuangan lain selain penguasaan teknis dalam membangun industri peternakan. Adanya Pajak Penghasilan Nilai (PPN) ke produk peternakan yang kurang tepat sasaran; ancaman impor bagian tubuh ternak seperti paha ayam, sayap ayam, jerohan sapi, dan lain sebagainya; ancaman masuknya daging ilegal dari negara yang belum bebas penyakit menular; dan lain-lain merupakan tantangan non teknis yang harus diatasi oleh *stakeholders* di bidang peternakan. Diperlukan taktik, strategi, dan lobi-lobi untuk dapat mencapai tujuan yang tentunya menguntungkan masyarakat banyak dengan tetap berorientasi pada kepentingan nasional. Singkatnya, diperlukan politik peternakan! Tanpa pendekatan politik, peternakan akan termarginalkan.

Terkait dengan politik peternakan ini, sangat ironis dengan apa yang terjadi di kampus. Mahasiswa sebagai calon pemimpin, saat ini lebih banyak ditempa dengan banyak hal yang bersifat teknis dan minim wawasan non teknis. Sebagai ilustrasi, dulu pada tahun 1980-an para mahasiswa Fakultas Peternakan diajari mata kuliah politik peternakan untuk membekali wawasan mahasiswa tentang dunia peternakan secara makro. Kemudian, mata kuliah tersebut dicoret dan diganti dengan mata kuliah Undang-Undang (yang terkait dengan masalah peternakan). Bahkan ketika diberlakukan kurikulum nasional tahun 1994, mata kuliah Undang-Undang tersebut hanya menjadi mata kuliah pilihan. Jelas ada degradasi pembekalan kepada mahasiswa terkait dengan penguasaan politik peternakan yang sangat penting untuk meningkatkan wawasan berpikir dan kepedulian terhadap masalah bangsa di bidang peternakan.

Tidak mengherankan apabila penguasaan mahasiswa Fakultas Peternakan saat ini di dunia peternakan jauh lebih buruk dibanding



mahasiswa di era 20 tahun lalu. Adanya pengelompokan mahasiswa Fakultas Peternakan menjadi empat program studi (yaitu Teknologi Produksi Ternak, Teknologi Hasil Ternak, Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, dan Sosial Ekonomi Peternakan) juga makin memperparah kualitas Sarjana Peternakan saat ini. Perlu peninjauan ulang terhadap kurikulum pendidikan tinggi di bidang peternakan ini. Kalau memang kurikulum masa lalu lebih tepat dalam rangka mempersiapkan calon intelektual dan calon peternak yang lebih unggul, kenapa kita tidak kembali ke kurikulum masa lalu saja? Tentunya dengan berbagai modifikasi sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. Namun bukan karena politik peternakan saja bahwa kurikulum harus disesuaikan!

Juli 2006

4. Nobel Perdamaian 2006 & Peternakan

Namanya tidak banyak disebut dan tak masuk dalam daftar nominasi, namun akhirnya Mohammad Yunus dari Bangladesh ditetapkan sebagai penerima penghargaan bergengsi tingkat dunia "Nobel Perdamaian 2006". Dia adalah seorang doktor ekonomi jebolan dari salah satu universitas di Amerika Serikat; dan berasal dari keluarga kaya dimana ayahnya merupakan seorang pedagang perhiasan logam mulia di Chittagong Bangladesh. Sejalahpun mencatat bahwa sebuah negara miskin di Benua Asia telah melahirkan sosok ilmuwan cerdas dan idealis. Seluruh warga Bangladesh larut dalam kegembiraan yang luar biasa dan bangga atas prestasi yang diraih salah satu warganya.

Di Bangladesh, banyak orang cerdas. Orang kaya tentunya lebih banyak lagi. Namun yang lebih banyak lagi adalah orang miskin karena jumlahnya diperkirakan 45% dari 147 juta penduduknya. Yang membuat Nobel Perdamaian jatuh ke Mohammad Yunus yang cerdas dan kaya di negeri miskin ini adalah hati nurani dan kepedulianya terhadap kaum miskin "*...memberi hati kepada termiskin dari kelompok miskin, memberi harapan bagi yang tidak punya harapan*" itulah Mohammad Yunus di mata sahabatnya



yang Menteri Luar Negeri Bangladesh (Kompas 16 Oktober 2006).

Melalui Grameen Bank (Bank Desa) yang didirikannya sejak 30 tahun lalu, obsesinya mengurangi jumlah kemiskinan membuat hasil dan diakui komunitas dunia. Konsepnya "*Jangan beri rakyat uang begitu saja. Rakyat tidak perlu belas kasihan. Beri akses kesempatan, maka rakyat miskin akan bangkit sendiri*" kata sang penerima Nobel. Dengan penghargaan tersebut, cita-citanya semakin melambung yaitu mengurangi jumlah kemiskinan di dunia melalui cara yang dilakukannya selama ini di Bangladesh.

Menurut data statistik, Indonesia setidaknya memiliki sekitar 11% penduduk miskin atau lebih dari 25 juta orang. Bila seorang Yunus saja mampu mengubah nasib jutaan orang miskin, tentunya pemerintah Indonesia dengan segala sumberdaya yang dimiliki akan dapat pula mengurangi atau syukur-syukur mengikis habis kemiskinan di Indonesia. Belajar dari keberhasilan Yunus, yang terpenting bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan melalui pendekatan proyek. Atau, kenapa tidak meniru saja cara Yunus yang sudah terbukti sukses di Bangladesh?

Salah satu akses kesempatan yang sangat relevan dilakukan di Indonesia adalah berusaha di bidang peternakan. Ternak (khususnya ruminansia) merupakan komoditas multi guna. Fesesnya menjadi bahan baku pupuk organik dan penyubur tanah bagi tumbuhkembangnya tanaman; tenaganya (dalam hal ternak sapi atau kerbau) menjadi pengolah tanah yang efektif, hemat energi dan ramah lingkungan bagi lahan pertanian; ternaknya itu sendiri merupakan tabungan hidup yang sangat membantu dalam penyediaan kebutuhan mendesak seperti untuk pendidikan dan hajat lainnya; usaha beternaknya dapat dilakukan di seluruh pelosok desa (sehingga dapat mengerem laju urbanisasi) karena ternak tidak memerlukan banyak prasarana produksi; hampir tidak ada resiko dalam pengusahaannya; yang lebih penting lagi, dagingnya merupakan bahan pangan sumber protein pencerdas bangsa; dan bukti empiris menunjukkan bahwa ternak telah membuat petani menjadi sejahtera. Untungnya lagi, kondisi alamnya juga sangat kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan ternak. Bandingkan dengan Bangladesh



yang 80% wilayahnya tergenangi air (sampai ada yang mencapai 3 meter) selama musim hujan setiap tahun!

Jika potensi ternak dan alamnya sudah sangat mendukung, tinggal akses permodalan yang harus disediakan pemerintah. Seperti yang dicontohkan oleh Yunus, pinjaman mestinya berbunga sangat rendah atau bila perlu tanpa bunga; dan tidak perlu adanya *borg* (jaminan utang). Kemudian yang terpenting, modal diprioritaskan untuk orang termiskin dan wanita.

Mestinya tidak ada yang sulit bagi pemerintah. Namun semuanya terpulang kepada komitmen dan kemauan politik pemerintah dalam memerangi kemiskinan di negeri yang subur ini. Semoga kemiskinan di Indonesia tidak dijadikan objek politik untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok saja. Kecuali kalau naluri, mata hati, dan kepedulian para elit pemerintahan kita sudah mati semua.

November 2006

5. Babi dan Rekayasa Genetik

Menurut kalender China, tahun 2007 adalah tahun babi. Boleh percaya boleh tidak, setiap shio (babi atau anjing atau monyet atau lainnya lagi) membawa keberuntungan sendiri. Namun yang ingin diangkat dalam tulisan ini bukan tentang apa yang terjadi pada tahun bershio babi tetapi tentang babi itu sendiri.

Ternak ini memang unik dibandingkan dengan ternak lainnya. Ternak yang beratnya mencapai 90 kg pada usia dewasa ini sangat prolifik (beranak banyak). Jumlah anak yang dilahirkan dari seekor induk bisa mencapai 36 ekor sampai 60 ekor setiap dua tahun. Pertumbuhan bobot badannya juga luar biasa cepat, bobot 90 kg dapat dicapai dalam 5-6 bulan. Hebatnya lagi, bobot badan yang cepat membumbung besar itu bisa dicapai dengan memberi jenis pakan apa saja termasuk sampah. Jadi dibanding dengan ternak besar lainnya, hewan ini benar-benar paling produktif dalam



menghasilkan daging. Bila dihitung, seekor induk babi dapat menghasilkan daging (dari anak yang dilahirkan) sekitar satu setengah ton selama dua tahun. Dalam waktu yang sama, sapi hanya mampu menghasilkan tidak lebih dari 250 kg daging. Domba atau kambing juga tidak melebihi babi dalam hal produksi dagingnya.

Anehnya, bagi penganut agama Islam, sebagaimana tertulis di salah satu ayat di Al Qur'an, "*daging babi bersama bangkai dan darah dilarang untuk dimakan*". Tetapi tidak disebutkan secara eksplisit dan spesifik alasan mengapa daging babi diharamkan untuk dimakan. Sehingga setiap orang mempunyai alasan sendiri. Seringkali pendapat yang diutarakan oleh kebanyakan orang cenderung sangat negatif terhadap babi sehingga apapun yang terkait dengan babi dilarang. Padahal yang tertulis dalam Al Qur'an hanya dilarang makan daging babi!

Sudah lebih dari 15 tahun, di Amerika dan Inggris diberitakan adanya perusahaan farmasi yang secara khusus membuat babi transgenik. Babi ini disisipi gen tertentu yang berasal dari manusia dengan harapan agar organ babi seperti ginjal dapat dicangkokkan ke tubuh manusia yang memerlukannya tanpa ada penolakan. Pemikiran untuk membuat babi transgenik ini tentunya merupakan lanjutan dari hasil percobaan yang dilakukan bertahun-tahun tentang penggunaan organ babi untuk transplantasi. Para ilmuwan sangat optimis akan masa depan babi untuk penyedia organ. Selain jumlah ternak babi boleh dibilang tidak terbatas, ukuran tubuh dan organ-organnya juga sama dengan manusia. Ke depan, sangat mungkin lebih banyak gen-gen lain yang diambil dari manusia akan disisipkan ke tubuh babi dalam upaya menghasilkan organ untuk ditransplantasikan ke manusia.

Penggunaan babi sebagai hewan penyedia organ bagi manusia didasarkan pada kelangkaan manusia yang mau menyumbangkan organ tubuhnya. Akhirnya jual beli organ semakin marak dan yang lebih parah lagi adanya praktik pengambilan organ tubuh secara paksa dari para terpidana atau dari orang-orang lemah lainnya. Hal ini memang terjadi, salah satunya di negeri China. Kejadian ambil organ secara paksa ini semakin



hari semakin banyak diberitakan. Berita terakhir dimuat di Majalah Intisari edisi Desember 2006 (halaman 168-181). Intinya seorang investigator Hak Asasi Manusia dari Kanada menemukan fakta bahwa ribuan orang China penganut aliran "Falun Gong" (aliran yang sekarang dilarang pemerintah China) hilang bak ditelan bumi. Di sisi lain, organ tubuh apa saja tersedia dalam waktu singkat bagi orang yang membutuhkan untuk transplantasi organ. Investigator tersebut mencurigai adanya pengambilan organ secara paksa dari penganut ajaran tersebut yang saat ini memang banyak yang ditahan oleh pemerintah China. Mereka pun banyak yang ketakutan dan mengungsi ke negara lain, termasuk mampir dulu ke Indonesia.

Tampaknya ada hubungan menarik antara ketersediaan organ babi transgenik yang tak terbatas dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam upaya menyediakan organ tubuh manusia. Bila teknologi nanti berhasil dan organ babi benar-benar dapat dicangkokkan ke tubuh manusia, maka tidak ada lagi pengambilan organ manusia secara paksa yang jelas-jelas tidak berperikemanusiaan dan tidak beradab tersebut.

Lalu apa hubungannya dengan pelarangan makan daging babi? Banyak gen manusia akan disisipkan ke tubuh babi untuk tujuan transplantasi. Akibatnya, makan daging babi transgenik berakibat sama dengan makan daging manusia. Ini yang mungkin menjadi alasan bahwa daging babi dilarang dikonsumsi.

Jadi, pelarangan makan daging babi tidak harus diartikan juga dengan pelarangan apa saja yang terkait dengan babi sebagaimana yang diutarakan banyak pihak selama ini. Transplantasi organ babi ke manusia merupakan salah satu potensi. Ini sama dengan transfusi darah antar manusia. Darah juga dilarang dikonsumsi tetapi darah telah menyelamatkan jutaan manusia lewat transfusi!

Januari 2007



6. Refleksi di Edisi Seratus

Dunia dalam genggaman! Ini bukan kiasan tetapi realita yang sudah jamak ditemui saat ini. Mau apa saja dapat dilakukan tanpa harus mengayunkan kaki tetapi cukup dengan menggerakkan jari-jemari tangan pada telepon genggam (telgam) kita. Mau membayar tagihan listrik; telepon; atau kartu kredit, membeli barang atau jasa, cukup dengan menekan tombol pada telgam tersebut, semua urusan beres. Melalui telgam, kita juga dapat menjelajah internet atau mengirim faks ke berbagai tujuan dan melakukan aktivitas lainnya. Tentu saja, kita bisa juga mengambil berbagai informasi terkini tentang berbagai macam berita dari manapun asalnya melalui penelusuran internet di telgam. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah gaya hidup manusia saat ini.

Namun demikian, manusia yang telah dimanjakan oleh teknologi tersebut masih haus informasi atau tulisan lainnya dari media cetak. Terbukti di era teknologi informasi seperti diilustrasikan di atas, semakin banyak media cetak diterbitkan dalam bentuk majalah, surat kabar, buletin, tabloid, dan lain-lain. Padahal manusia yang mengonsumsi berbagai media cetak itu kebanyakan juga mereka yang memiliki telgam dengan berbagai kemudahan tersebut di atas. Artinya, manusia masih memerlukan atau menikmati karya jurnalistik yang mengintegrasikan unsur keindahan gambar/foto, ketepatan informasi, kesopanan tutur bahasa dalam suatu cetakan yang indah dan dalam kemasan yang nyaman untuk dibaca, dipajang, atau disimpan (didokumentasikan).

Salah satu bentuk media cetak adalah majalah yang biasanya diterbitkan secara mingguan, dua-mingguan, atau bulanan. Karena tidak diterbitkan setiap hari, pola pemberitaan di majalah sangat berbeda dengan pemberitaan di surat kabar harian. Kesegeraan memberitakan suatu informasi tidak terlalu penting tetapi menyajikan hasil analisis berbagai informasi penting untuk dijadikan tulisan komprehensif tentang isu terkini merupakan kekuatan suatu majalah. Berbagai narasumber dimintai pendapatnya terhadap isu terkini tersebut yang diharapkan menghasilkan pendapat atau opini beragam. Jadilah tulisan itu merupakan sajian menarik



yang esensinya juga meningkatkan wawasan atau bahkan mencerdaskan pembaca.

Membuat tulisan komprehensif yang didalamnya mengupas benturan dua pendapat yang berbeda atau merangkum keserasian dua pendapat yang selaras bukan suatu pekerjaan mudah. Perlu kesabaran dalam memperoleh informasi akurat dari narasumber yang tepat; perlu memahami etika dalam penulisan; perlu kehati-hatian dalam menyitir atau menyadur atau menerjemahkan pendapat narasumber terhadap suatu isu; serta perlu kepandaian dalam menata alur cerita yang logis dan kronologis sehingga produk akhir tulisan mampu menstimulir otak pembaca untuk ikut menganalisa atau masuk dalam pergulatan pemikiran di permasalahan yang diangkat dalam majalah tersebut. Jelas hal ini merupakan jenis pekerjaan intelektual berkualitas yang harus ditopang pula dengan idealisme.

Jurnalis dalam menyampaikan informasi ke khalayak boleh saja salah karena kekhilafan atau hal lain yang tak disengaja; tetapi jurnalis tidak boleh berbohong secara sengaja. Dapat terlihat dalam berbagai tulisan di majalah bahwa jurnalis sebagai seorang profesional dapat menyajikan tulisan secara objektif dan berimbang, serta sangat piawai mendapatkan informasi melalui berbagai pertanyaan yang jeli dan penuh *curiosity* (keingintahuan).

Tidak hanya tulisan yang menarik dan tajam analisisnya yang dibutuhkan dalam menerbitkan suatu majalah. Sampul majalah dengan foto atraktif yang sesuai dengan tema atau topik utama penyajian berita merupakan hal substantial untuk membuat imej positif bagi pembaca terhadap suatu majalah. Tata letak tulisan, urutan dalam penempatan rubrik, penempatan gambar iklan dengan jumlah yang proporsional terhadap jumlah halaman majalah, pemberian judul tulisan atau hal-hal kecil lainnya tampaknya merupakan bentuk keragaman seni dan kreativitas para pekerja intelektual di suatu penerbitan majalah.

Berpegang pada kaidah kejurnalistikan tersebut, majalah TROBOS (yang didirikan pada bulan Oktober 1999 oleh Alm H. Wahyudi Mohtar



dan kawan-kawan) memfokuskan pemberitaannya dalam bidang agribisnis peternakan dan perikanan. Pasang surut dan dinamika dalam menerbitkan majalah tersebut telah dialaminya sebagai bentuk "kawah candradimuka" bagi para jurnalis muda sebagai pemegang estafet dalam membesarkan majalah ini nantinya.

Dalam perjalanannya, bulan Januari 2008 ini, majalah Trobos memasuki edisi ke 100. Ini merupakan angka baik yang dapat dijadikan momentum penting bagi seluruh *crew* majalah Trobos untuk melakukan evaluasi diri secara komprehensif serta introspeksi terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan selama ini, dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen dan bisnis majalah Trobos ke depan. Selamat berkreasi dan berinovasi!

Januari 2008

7. Selamat Jalan Pak Yud

"Assalamu'alaikum, Merdeka!" demikian salam khas Pak Yud (sapaan akrab H. Wahyudi Mohtar) ketika menelpon, menerima telpon atau pas saling bertemu para sahabatnya. Gaya berceritanya selalu menarik, penuh semangat, runut, sopan, disertai gerakan tubuh dan tangan sesuai dengan kata-kata yang dikeluarkannya. Ini semua membuat pesan yang disampaikan mudah ditangkap.

Dengan perawakan kecil dan rambut yang memutih keperakan, Pak Yud selalu bergerak lincah dan cepat seolah tidak ingin kehilangan waktu barang sedetikpun. Satu pekerjaan belum selesai, pekerjaan lain sudah dirancang, dan pekerjaan lain lagi mulai digagas. Tidak ada hentinya untuk berkreasi. Bukan untuk dirinya sendiri tetapi dipersembahkan bagi komunitas peternakan, bagi pemerintah, bagi masyarakat luas!

Jiwa muda dan idealismenya dalam memperjuangkan peternakan secara terus menerus tanpa lelah membuat sosok yang asli jurnalis ini sangat dekat dengan kalangan muda kampus, asosiasi, komunitas peternak, dan



pabrikan. Koleganya banyak dan sangat beragam, mulai dari kalangan bawah sampai pejabat tinggi negara. Sangat objektif dalam memandang persoalan dan independen dalam memberikan pendapat menjadikan Pak Yud sebagai sosok yang tidak pernah takut terhadap kelompok manapun.

Demi kepentingan nasional, apapun akan dilakukan oleh Pak Yud yang mengenal dunia peternakan (khususnya perunggasan) sejak awal tahun 1970-an. Tubrukan pendapat dan bersitegang dengan berbagai pihak atau bahkan ancaman sering dialami akibat sikap dan prinsipnya. Siapapun orangnya bila berpikir jernih, punya prinsip, dan ber-visi akan dibela matematian. Sebaliknya, kepada orang-orang yang hanya berfikir sesaat dan mementingkan diri sendiri atau golongan, bermusuhan pun siap dilayani. Jelas tipe orang yang punya nyali dan pantang menyerah bila apa yang dilakukan dianggap benar dan objektif. Apalagi menyangkut kepentingan nasional.

Sikap berani bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambil membuat apa yang dilakukan menjadi *nothing to loose* dan tanpa beban. Sungguh suatu teladan yang sangat baik bagi generasi muda. Para aktivis mahasiswa sebagai calon pemimpin perlu belajar banyak dari sepak terjang pria Kediri ini.

Tetapi sebagai manusia biasa seperti halnya kita semua, Pak Yud memiliki kelemahan dan kekurangan juga. Tak ada manusia yang sempurna! Bagi generasi muda yang masih berpeluang menyumbangkan energi dan pemikirannya untuk kemajuan peternakan di Indonesia, banyak teladan dari Pak Yud yang perlu diteruskan dan ada sebagian kecil kelemahan dan kekurangannya yang sebaiknya dilupakan dan dimaafkan.

Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, komunitas peternakan sangat kehilangan sosok “pejuang” yang menjadikan dirinya bagai *lilin* yang selalu ingin menerangi lingkungannya melalui berbagai aktivitasnya dengan seringkali melupakan jiwa raganya sendiri.

Meninggalnya Pak Yud pada tanggal 17 Agustus 2006 dan hari pemakamannya jatuh pada hari Jumat sepertinya menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa karena kebiasaan Pak Yud mengucapkan “assamu’alaikum,



merdeka" tadi. Jalanan yang sepi karena hari libur membuat banyak sahabat dan pelayat lainnya merasa nyaman mengantar kepergian Pak Yud di peristirahatan terakhirnya di Pemakaman Umum Pondok Kelapa Jakarta Timur. Hari libur yang jatuh pada hari Jumat juga membuat Masjid Al Muhajirin penuh sesak oleh jama'ah yang mensholatkan jenazahnya. Sebagian besar jamaah melantunkan doa dan memohonkan ampun bagi almarhum yang disemayamkan di masjid tersebut. Semoga itu semua pertanda lapangnya jalan Pak Yud menghadap sang Khalik sebagai imbalan atas kebaikan dan jasa-jasanya dalam memperjuangkan peternakan dan komunitasnya. Amiin...

Selamat Jalan Pak Yud. Kami yang ditinggalkan akan mengawal dan menjaga semangatmu demi kemajuan peternakan Indonesia!

September 2006





Biodata Penulis

Muladno alias Agus Muladno alias Kanang dilahirkan di Kediri pada tanggal 24 Agustus 1961 dari orangtua (Alm) Basar dan Hj. Asyiat. Tanggal 26 September 1987, menikahi Sri Sulandari, puteri keempat dari (Alm) Soetowo dan (Alm) Soegiharti. Kini dikaruniai dua orang anak, yaitu Aussie Andry Venmarchnanto dan Endye Mendelian Lecturariseta.

Pendidikan dasar dan menengahnya diselesaikan di SD, SMP, dan SMA Negeri di Kediri, kemudian melanjutkan studi di Fakultas Peternakan UGM, lulus dan memperoleh gelar sarjana peternakan tahun 1985; lulus dan memperoleh gelar Master of Science in Agriculture dari University of New England, Australia tahun 1990; lulus dan memperoleh gelar Doktor (PhD) dari University of Sydney, Australia tahun 1995. Penelitian yang dilakukan untuk studi doktornya adalah memproduksi DNA marker dalam rangka pembuatan peta genetik babi.

Segera setelah menyelesaikan studi doktornya, melanjutkan penelitian genom babi di National Institute of Animal Industry, Jepang sampai pertengahan 1996 atas biaya dari Science and Technology Agency of Japan; kemudian dilanjutkan di STAFF Institute, Japan atas biaya dari Japan Race Association sampai pertengahan tahun 1997; dan terakhir di Nagoya University selama dua bulan tahun 1998 atas biaya dari Japan Society for Promotion of Science (JSPS).

Selama menjadi staf pengajar di Fakultas Peternakan IPB, aktif melakukan penelitian dan kajian di bidang peternakan khususnya aspek pemuliaan dan genetika. Sumber dana penelitian diperoleh dari program Riset Unggulan Terpadu, Toray Foundation, Food and Agriculture Organization (FAO), International Atomic Energy Agency (IAEA), dan lain lain. Bersama dengan para sejawatnya di Bagian Pemuliaan dan Genetika Ternak serta dukungan penuh dari Dekan Fapet IPB, Muladno memimpin pendirian Laboratorium Genetika Molekuler Ternak yang mulai difungsikan penggunaannya secara resmi pada akhir tahun 2009 dan



sampai sekarang menjadi Kepala Laboratorium tersebut.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pengembangan dan Kerjasama Sekolah Pascasarjana IPB 2008-2012, pernah diberi amanah menjadi Sekretaris Program Studi Teknologi Produksi Peternakan tahun 1998 dan Ketua Program Studi Teknologi Produksi Peternakan 1998-2001. Selain itu, aktif sebagai narasumber di berbagai Lembaga Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Pemerintah, dan Perusahaan Konsultan. Sampai saat ini, juga masih menjadi anggota Dewan Redaksi Majalah Agribisnis Peternakan dan Perikanan TROBOS.

Di bidang keprofesian dan sosial kemasyarakatan, bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI), salah satu Ketua Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB-ISPI), Pengurus Yayasan Keluarga Istimewa Indonesia (YKII), Ketua Tim Penilai Indolivestock Award; dan salah satu deklarator pendirian Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia (HILPI).

Hingga sekarang juga masih aktif menjadi anggota Tim Teknis Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan, anggota Komisi Perbibitan Ternak, anggota Tim Perumus dan Penyusun *Blue Print* Pengembangan Ternak Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Lokal, dan Kambing/Domba, anggota Tim Perumus dan Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumberdaya Genetik dan Perbibitan Ternak, serta anggota tim Perumus dan Penyusun Undang Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan anggota Komisi Nasional Sumber Daya Genetik sejak 2012.

Sebagai akademisi, telah membimbing dan meluluskan lebih dari 56 mahasiswa S1, 16 mahasiswa S2, dan 15 mahasiswa S3; menulis lima judul buku, menjadi editor lima judul buku, menerjemahkan satu judul buku, menulis kolom/opini lebih dari 100 judul, mempublikasikan puluhan artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional. Penghargaan yang pernah diterima adalah Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, dan TROBOS Award untuk Mitra Pemikir Pembangunan Peternakan.

